



PEMERINTAH KOTA BINJAI

RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

TAHUN 2016 - 2021



Jalan Jambi No. 9 Kota Binjai





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *subhanallahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016 - 2021 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Instansi Pemerintah Daerah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional, dan global, serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 merupakan Acuan dan Arahan Pembangunan Pertanian yang berkelanjutan yang berisikan Visi, Misi, Program, dan Kegiatan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai diharapkan dapat memberikan pedoman dan arah dalam melaksanakan kegiatan ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan di Kota Binjai

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini masih ada terdapat kekurangannya, sehingga untuk penyempurnaannya diperlukan masukan yang positif dalam upaya penyempurnaan Rencana Strategis ini. Selanjutnya agar Rencana Strategis ini dapat terlaksana dengan baik, diharapkan kepada segenap aparatur di jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dapat berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Besar harapan kami, Rencana Strategis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi aparatur di masa lima tahun yang akan datang. Akhirnya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Rencana Strategis ini.

Binjai, Juni 2017
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

Ir. DEWI ANGGERIANI
PEMBINA TK. I
NIP. 19630809 199203 2 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
II. GAMBARAN PELAYANAN	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	6
2.2. Sumber Daya SKPD	37
a. Sumber Daya Aparatur SKPD	37
b. Anggaran Belanja Langsung dari APBD SKPD	38
c. Pengembangan Kapasitas Institusi SKPD	39
d. Pembangunan Sumberdaya Insani Pelaku Agribisnis	40
e. Pembangunan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Manajemen Sumberdaya Alam Pertanian Kota Binjai	42
1) Sumber Daya Lahan dan Air	43
2) Pupuk, Alsintan, dan Pembiayaan	45
3) Perbenihan	45
f. Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kota Binjai	48
g. Penyediaan Pangan Masyarakat Kota Binjai	50
h. Pertanian dalam Jasa Lingkungan Kota Binjai	51
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	53
a. Produksi Tanaman Pangan Kota Binjai	53
b. Produksi Palawija Berupa Komoditas Ubi Kota Binjai	54
c. Produksi Hortikultura Kota Binjai	55
d. Produksi Peternakan Kota Binjai	56
e. Produksi Perikanan Kota Binjai	57



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	58
2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD	58
a. Pemenuhan Pangan Masyarakat, Bahan Baku Industri dan Energi	58
b. Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan, dan Bencana Alam	59
c. Kondisi Perekonomian Regional	61
d. Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Binjai	64
e. Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian	64
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKP	65
a. Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem Kota Binjai	65
b. Lahan Pertanian Kota Binjai	67
c. Teknologi Pertanian Kota Binjai	67
d. Tenaga Kerja Pertanian Kota Binjai	69
e. Pasar Produk Pertanian Kota Binjai	70
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	73
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	73
a. Lahan Pertanian Kota Binjai	73
1) Konversi Lahan yang Tidak Terkendali	73
2) Keterbatasan Dalam Pencetakan Lahan Baru	74
3) Penurunan Kualitas Lahan	74
4) Rata-Rata Kepemilikan Lahan yang Sempit	75
5) Ketidakpastian Status Kepemilikan Lahan	75
6) Beternak Tidak Mempunyai Lahan	76
b. Infrastruktur Pertanian Kota Binjai	76
c. Sarana Produksi Pertanian Kota Binjai	77
d. Regulasi Pertanian	79
e. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pertanian Kota Binjai	81
1) Kelembagaan Petani Belum Mempunyai Posisi Tawar Kuat	81
2) Keterbatasan Petani Dalam Pemanfaatan Teknologi	82
3) Menurunnya Minat Generasi Muda	82
f. Permodalan Pertanian	84
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Binjai dan Wakil Walikota Binjai .	85
a. Visi Pemerintah Kota Binjai	85
b. Misi Pemerintah Kota Binjai	86



c. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Binjai	88
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	91
a. Gambaran Renstra Kementerian Pertanian	91
b. Gambaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	92
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kota Binjai	95
a. Kebijakan Kewilayahan	95
b. Kawasan Strategis Berkaitan dengan Aspek Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	97
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	98
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Kota Binjai	98
b. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kota Binjai	99
c. Investasi Sektor Pertanian Kota Binjai	100
d. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian	102
e. Nilai Tukar Petani	102
f. Kesejahteraan Petani Kota Binjai	104
1) Pendapatan Per Kapita Petani Kota Binjai	104
2) Tingkat Kemiskinan Sektor Pertanian Kota Binjai	105
3) Kerawanan Pangan Rumah Tangga di Kota Binjai	107
IV. VISI, MISI, TUJUAN, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	109
4.1. Visi dan Misi SKPD	109
a. Visi SKPD	109
b. Misi SKPD	110
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	110
a. Tujuan SKPD	110
b. Sasaran SKPD	110
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	111
a. Strategi SKPD	112
b. Kebijakan SKPD	113
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	117
5.1. Pengantar : Kerangka Pendanaan SKPD	117
a. Pendanaan Swasta dan Swadaya Masyarakat	117



b. Pendanaan APBD Kota Binjai	118
c. Pendanaan APBD Sumatera Utara	119
d. Pendanaan APBN	120
5.2. Rencana Program dan Kegiatan SKPD	121
VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN	149
6.1. Pengantar : Target Makro	149
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Kota Binjai ...	149
b. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kota Binjai	149
c. Investasi Sektor Pertanian Kota Binjai	149
d. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian	150
e. Nilai Tukar Petani	150
f. Pendapatan Per Kapita Petani Kota Binjai	150
6.2. Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	151
VII. PENUTUP DAN KAIDAH PELAKSANAAN	152
7.1. Kaidah Pelaksanaan	152
7.2. Penutup	153



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2011-2015	38
2.	Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016	38
3.	Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Kota Binjai 2010-2014	40
4.	Jumlah Kelompok Tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air di Kota Binjai Tahun 2014	41
5.	Luas Lahan Sawah Kota Binjai Tahun 2010-2015	43
6.	Jasa Lingkungan Sub-Sektor Pertanian Kota Binjai dan Strategi Peningkatan Nilai Positif Jasa Lingkungan	52
7.	Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Komoditas Padi, Jagung, Kedelai Kota Binjai Tahun 2010-2015	53
8.	Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Palawija Berupa Komoditas Ubi Kota Binjai Tahun 2010-2015	54
9.	Produksi Komoditas Hortikultura Unggulan, Penting, dan Prospektif Kota Binjai Tahun 2010-2015	55
10.	Produksi Komoditas Peternakan Kota Binjai Tahun 2010-2014	56
11.	Populasi Ternak Kota Binjai Tahun 2010-2015	57
12.	Produksi dan Luas Panen Komoditas Perikanan Kota Binjai Tahun 2010-2015	58
13.	Daftar Varietas Tanaman Buah Unggulan Kota Binjai	66
14.	Hubungan Hirarki Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dengan Target Capaian Kinerja yang Harus Diwujudkan SKPD	90
15.	Sinergitas Dalam Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah Kepada Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Terkait Pembangunan Pertanian dan Perikanan	95
16.	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertanian Kota Binjai 2010-2014 (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)	98
17.	Pertumbuhan Pangsa Tenaga Kerja Pertanian dan Pertumbuhan Pangsa PDRB Pertanian Kota Binjai Tahun 2010-2014	99
18.	Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian di Kota Binjai dan Sumatera Utara Tahun 2010-2015	101
19.	Perkembangan Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Sumatera Utara Tahun 2010-2014	102
20.	Perkembangan Pendapatan Per Kapita Sektor Pertanian Kota Binjai Tahun 20010-2014 atas Harga Konstan Tahun 2000	105
21.	Jumlah Keluarga Rawan Pangan Kota Binjai Tahun 2012–2014	107



22. Daerah Potensi Rawan Bencana di Kota Binjai	107
23. Pokok-Pokok Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	109
24. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021	111
25. Hubungan Antara Strategi dan Kebijakan Dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021	116
26. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 ...	121
27. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016- 2021 Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	151



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	8
2.	Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumatera Utara Tahun 2010-2015 (<i>tahun dasar 2012 = 100</i>)	103
3.	Jumlah Rumah Tangga Petani Gurem di Kota Binjai Tahun 2003 dan 2013	106
4.	Perkembangan Keluarga Rawan Pangan Kota Binjai Tahun 2012-2014	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 meliputi penetapan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai berisi kebijakan dan program yang pada saatnya akan dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai 2016-2021 disusun sebagai perwujudan amanah Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2016-2021) sebagai kelanjutan dari RPJMD Kota Binjai tahap ke-2 (2010-2015) yang telah berakhir. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai tahap ke-3 (2016-2021) ini difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan industri berbasis online dengan dukungan infrastruktur yang memiliki daya saing yang berwawasan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJMD Kota Binjai 2005-2025.

Pada RPJMD tahap-3 (2016-2021), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi daerah Kota Binjai. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDRB, penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah), penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga petani dan peternak serta pembudidaya ikan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMD tahap-2 (2010-2015) yang meliputi (1) peningkatan produktivitas tanaman pangan persatuan luas dengan penyuluhan penerapan teknologi tepat guna dan meningkatkan ketahanan pangan, (2) peningkatan populasi peternakan dengan penyuluhan penerapan teknologi tepat guna dan meningkatkan

pendapatan daerah dari retribusi rumah potong hewan, (3) peningkatan produksi budidaya perikanan persatuan luas dengan penyuluhan penerapan teknologi tepat guna, (4) peningkatan keanekaragaman kuantitas dan kualitas tanaman, peternakan, dan perikanan, dan (5) peningkatan kesejahteraan petani melalui promosi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Sampai saat ini telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan.

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah Kota Binjai terlihat nyata. Selama periode 2010-2015, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Binjai mencapai 4,44 % dengan pertumbuhan sekitar 0,45 %. Pada tahun 2014, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian di Kota Binjai sebanyak 5.714 orang atau sekitar 5,14 % dari total tenaga kerja.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai tahap ke-3 (2016-2021), pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2016-2021) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Penataan Ekonomi dan Lingkungan yang Baik (*Agriculture for Smart Economy and Smart Environment*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan, dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan Kota Binjai merupakan kunci penting keberhasilan dalam mewujudkan *Kota Cerdas yang Layak Huni, Berdaya Saing, dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai yang Sejahtera*.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja Pemerintah Pusat mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan

rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sedangkan memajukan sektor perikanan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal mengelola sumber daya perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan adanya paradigma sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Binjai 2016-2021, maka sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tahun 2016-2021 adalah (1) peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, (2) peningkatan produksi peternakan, (3) peningkatan produksi perikanan, (4) peningkatan diversifikasi pangan dalam rangka ketahanan pangan, (5) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar, (6) pengembangan penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (7) peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan pembudidaya ikan, serta (8) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Ketahanan Pangan Kota Binjai meliputi : (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan pertanian, peternakan, dan perikanan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, peternakan, dan perikanan, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/ bibit pertanian, peternakan, dan perikanan, (4) penguatan kelembagaan petani, peternak, dan pembudidaya ikan, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan usaha tani, usaha ternak, dan usaha budiya ikan, (6) pengembangan dan

penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian, peternakan, dan perikanan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 adalah Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021 yang dipadu dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam program pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan secara luas melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/ Permentan/ HK.140/ 4/ 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dan juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/ Permen-KP/ 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/ Permen-KP/ 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 yang keduanya merupakan perwujudan RPJMN tahap ketiga (2015-2019) di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 ini merupakan acuan dan arahan pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan dengan pengembangan sumber daya manusia petugas penyuluh, petani, peternak, dan pembudidaya ikan serta sekaligus untuk mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas produk, mutu dan penganekaragaman komoditi usaha pertanian, peternakan dan perikanan guna pencapaian peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pertanian, peternakan, dan perikanan.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Strategis ini menjelaskan perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016 - 2021, guna mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016 - 2021 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini, yaitu :

Bab I	Pendahuluan	:	Memuat tentang latar belakang penulisan, landasan hukum serta maksud dan tujuan Renstra ini.
Bab II	Gambaran Pelayanan	:	Memuat tentang pelayanan SKPD yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya serta sumber daya yang tersedia.
Bab III	Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	:	Memuat tentang isu-isu strategis mengacu pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta telaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota.
Bab IV	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	:	Memuat tentang rumusan visi dan misi SKPD yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran SKPD serta strategi dan kebijakan SKPD.
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif	:	Menyajikan tabel tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
Bab VI	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	:	Menyajikan tabel tentang indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab VII	Penutup dan Kaidah Pelaksanaan	:	Menyajikan secara ringkas kalimat penutup dan kaidah pelaksanaan terhadap Renstra SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagai institusi dinas daerah yang diberi mandat untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, dan penyuluhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, pada Pasal 2 ayat (2); Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan serta tugas pembantuan.

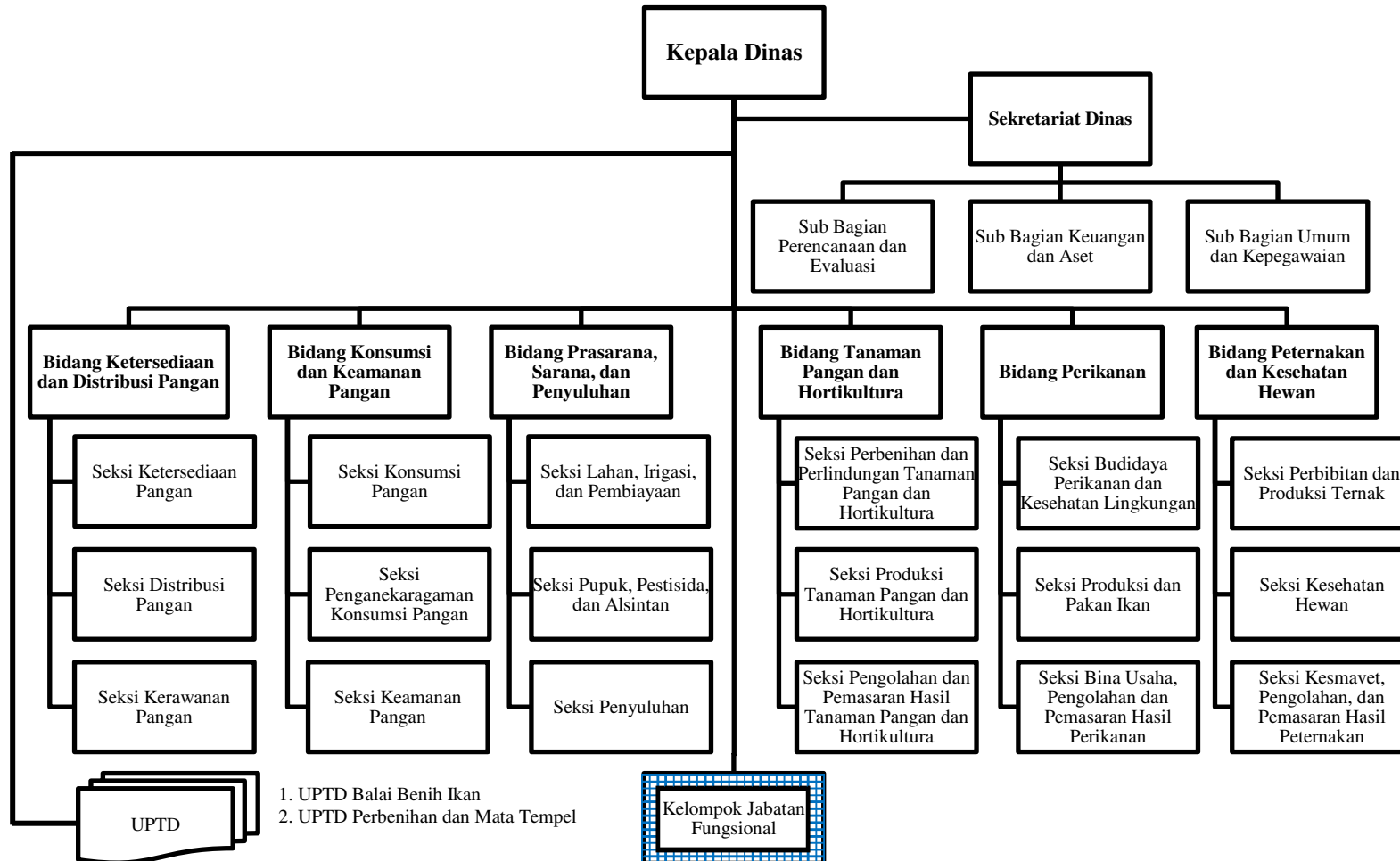
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) pada Peraturan Walikota Binjai tersebut di atas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- c) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e) penyusunan program penyuluhan pertanian;
- f) penataan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan;

- g) pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, benih/bibit ikan dan pakan ikan;
- h) pengawasan peredaran sarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
- i) pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;
- j) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan, dan penyakit ikan;
- k) pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l) pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan;
- m) penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- n) pemberian rekomendasi teknis pertanian, peternakan, dan perikanan;
- o) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- p) pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- q) penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
- r) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mengacu pada Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, pada lampiran digambarkan bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yaitu sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Kepala Bidang, dan 2 (dua) Kepala UPTD, yakni :

1) Sekretaris

Adapun Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- b) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- c) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d) penataan organisasi dan tata laksana;
- e) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f) mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- g) mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- h) mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- i) mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- j) mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k) pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yakni :

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Adapun Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (d) penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (e) penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- (f) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (g) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (h) menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD);
- (i) menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- (j) menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- (k) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Adapun Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan kegiatan rutin;
- (b) melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- (c) melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- (d) melakukan urusan gaji pegawai;
- (e) melakukan administrasi keuangan;
- (f) melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- (g) melakukan penyusunan laporan keuangan;
- (h) melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- (i) melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- (j) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- (k) melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
- (l) melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- (m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- (n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol, serta ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (b) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (c) menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- (d) melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- (e) melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- (f) melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- (g) melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- (h) melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
- (i) melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (j) melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- (k) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Adapun Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;

- (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (e) penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (g) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (h) penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- (i) penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kota;
- (j) penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- (k) penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- (l) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan; dan
- (m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

Adapun Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup ketersediaan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan;
- (b) melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (c) melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (f) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (g) menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- (h) melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- (i) menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- (j) menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- (k) menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- (l) menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- (m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- (n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Distribusi Pangan

Adapun Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Distribusi Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- (g) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- (h) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- (i) melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- (j) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- (k) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- (l) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
- (m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
- (n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Kerawanan Pangan

Adapun Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kerawanan Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (g) melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- (h) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- (i) melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kota;
- (j) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- (k) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
- (l) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kerawanan Pangan; dan
- (m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Adapun Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (e) penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (g) penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- (h) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Konsumsi Pangan

Adapun Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian,

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- (g) melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- (h) melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- (i) melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- (j) melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- (k) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Konsumsi Pangan; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Adapun Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup penganekaragaman konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (g) melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- (h) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- (i) melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- (j) melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (k) melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- (l) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- (m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Keamanan Pangan

Adapun Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (g) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- (h) melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- (i) melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- (j) melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- (k) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan; dan

(l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan

Adapun Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- (b) penyusunan program pertanian;
- (c) penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- (d) penyediaan informasi dan pengkajian iklim;
- (e) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- (f) penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- (g) pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- (h) pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- (i) melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- (j) melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- (k) pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan

Adapun Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup

pengelolaan lahan, irigasi, dan pembiayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan, irigasi, dan pembiayaan pertanian;
- (c) melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, dan pembiayaan pertanian;
- (d) melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- (e) melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- (f) melakukan penyediaan informasi dan pengkajian iklim;
- (g) melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- (h) melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- (i) melakukan bimbingan, fasilitasi, dan pelayanan investasi pertanian;
- (j) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan; dan
- (k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Adapun Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dalam lingkup pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (c) melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (d) melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (e) melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (f) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Penyuluhan

Adapun Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, serta informasi penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
- (c) melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- (d) melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- (e) melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;

- (f) melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- (g) melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- (h) melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- (i) melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- (j) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- (k) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- (l) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- (m) melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- (n) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
- (o) melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (b) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (c) pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- (d) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (e) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (g) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (h) pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

- (1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan dalam lingkup perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (c) melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (d) melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- (e) melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- (g) melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- (h) melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- (i) melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- (j) melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- (k) melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- (l) melakukan pengelolaan data OPT;
- (m) melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- (n) melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- (o) melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- (p) melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- (q) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (r) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dalam lingkup produksi tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangandan hortikultura;
- (c) melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangandan hortikultura;
- (d) melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (e) melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (c) melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (d) melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- (e) melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- (g) melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (h) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (i) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (j) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Perikanan

Adapun Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, pakan, kesehatan lingkungan, bina usaha, serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- (b) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ikan dan pakan ikan;
- (c) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ikan;
- (d) monitoring penyakit ikan dan kesehatan lingkungannya;
- (e) monitoring peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ikan, induk ikan, pakan ikan, dan obat ikan;
- (f) monitoring pemasukan dan pengeluaran ikan, serta produk ikan;
- (g) pemberian bimbingan dan pembinaan usaha di bidang perikanan;
- (h) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- (i) pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan; dan



- (j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan

Adapun Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup budidaya perikanan dan kesehatan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang lingkungan untuk budidaya perikanan;
- (c) melakukan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik bagi kelompok pembudidaya ikan (pokdakan);
- (d) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi budidaya perikanan berdasarkan rumah tangga perikanan (RTP) dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan);
- (e) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi wilayah perairan umum dan memelihara kelestarian secara berkelanjutan;
- (f) melaksanakan monitoring kualitas air dan budidaya perikanan;
- (g) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan; dan
- (h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan

Adapun Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan

dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup produksi dan pakan ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi dan Pakan Ikan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi dan pakan ikan;
- (c) melakukan pendataan kawasan produksi perikanan;
- (d) melakukan pengelolaan hasil benih ikan, induk ikan, dan calon induk ikan secara kuantitas dan kualitas;
- (e) melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi melalui pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
- (f) melakukan pembinaan mutu pengelolaan pakan ikan;
- (g) melaksanakan pengawasan dan monitoring produksi ikan dan pengolahan pakan;
- (h) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi dan Pakan Ikan; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Adapun Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- (c) melakukan inventarisasi dan identifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (d) melaksanakan pendataan, proses rekomendasi bina usaha dan pembinaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (e) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- (f) melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan fasilitas kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi;
- (g) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- (h) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Adapun Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (b) pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- (c) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- (d) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- (e) pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (f) pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- (g) pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- (h) pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

- (i) pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (j) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (k) pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak

Adapun Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- (c) melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- (d) melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- (e) melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- (f) melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- (g) melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

- (h) melakukan bimbingan pengadaan sperma beku, inseminasi buatan (IB) dan embrio transfer serta monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaannya di lapangan;
- (i) melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak, melalui bimbingan pengkajian dan penerapan, pembibitan ternak dan bimbingan reproduksi;
- (j) melakukan penyiapan bahan pemberdayaan peternak dan kelompok peternak;
- (k) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Adapun Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- (c) melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- (d) melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- (e) melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- (f) melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- (g) melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;

- (h) melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - (i) melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - (j) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - (k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Adapun Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (c) melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- (d) melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- (e) melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- (f) melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;

- (g) melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- (h) melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- (i) melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- (j) melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (k) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (l) melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (m) melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (n) melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (o) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (p) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (q) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- (r) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai, pada Pasal 33 ayat (2); Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Pada Pasal 34; Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang masing-masing dipimpin Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yakni :

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- (b) memproduksi benih ikan berkualitas dan berkesinambungan;
- (c) menentukan standar mutu benih ikan yang berkualitas, bebas hama dan penyakit;
- (d) memantau dan mengawasi perawatan pembenihan ikan dalam menghasilkan benih unggul;
- (e) pengadaan dan seleksi indukan dan calon indukan;
- (f) pemeliharaan dan pengembangan mesin dan peralatan balai benih ikan;
- (g) menampung dan memasarkan benih UPR (Unit Pembenihan Rakyat), memfasilitasi pemasaran dan pengembangan teknologi pembenihan ikan;
- (h) melaksanakan pemasaran benih ikan;
- (i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala UPTD Perbenihan dan Mata Tempel

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Perbenihan dan Mata Tempel mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- (b) melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
- (c) melaksanakan proses mata tempel dari berbagai jenis tanaman;
- (d) melaksanakan proses benih sampai dengan pelabelan;
- (e) memantau dan merawat benih dan mata tempel yang unggul dan siap jual;
- (f) melaksanakan pemasaran benih dan mata tempel yang berlabel;
- (g) pemeliharaan dan pengembangan alat-alat mesin;
- (h) melaksanakan inventarisasi dan registrasi terhadap tanaman pokok induk sumber bibit yang dimiliki penangkar, balai benih dan petani dalam rangka menghasilkan sumber bibit yang bermutu;
- (i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai, pada Pasal 36; Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya SKPD

a) Sumber Daya Aparatur SKPD

Sumber daya aparatur mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai secara terus - menerus (berkesinambungan) melakukan pembinaan/ pelatihan/ pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dimilikinya. Pada awal Tahun 2016 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai memiliki aparatur yang terdiri dari:

❖ Pejabat Eselon II/b	: 1 Orang
❖ Pejabat Eselon III/a	: 1 Orang
❖ Pejabat Eselon III/b	: 6 Orang
❖ Pejabat Eselon IV/a	: 22 Orang
❖ Pejabat Eselon IV/a	: 1 Jabatan Kosong (Pensiun)
❖ JFU	: 46 Orang
❖ JFT	: 28 Orang

Komposisi sumber daya aparatur tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pendidikan yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016

No.	Pendidikan	Aparatur Sipil Negara (ASN)
1.	S-2	4 Orang
2.	S-1 / D-IV	76 Orang
3.	D-III	6 Orang
4.	SLTA	17 Orang
5.	SLTP	- Orang
6.	SD	1 Orang
Jumlah		104 Orang

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

b) Anggaran Belanja Langsung dari APBD SKPD

Selama tahun 2011 hingga tahun 2015, alokasi Anggaran Belanja Langsung dari APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai memperlihatkan pola kurva dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan tertinggi. Anggaran Belanja Langsung dari APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tercatat sebesar Rp 3,09 milyar pada tahun 2011, kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2013 yang mencapai Rp 11,19 milyar dan kemudian terus menurun hingga tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 5,90 milyar.

Tabel 2. Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2011-2015

No.	Bidang	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
1	Sekretariat	Rp 1,481,398,950	Rp 3,556,688,041	Rp 5,939,132,850	Rp 4,733,338,850	Rp 157,377,000	Rp 17,605,275,881
2	Bidang Sarana dan Prasarana					Rp 437,923,000	
3	Bidang Penyuluhan					Rp 255,256,290	
4	Bidang Ketahanan Pangan					Rp 377,280,900	
5	Bidang Pertanian					Rp 666,880,000	
6	UPTD Perbenihan dan Mata Tempel						
7	Bidang Perikanan	Rp 1,464,326,400	Rp 1,958,466,590	Rp 4,072,915,420	Rp 1,845,991,800	Rp 3,391,114,850	Rp 12,732,815,060
8	UPTD Balai Benih Ikan						
9	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 146,000,300	Rp 525,013,976	Rp 1,184,593,700	Rp 140,120,100	Rp 615,954,500	Rp 2,611,682,576
Total		Rp 3,091,725,650	Rp 6,040,168,607	Rp 11,196,641,970	Rp 6,719,450,750	Rp 5,901,786,540	Rp 32,949,773,517

Sumber: LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai 2011-2015

Bila diakumulasikan selama periode 2011-2015, total Anggaran Belanja Langsung dari APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sekitar Rp 32,95 milyar. Anggaran terbesar adalah untuk mendukung program pembangunan pertanian Kota Binjai pada Bidang Pertanian, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Penyuluhan, Bidang Ketahanan Pangan, Sekretariat, serta UPTD Perbenihan dan Mata Tempel (53,43 %), disusul dengan program pembangunan perikanan Kota Binjai pada Bidang Perikanan (38,64 %) dan program pembangunan peternakan Kota Binjai pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (7,93 %).

c) Pengembangan Kapasitas Institusi SKPD

Dalam rangka mendukung tercapainya Lima Sasaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tahun 2011-2015, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai telah melakukan penataan manajemen pembangunan dan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Secara garis besar pengembangan kapasitas institusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai telah dilakukan melalui: (1) pelayanan administrasi perkantoran; (2) peningkatan sarana dan prasarana aparatur; (3) peningkatan disiplin; dan (4) peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Disamping itu melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan identifikasi kesenjangan kapasitas institusi seluruh unit kerja serta pengembangan kompetensi aparatur untuk dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan dan mengkoordinasikan pembinaan pembangunan di sektor ketahanan pangan dan pertanian. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

Salah satu kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian 2011-2015 yang telah berhasil dilakukan adalah peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai capaian akuntabilitas kinerja institusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Kondisi tersebut telah dicapai melalui: (1) pelayanan administrasi perkantoran; (2) peningkatan sarana dan prasarana aparatur; (3) peningkatan disiplin aparatur.

Dalam rangka pelaksanaan urusan ketahanan pangan sebagai urusan wajib di daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai melalui Bidang

Ketahanan Pangan telah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kota Binjai. Namun demikian dalam operasionalnya SPM Bidang Ketahanan Pangan belum dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan pertanian Kota Binjai, karena rumusan indikator yang dituangkan merupakan *outcome* yang untuk mengoperasionalkannya membutuhkan bimbingan teknis kepada aparatur sipil dibawahnya untuk memahami konsep dan definisi ketahanan pangan.

Penataan kelembagaan juga telah dilakukan terhadap kelembagaan yang bersifat non struktural di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai seperti Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Binjai. Kelembagaan ini berfungsi untuk melaksanakan tugas spesifik atau tugas penunjang dari unit struktural yang secara tidak langsung telah mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Secara umum upaya yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam penataan kelembagaan adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :

d) Pembangunan Sumberdaya Insani Pelaku Agribisnis

Ditinjau dari peranannya dalam sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan serapan tenaga kerja, sumbangan PDRB Kota Binjai sektor pertanian rata-rata sekitar 4,44% tiap tahunnya, dengan menanggung lebih dari 7,03 % tenaga kerja tiap tahun dapat dikatakan memiliki peranan yang tidak proporsional (lihat Tabel 1 dan Tabel 2). Rendahnya sumbangan PDRB ini antara lain dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian yang menyebabkan lambatnya adopsi berbagai teknologi tepat guna dan minimnya pemanfaatan peluang-peluang untuk meningkatkan produktivitas.

Tabel 3. Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Kota Binjai 2010-2014

Keterangan	Tahun					Rerata
	2010	2011	2012	2013	2014	
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Pada Lapangan Pekerjaan Pertanian <i>(dalam orang)</i>	10,200	7,671	7,648	5,630	5,714	
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja <i>(dalam orang)</i>	108,513	104,658	97,179	103,682	111,172	
Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap Total Tenaga Kerja Kota Binjai	9.40%	7.33%	7.87%	5.43%	5.14%	7.03%

Sumber : Diolah dari BPS Kota Binjai

Tabel 4. Jumlah Kelompok Tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air di Kota Binjai Tahun 2014

Klasifikasi Kelompok Tani	Jumlah (<i>kelompok</i>)
Pemula	183
Lanjutan	71
Madya	16
Utama	45
Jumlah Poktan Seluruh Tingkatan	315
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	63

Sumber : Laporan Tahunan Distansu 2014

Penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian Kota Binjai yang lebih rendah daripada sektor industri dan perdagangan menjadi faktor utama penyebab sektor pertanian kurang diminati. Generasi muda Kota Binjai lebih tertarik pada sektor industri dan perdagangan yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti. Hal ini secara tidak langsung merupakan gambaran pemulihan sebagian petani yang tidak menghendaki generasi penerusnya untuk menjadi petani juga. Kondisi ini diperparah dengan besarnya konversi lahan pertanian yang dapat menyebabkan usaha pertanian tidak mencapai skala ekonomis. Selain itu banyak generasi muda dari rumah tangga petani yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan agribisnis, termasuk dari sisi kemampuan manajerial.

Melaui program dari Kementerian Pertanian, untuk menumbuhkan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian maka dibuka akses kepada para pemuda/pemudi yang merupakan anak petani Kota Binjai yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SLTA untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Medan. Dalam meningkatkan keterampilan petani, telah diijazahi di daerah Kecamatan Binjai Timur untuk dikembangkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai lembaga milik petani yang secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan sumberdaya manusia pertanian dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan. Lembaga pelatihan ini merupakan lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani Kota Binjai secara swadaya baik perorangan maupun kelompok. Selanjutnya, juga dikembangkan pula Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) yang merupakan kegiatan pendidikan moral dan

sosial di dalam masyarakat, serta mempunyai kekuatan dan potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pembangunan pedesaan. LM3 di Kota Binjai dikembangkan pada lembaga-lembaga keagamaan yaitu Pesantren An Nadwa dan Yayasan Pendidikan Islam Al Fityah. Selain itu, dalam bidang peternakan juga dikembangkan Sarjana Membangun Desa (SMD) yang merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan serta pemberdayaan kepada kelompok tani ternak oleh para sarjana peternakan di Kota Binjai. SMD di Kota Binjai dilaksanakan oleh 5 orang sarjana peternakan berlokasi di Kecamatan Binjai Timur, Binjai Barat, dan Binjai Selatan.

e) Pembangunan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Manajemen Sumberdaya Alam Pertanian Kota Binjai

Prasarana dan sarana memiliki peranan yang penting sebagai penggerak pembangunan pertanian. Komponen prasarana dan sarana yang meliputi lahan, air/irigasi, bibit/benih, pupuk, pestisida, alsintan, investasi dan pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama kegiatan usaha tani dan usaha lanjutannya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai melalui kewenangan yang dimilikinya melakukan pengaturan dalam optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana ini dengan menjalankan berbagai regulasi dalam bentuk program dan kegiatan. Selain itu melalui anggaran pembangunan yang ada, telah dilakukan berbagai inisiatif awal untuk peningkatan kapasitas prasarana dan sarana yang ada. Dana pembangunan untuk prasarana dan sarana pertanian merupakan komponen terbesar dari alokasi anggaran untuk Ketahanan Pangan yang dialokasikan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Dinas PU Kota Binjai, dan lainnya.

Pembiayaan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan sarana irigasi sesuai kewenangannya. Sedangkan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai dilakukan perbaikan dan pembangunan irigasi di tingkat usaha tani sekaligus bertindak sebagai fasilitator dan regulator dengan pokok kegiatan mencakup pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan monev kegiatan di seluruh Kecamatan di Kota Binjai.

Secara rinci gambaran pengembangan prasarana dan sarana 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1) Sumber Daya Lahan dan Air

Salah satu masalah utama terkait dengan sumberdaya lahan adalah akurasi data tentang lahan pertanian. Hal ini menjadi perhatian khusus Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, sehingga pada perencanaan awal kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai masalah perbaikan akurasi data lahan ini menjadi salah satu prioritas utama. Selama tahun 2010-2015 perbaikan dan penyempurnaan data lahan, salah satunya diupayakan melalui kegiatan statistik lahan dengan menghitung sebaran luas dan jenis lahan sawah setiap kecamatan di Kota Binjai melalui update pengisian Statistik Pertanian (SP) Lahan oleh para penyuluh. Hasil dari kegiatan statistik lahan untuk lahan sawah terlihat di Tabel 17.

Tabel 5. Luas Lahan Sawah Kota Binjai Tahun 2010-2015

Lahan Pertanian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata Pertumbuhan
Luas Lahan Sawah (ha)	2,291	2,212	1,753	1,773	1,772	1,758	-4.78%

Sumber : Statistik Lahan Pertanian-Kementan

Selama tahun 2010-2015, di Kota Binjai telah terjadi pengurangan areal persawahan seluas 533 hektar. Bila dilihat kecenderungan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang diperkirakan sekitar 4,78 %/tahun. Upaya pencetakan areal pertanian baru banyak mengalami hambatan di lapang, terutama sulitnya mendapatkan areal yang siap untuk dicetak sebagai areal pertanian baru.

Dari sisi regulasi, upaya pengendalian alih fungsi lahan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam implementasinya belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk memantapkan upaya pelaksanaan undang-undang di atas selama lima tahun terakhir sudah berhasil diterbitkan berbagai peraturan dan ketentuan lanjutan, diantaranya dengan terbitnya turunan Undang-Undang Nomor 41 / 2009, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ikut dilibatkan dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Binjai demi upaya menindaklanjuti pelaksanaan Perda tersebut di Kota Binjai. Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Binjai mendukung sertifikasi lahan, agar petani mendapat kepastian hukum terhadap lahan yang diusahakannya serta dapat membantunya untuk mengakses fasilitas pembiayaan seperti bank, juga diinisiasi dalam bentuk program pra dan pasca sertifikasi lahan.

Kebijakan optimasi lahan di Kota Binjai dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat petani/peternak pada lahan terlantar dan lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan Indeks Pertanamannya. Kebijakan peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan dilaksanakan melalui pengembangan pertanian ramah lingkungan yang dikenal dengan *System of Rice Intensification* (SRI). Pengembangan jalan usaha tani juga telah berhasil dilaksanakan di Kota Binjai.

Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan melalui pengembangan sumberdaya air, pengembangan jaringan irigasi, pembangunan embung dan dam parit serta pengembangan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dalam pengembangan jaringan irigasi, selama tahun 2010-2015 alokasi anggarannya terbagi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Sejalan dengan semangat Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air bahwa pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Walaupun secara ketentuan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab para petani/P3A, namun kenyataannya tidak semua petani/P3A mampu untuk memperbaikinya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Binjai melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai membantu untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak. Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai melakukan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 646 hektar.

Pengembangan pengelolaan air di tingkat petani melalui Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Selama tahun 2011-2015 telah dilakukan pengembangan kelembagaan P3A di Kota Binjai sebanyak 63 unit.

2) Pupuk, Alsintan, dan Pembiayaan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai pelaku pendampingan di dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk berperan penting di dalam: (1) mengatur/ mengelola pemanfaatan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi; (2) pengawalan dan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke tingkat petani/ kelompok tani. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014 adalah 58,84 %.

Pengembangan alat dan mesin pertanian dikembangkan melalui pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Pengembangan dengan pendekatan UPJA ini diharapkan akan membantu peredaran alat dan mesin pertanian di masyarakat.

Dari sisi pembiayaan kegiatan usaha tani dan usaha lanjutannya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai melalui program dari Kementerian Pertanian memfokuskan kegiatannya pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Pelaksanaan PUAP Kota Binjai melanjutkan apa yang telah dirintis sejak tahun 2009 dan dilaksanakan di 5 kelurahan sehingga ditargetkan beberapa kelurahan lainnya yang berbasis kegiatan pertanian telah dapat dilayani oleh PUAP. Selama tahun 2010-2012 telah dikembangkan kegiatan PUAP di 18 kelurahan di Kota Binjai. Gapoktan penerima PUAP diharapkan dapat berkembang dan pada tahun kedua gapoktan mendapat Lembaga Kredit Madiri Agribisnis (LKMA).

Inisiatif lainnya dalam membantu pembiayaan usahatani adalah melalui subsidi bunga kredit melalui berbagai program. Selain itu ke depan perlu diupayakan menyambungkan petani dengan beragam sumber pembiayaan lainnya seperti dana tanggung jawab sosial BUMD dan perusahaan swasta.

3) Perbenihan

Penggunaan benih unggul bermutu selain bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman, juga merupakan salah satu upaya guna menekan dan menghindari pertanaman dari gangguan/ serangan hama/ penyakit. Penyediaan benih unggul bermutu tidak hanya dilaksanakan oleh balai-balai benih saja, tetapi juga oleh PT. Shang Hyang Seri (SHS) dan PT. PERTANI serta penangkar-penangkar benih di tingkat petani yang dibina oleh Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Binjai di bawah pengawasan UPT. Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

Penyediaan benih unggul bermutu dalam jumlah yang cukup dengan kualitas baik dan harga terjangkau petani serta tepat waktu akan memperlancar peningkatan produksi tanaman pangan. Animo petani dalam bertanam padi sangat beragam, sehingga beragam pula jenis varietas benih yang digunakan, baik itu dari golongan varietas produksi tinggi maupun produksi sedang atau rendah.

Varietas produksi tinggi yang sangat diminati petani Kota Binjai umumnya adalah dari jenis Ciherang kemudian diikuti varietas IR-64. Kedua varietas ini selain produksinya relatif cukup tinggi, rasanya pun lebih enak dan harga jualnya lebih tinggi, namun varietas ini kurang tahan terhadap serangan bakteri hawar daun yang senantiasa potensial merusak pertanaman padi. Untuk sub-sektor hortikultura, selama ini kebutuhan benih untuk pengembangan usaha agribisnis hortikultura dipenuhi dari produksi dalam negeri (Balai Benih Hortikultura, penangkar benih, produsen benih swasta).

Seperti halnya tanaman padi, benih varietas yang diminati petani palawija juga sangat beragam. Untuk komoditas jagung tahun 2014, varietas yang banyak diusahakan oleh petani Kota Binjai adalah dari jenis Hibrida. Sedangkan untuk komoditas kedelai tahun 2014, varietas yang banyak diusahakan oleh petani Kota Binjai adalah varietas Anjasmoro. Untuk komoditi kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu pada tahun 2014 benih yang ditanam petani Kota Binjai umumnya berasal dari varietas lokal karena biayanya relatif jauh lebih murah.

Kelembagaan perbenihan adalah lembaga yang mendukung pengembangan perbenihan, baik itu dari segi manajemen maupun sebagai praktisi penyedia benihnya antara lain adalah: UPTD. Perbenihan dan Mata Tempel Kota Binjai, penangkar, produsen dan pedagang benih hortikultura. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang menangani perbenihan hortikultura berperan dalam pembinaan penangkar dan menciptakan penangkar baru yang ada di wilayah tugasnya.

Penataan dan pemberdayaan kelembagaan perbenihan hortikultura akan berdampak terhadap perwujudan industri perbenihan untuk menghasilkan benih

bermutu dari varietas unggul secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pengelolaan atau penataan komponen-komponen prasarana dan sarana pendukung secara harmonis. Komponen-komponen dimaksud meliputi seluruh unsur yang tergabung dalam sistem perbenihan yang mencakup kegiatan pemuliaan dan pengembangan varietas, produksi dan prosesing benih, penyimpanan, pengawasan mutu dan sertifikasi benih, distribusi dan pemasaran, promosi dan sosialisasi penggunaan benih bermutu kepada petani/konsumen.

Secara umum, kondisi kelembagaan perbenihan yang ada sekarang belum dapat dikategorikan sebagai lembaga industri perbenihan yang ideal dan membutuhkan suatu penanganan khusus agar mampu beroperasi secara profesional, baik yang dikelola oleh perorangan, usaha kelompok, maupun kelembagaan perbenihan pemerintah.

Beberapa permasalahan dalam pengembangan sistem perbenihan hortikultura antara lain : a) terbatasnya varietas yang diminati dan selera pasar yang cepat berubah; perubahan permintaan pasar yang sangat cepat menyebabkan sering terjadinya pelaku usaha tanaman mendatangkan benih dari luar negeri yang jenis maupun varietasnya disukai masyarakat; b) lemahnya penguasaan teknologi produksi; khususnya petani/penangkar benih yang memproduksi benih untuk kebutuhan sendiri belum menguasai teknologi yang spesifik bagi masing-masing jenis tanaman, c) terbatasnya sarana produksi benih; d) lemahnya permodalan penangkar benih, dan e) keterbatasan kemampuan dan petugas perbenihan yang mengelola sistem informasi manajemen perbenihan, sehingga informasi/data tidak dapat tersedia setiap saat, serta f) belum optimalnya *software* perbenihan hortikultura serta keterbatasan *hardware* perbenihan hortikultura, baik di UPTD. Perbenihan dan Mata Tempel Kota Binjai maupun gapoktan/kelompok tani.

Beberapa solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut antara lain a) pertemuan koordinasi antar pusat, daerah dan instansi terkait yang menangani perbenihan sangat dibutuhkan dalam rangka penyediaan benih sesuai kebutuhan benih dalam pengembangan kawasan, b) pembinaan penangkar-penangkar benih buah masih sangat diperlukan, dalam rangkaantisipasi jumlah SDM yang masih terbatas dan peningkatan penerapan teknologi produksi benih, c) distribusi benih sumber tanaman buah sangat diperlukan guna merangsang penumbuhan

penangkar benih tanaman buah dan mengoptimalkan peran UPTD. Perbenihan dan Mata Tempel Kota Binjai dalam penyediaan sumber mata tempel untuk perbanyak benih berikutnya serta sebagai pohon koleksi, d) meningkatkan pemanfaatan kegiatan pengembangan perbenihan dalam mendukung penyediaan benih hortikultura bermutu seperti pemberdayaan kelembagaan perbenihan, perbaikan sistim informasi *supply/ demand* benih, fasilitasi akses modal untuk mendukung pengembangan perbenihan, penumbuhan penangkar di sentra-sentra produksi, pemberdayaan stakeholder perbenihan untuk menciptakan varietas yang berdaya saing dengan teknologi produksi dan pilot proyek penangkaran benih bermutu.

Untuk sub-sektor peternakan, kegiatan perbenihan sub-sektor peternakan yang utama adalah menghasilkan benih ternak berupa semen beku sapi dan embrio sapi serta bibit hijauan makanan ternak unggul yang didistribusikan ke masyarakat. Sedangkan UPTD. Balai Benih Ikan Kota Binjai melakukan kegiatan perbenihan sektor perikanan yang utama adalah menghasilkan benih ikan berkualitas yang didistribusikan ke masyarakat Kota Binjai.

Untuk sektor perikanan, telah dibangun sistem usaha perbenihan yang berbentuk kelembagaan usaha perbenihan baik berupa Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) yang memproduksi benih ikan air tawar seperti lele, gurame, nila, dan ikan mas. Produksi benih ini merupakan benih yang berkualitas. Untuk menjamin kualitas sumber benih perikanan, ke depan secara operasional dilakukan oleh UPTD Balai Benih Ikan Kota Binjai untuk mengawasi dan menguji mutu benih di seluruh Kota Binjai.

f) Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kota Binjai

Pengolahan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian. Dalam periode selanjutnya ke depan perlu dilakukan fasilitasi pengolahan diantaranya (1) revitalisasi penggilingan padi, (2) pengolahan tepung berbasis bahan baku lokal yang menghasilkan tepung cassava, tapioka, sagu dan ubi jalar, (3) pengolahan kelapa menjadi *virgin coconut oil* (VCO), minyak goreng, ataupun produk sampingnya seperti *nata de coco*, asap cair, sabut dan arang aktif/briket, dan (6) pengolahan susu untuk diolah menjadi susu pasteurisasi, yoghurt, keju, es krim, kerupuk susu, steak susu, sabun susu, permen/ karamel susu dan dodol susu.

Dalam rangka meningkatkan mutu hasil pertanian, maka beberapa langkah ke depan yang hendaknya dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penerapan Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan terbagi dalam : (a) organik, dimana selama pada periode ke depan hendaknya dilakukan pembinaan sistem pertanian organik kepada pelaku usaha/ poktan/ gapoktan dan sertifikasi organik kepada pelaku usaha/poktan/gapoktan. (b) pembinaan penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan kepada pelaku usaha/ poktan/ gapoktan.
- 2) Pengawasan jaminan mutu di rantai produksi dan distribusi.
- 3) Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP).
- 4) Mengembangkan produk pertanian ramah lingkungan.
- 5) Meningkatkan keamanan pangan.

Sedangkan dalam hal membangun jejaring pasar ada beberapa langkah ke depan yang hendaknya dilaksanakan dalam membangun jejaring pasar diantaranya adalah :

- 1) Meningkatkan akses petani terhadap pasar. Hal-hal tersebut antara lain bersinergi dengan pemerintah pusat melaksanakan kebijakan harga dan tata niaga bagi komoditas strategis, pengembangan pasar dan promosi komoditas unggulan yang prospektif, penyediaan sarana dan pengembangan kelembagaan pasar, pengembangan kerjasama dan kemitraan, dukungan analisis dan informasi pasar yang memberikan nilai tambah bagi pelaku yang berbasis pada teknologi informasi yang semakin maju.
- 2) Mengembangkan jejaring pasar, melalui pengembangan sarana dan kelembagaan pasar yaitu: sub terminal agribisnis, pasar tani, pasar ternak, pasar ikan, unit pemasaran poktan/ gapoktan, dan pasar lelang. Selain itu dilakukan pemantauan dan stabilisasi harga, advokasi dan penguatan akses pasar dan pelayanan informasi pasar.
- 3) Pengembangan Informasi Pasar melalui sistem informasi pemasaran yang cepat, tepat, akurat, lengkap, kontinyu dan *up to date* merupakan instrumen yang vital serta memegang peranan yang amat penting bagi para pelaku agribisnis.

- 4) Promosi tingkat provinsi, melalui pameran pada umumnya diikuti juga dengan berbagai kegiatan lainnya seperti talkshow, temu bisnis (*buyer meet seller*) dan sosialisasi manfaat produk.
- 5) Mengembangkan jejaring pasar nasional, dimaksudkan untuk melakukan percepatan pertumbuhan nilai perdagangan, baik dalam bentuk segar maupun olahan sehingga mendorong pertumbuhan surplus neraca perdagangan produk pertanian antara lain melalui kebijakan pencitraan produk yang lebih baik, meningkatkan akses pasar, dan perlindungan produk Kota Binjai dari dampak persaingan.

g) Penyediaan Pangan Masyarakat Kota Binjai

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKPG) tahun 2013 merekomendasikan kriteria kecukupan pangan bagi rata-rata penduduk Indonesia yaitu kebutuhan kalori minimal 2.150 kkal perkapita/tahun, kebutuhan protein minimal 57 gram perkapita/tahun pada tingkat konsumsi. Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan 2015, pada sisi konsumsi energi di Kota Binjai, capaiannya adalah 2.087 kkal per kapita per hari atau sedikit di bawah rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Konsumsi protein diatas rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu mencapai 64,8 gram/kapita/hari.

Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan 2015, rata-rata konsumsi beras pada tahun 2015 di Kota Binjai sebesar 121 kg/kapita/tahun. Konsumsi beras pada tahun 2015 masih cukup tinggi dibandingkan nasional. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan kebijakan diversifikasi pangan melalui berbagai promosi seperti *One Day No Rice* dan pengembangan konsumsi pangan pokok lokal di Kota Binjai.

Untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, aktif dan produktif, masyarakat harus mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Para ahli gizi menyarankan kriteria pola pangan yang ideal bagi manusia

Indonesia yaitu skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 100. Konsumsi pangan ideal adalah jika proporsi jumlah asupan karbohidrat dari sereal (termasuk gandum) maksimum 50 %.

Target skor PPH Indonesia pada tahun 2015 sesuai dengan Perpres 22 tahun 2009 sebesar 95. Capaian skor PPH Kota Binjai pada tahun 2015 sebesar 85. Ini menunjukkan bahwa capaian diversifikasi konsumsi pangan masyarakat belum mencapai sasaran yang diharapkan (PPH = 91,5 pada tahun 2013). Belum tercapainya sasaran tersebut diduga akibat tingginya konsumsi padi-padian, minyak, dan lemak. Selain itu juga disebabkan masih rendahnya konsumsi sayur, buah, umbi-umbian, pangan hewani, dan kacang-kacangan.

Stabilitas harga pangan pokok merupakan salah satu indikator ketahanan pangan tahun 2010-2015 yang dicirikan dengan koefisien variasi (CV) tidak melebihi target CV masing-masing komoditas. Selama periode tahun 2010-2015, perkembangan harga pangan pokok secara umum stabil dengan CV tidak melebihi target. Pangan pokok tersebut meliputi komoditas beras, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng curah, gula, terigu, kedelai, dan telur ayam. Hal ini menunjukkan stabilitas harga pangan pada tingkat konsumen, meskipun harga-harga tersebut stabil pada kisaran harga yang cukup tinggi.

Namun demikian untuk komoditas cabe merah dan bawang merah cenderung mengalami gejolak harga yang ditunjukkan dengan CV lebih besar dari 10 %. Gejolak ini diakibatkan oleh keterbatasan pasokan barang karena perubahan iklim. Perubahan iklim ini mengakibatkan sejumlah sentra produksi mengalami kegagalan panen.

h) Pertanian dalam Jasa Lingkungan Kota Binjai

Pertanian menyumbangkan beberapa bentuk jasa lingkungan, antara lain mengatur tata air dan mengendalikan banjir pada suatu daerah aliran sungai (DAS), menjaga keberadaan sumberdaya air, mengendalikan erosi, mengendalikan longsor, mempertahankan suhu udara, mendaur-ulang limbah, menjaga kualitas (purifikasi) udara dan memitigasi perubahan iklim. Nilai dari masing-masing jasa lingkungan yang dapat dihasilkan oleh sektor pertanian ditentukan oleh sistem penggunaan dan pengelolaan lahan. Berbagai praktek pertanian bisa menghasilkan jasa lingkungan dan multifungsi yang negatif (*negative externalities*), namun sistem pertanian yang dikelola secara berkelanjutan akan memberikan *positive externalities*. Sistem

pertanian berbasis pohon, terutama sistem multistrata seperti *agroforestry*, cenderung memberikan berbagai jasa lingkungan yang positif. Sebaliknya sistem pertanian lahan kering berbasis tanaman semusim yang dikelola secara intensif di lahan berlereng curam, cenderung memberikan berbagai eksternalitas yang negatif. Sistem sawah memberikan berbagai jasa lingkungan terutama dalam hal mengatur tata air, menurunkan suhu udara mikro dan menurunkan bahaya erosi. Peternakan yang dikelola dengan baik akan memberikan berbagai jasa lingkungan terutama dalam hal sumber bahan organik dan hara untuk tanaman serta sumber bioenergi (CH₄).

Tabel 6. Jasa Lingkungan Sub-Sektor Pertanian Kota Binjai dan Strategi Peningkatan Nilai Positif Jasa Lingkungan

Sub-Sektor Pertanian	Jasa Lingkungan Positif	Jasa Lingkungan Negatif	Strategi Peningkatan Nilai Positif Jasa Lingkungan
Tanaman Pangan			
Sawah	Mengatur tata air, mengurangi erosi, mempertahankan biodiversitas fauna dan flora akuatik	• Pencemaran oleh residu bahan agrokimia pestisida • Konsumsi air yang tinggi • Emisi metana	• Pengendalian konversi lahan sawah • Efisiensi penggunaan bahan agrokimia dan pemupukan berimbang • Irigasi macak-macak dan berselang (<i>intermittent</i>) • Mendaur ulang jerami/ sisa tanaman
Ladang (pada lahan berlereng curam)	-	Sumber erosi dan sedimentasi	• Penerapan inovasi teknologi konservasi dan <i>agroforestry</i> • Mendaur ulang sisa tanaman
Hortikultura			
Tanaman pohon-pohonan	• Mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan CO₂ yang relatif tinggi • Meningkatkan daya infiltrasi tanah dan mengurangi risiko erosi dan tanah longsor	• Mempunyai biodiversitas yang rendah bila dalam bentuk monokultur	• Memperbanyak keberadaan sistem pertanian berbasis pohon-pohonan melalui rehabilitasi lahan terlantar menjadi sistem pertanian berbasis pohon • Meningkatkan biodiversitas melalui sistem multistrata/ <i>agroforestry</i>
Tanaman semusim (<i>annual</i>) dan dua musim (<i>biennial</i>)	-	• Sumber erosi dan sedimentasi • Pencemaran oleh residu bahan agrokimia	• Penerapan inovasi teknologi konservasi tanah dan <i>agroforestry</i> • Mendaur ulang sisa tanaman • Peningkatan efisiensi pemupukan dan penggunaan pestisida
Peternakan	• Sumber bahan organik dan hara untuk tanaman • Sumber bioenergi (CH₄)	Sumber emisi metana (CH ₄) dari sistem pencernaan (<i>enteric fermentation</i>) dan kotoran hewan serta emisi nitrous oksida (N ₂ O) dari kotoran hewan ternak	• Digestasi kotoran hewan untuk menghasilkan CH₄ sebagai biogas • Peningkatan penggunaan kotoran hewan untuk pupuk

Ada dua pendekatan ke depan hendaknya ditempuh oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk meningkatkan jasa lingkungan pertanian:

- 1) Pendekatan hukum, dimana pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan insentif praktek pertanian yang memberikan fungsi lingkungan positif dan disinsentif untuk praktek pertanian yang berdampak negatif terhadap fungsi

lingkungan. Pendekatan hukum juga diberlakukan terhadap sektor di luar pertanian yang aktivitasnya mengurangi atau menghilangkan kemampuan sektor pertanian dalam menghasilkan jasa lingkungan, seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan peraturan ini, hendaknya ke depan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dapat menginisiasi agar dapat dibuat peraturan sejenis di Kota Binjai dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai.

- 2) Insentif finansial dan bantuan teknis untuk mengembangkan sistem pertanian yang memberikan peningkatan nilai ekonomi dan sekaligus jasa lingkungan.

Kedua pendekatan ini hendaknya dapat ditempuh secara simultan. Mengingat sektor pertanian semakin dihadapkan kepada tantangan lokal dan global yang semakin serius, maka pemilihan inovasi teknologi diarahkan untuk sistem penggunaan dan pengelolaan lahan yang dapat meningkatkan daya adaptabilitas dan ketangguhan sistem tersebut dan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan jasa lingkungan yang lebih tinggi.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

a) Produksi Tanaman Pangan Kota Binjai

Produksi tanaman padi Kota Binjai periode tahun 2010-2015 menurun rata-rata sebesar -4,94 %/tahun. Namun, produksi jagung meningkat rata-rata yaitu sekitar 10,12 %/tahun dan produksi kedelai meningkat walaupun dengan tingkat yang sangat rendah yaitu rata-rata sebesar 0,31 %/tahun.

Tabel 7. Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Komoditas Padi, Jagung, Kedelai Kota Binjai Tahun 2010-2015

Komoditas	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata Pertumbuhan
Padi	Produksi (ton)	25,239	24,992	25,809	24,280	16,961.40	18,500	-4.94 %
	Luas Panen (ha)	4,145	4,230	4,225	4,113	2,637	2,856	-5.66 %
	Produktivitas (kw/ha)	60.89	59.08	61.09	59.03	64.32	64.78	1.35 %
Jagung	Produksi (ton)	4,473	5,906	6,268	6,138	6,236	7,042	10.12 %
	Luas Panen (ha)	719	946	1,006	981	952	1,045	8.45 %
	Produktivitas (kw/ha)	62.21	62.43	62.31	62.57	65.50	67.39	1.63 %
Kedelai	Produksi (ton)	158.10	227.00	45	38.00	92.80	8.80	0.31 %
	Luas Panen (ha)	155	223	40	34	116	11	19.49 %
	Produktivitas (kw/ha)	10.20	10.18	11.25	11.18	8.00	8.00	-3.75 %

Sumber: ATAP 2010-2014 dan ASEM 2015

Pemicu penurunan produksi padi Kota Binjai diantaranya karena penurunan luas panen seluas 1.289 ha. Namun, justru ada perkembangan yang positif dari peningkatan produktivitas padi yaitu sebesar 3,89 kw/ha. Peningkatan produksi jagung Kota Binjai terjadi karena adanya peningkatan luas panen mengalami peningkatan sekitar 8,45 %/tahun dan peningkatan produktivitas sekitar 1,63 %/tahun. Sedangkan produksi dan luas panen kedelai Kota Binjai mengalami fluktuasi yang tajam dengan penurunan sebesar 149 ton dan seluas 144 ha. Pertumbuhan produktivitas kedelai mengalami penurunan yaitu rata-rata sebesar -3,75 %/tahun.

b) Produksi Palawija Berupa Komoditas Ubi Kota Binjai

Komoditas palawija yang prospektif untuk dikembangkan lebih serius sebagai bahan baku bioindustri adalah ubi kayu dan ubi jalar. Komoditas ubi ini mempunyai beragam produk turunan dan sangat prospektif untuk pengembangan bioindustri berkelanjutan. Produksi komoditas ubi kayu dan ubi jalar Kota Binjai periode tahun 2010-2015 meningkat masing-masing sebesar 4,48 %/tahun dan 4,48 %/tahun.

**Tabel 8. Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas
Palawija Berupa Komoditas Ubi Kota Binjai Tahun 2010-2015**

Komoditas		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata Pertumbuhan
Ubi Kayu	Produksi (ton)	3,111	1,440	1,750	1,577	2,583.00	2,600	4.48 %
	Luas Panen (ha)	214	99	125	111	98	100	-9.67 %
	Produktivitas (kw/ha)	145.37	145.45	140.00	142.07	263.57	260.00	16.39 %
Ubi Jalar	Produksi (ton)	926	915	649	507	1,027	756	4.81 %
	Luas Panen (ha)	84	82	59	36	58	42	-7.18 %
	Produktivitas (kw/ha)	110.24	111.59	110.00	140.83	177.07	180.00	11.04 %

Sumber: ATAP 2010-2014 dan ASEM 2015

Pemicu peningkatan produksi ubi kayu dan ubi jalar Kota Binjai diantaranya karena peningkatan produktivitasnya masing-masing sebesar 16,39 %/tahun dan 11,04 %/tahun. Namun, terdapat perkembangan penurunan luas panen ubi kayu dan ubi jalar Kota Binjai yaitu masing-masing sebesar -9,67 %/tahun dan -7,18 %/tahun.

c) Produksi Hortikultura Kota Binjai

Produksi komoditas unggulan, penting, dan prospektif hortikultura di Kota Binjai selama kurun waktu 2010-2015 menunjukkan pola yang fluktuatif. Hal ini terjadi tidak hanya pada komoditas sayuran, tetapi juga pada kelompok komoditas buah dan florikultura. Selama periode tahun 2010-2015, laju pertumbuhan produksi tertinggi adalah pada komoditas rambutan yaitu sebesar 79,25 %/tahun, disusul jambu air, jahe, dan anggrek masing-masing sebesar 72,31 %, 55,38 %, dan 46,33 %. Sebaliknya laju penurunan pertumbuhan produksi terbesar yaitu pada kunyit, cabe besar, dan jamur yang penurunan pertumbuhannya masing-masing sebesar -5,70 %/tahun, -15,01 %/tahun, dan -79,04 %/tahun.

Tabel 9. Produksi Komoditas Hortikultura Unggulan, Penting, dan Prospektif Kota Binjai Tahun 2010-2015

No.	Komoditas		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata Pertumbuhan	Keterangan
Tanaman Buah-Buahan Tahunan (Frutikultura)										
1	Rambutan	Jumlah pohon (<i>batang</i>)	28,589	27,843	27,303	29,448	30,083	29,820		Komoditas unggulan disebut varietas Brahrang yang terdaftar sejak 21 Januari 1997 melalui SK Menteri Pertanian RI Nomor : 039/Kpts/TP.240/1/1997
		Produksi (<i>ton</i>)	1,287	176	427	518	635	2,515	79.25%	
		Luas Areal (<i>ha</i>)	285.89	278.43	273.03	294.48	300.83	298.20	0.92%	
2	Jambu Air	Jumlah pohon (<i>batang</i>)	2,605	2,564	2,659	14,104	42,246	43,996		Komoditas unggulan disebut varietas Deli Hijau dan Kesuma Merah yang terdaftar sejak 29 Desember 2012 melalui SK Menteri Pertanian RI Nomor : 047/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2013 dan 048/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2013
		Produksi (<i>ton</i>)	76	38	169	181	373	200	72.31%	
		Luas Areal (<i>ha</i>)	2.37	2.33	2.42	12.82	38.41	40.00	127.25%	
Tanaman Buah-Buahan Semusim (Olerikultura)										
3	Bengkuang	Produksi (<i>ton</i>)	1,268	1,355	2,105	4,160	2,961	970	12.75%	Komoditas penting sebab bengkuang di Binjai Selatan terkenal berukuran jumbo dengan rasa manis dan tekstur renyah
		Luas Panen (<i>ha</i>)	90	96	140	208	150	54	1.84%	
Tanaman Sayuran Semusim (Olerikultura)										
4	Cabe Besar	Produksi (<i>ton</i>)	1,490	1,249	1,265	770	549.00	591	-15.01%	Komoditas penting sebab komoditas ini berkontribusi dalam inflasi sehingga perlu dipertimbangkan sebagai prioritas
		Luas Panen (<i>ha</i>)	130	110	124	77	188	167	18.49%	
5	Jamur	Produksi (<i>kuintal</i>)					1.67	0.35	-79.04%	Komoditas prospektif yang sedang dikembangkan
		Luas Panen (<i>m²</i>)					164	19	-88.41%	
Tanaman Hias (Florikultura)										
6	Anggrek	Produksi (<i>tangkai</i>)	1,557	2,692	6,182	2,920	3,333	5,590	46.33%	Komoditas prospektif yang pernah dikembangkan
		Luas Panen (<i>m²</i>)	1,008	2,753	5,812	2,957	3,408	5,740	63.76%	
Tanaman Biofarmaka										
7	Jahe	Produksi (<i>kuintal</i>)	9.85	8.95	9.70	1.56	7.37	6.57	55.38%	Komoditas prospektif merupakan bahan baku industri jamu (bioindustri)
		Luas Panen (<i>m²</i>)	117	68	113	21	61	40	19.79%	
8	Kunyit	Produksi (<i>kuintal</i>)	10.10	3.33	1.22	2.71	1.03	1.46	-5.70%	Komoditas prospektif merupakan bahan baku industri jamu (bioindustri)
		Luas Panen (<i>m²</i>)	180	292	68	93	60	66	-0.64%	
9	Temulawak	Produksi (<i>kuintal</i>)	5.42	3.39	2.65	4.77	1.49	2.80	7.97%	Komoditas prospektif merupakan bahan baku industri jamu (bioindustri)
		Luas Panen (<i>m²</i>)	138	303	209	265	78	84	10.49%	

Sumber: SPH-BST, SPH-TH, SPH-TBF, dan SPH-SBS Kota Binjai 2010-2015

Bila dilihat dari luas panen, maka komoditas hortikultura yang mengalami peningkatan luas panen yang signifikan adalah jambu air, anggrek, jahe, cabe besar, dan temulawak. Sedangkan komoditas bengkuang dan rambutan tidak mengalami

kenaikan luas panen yang signifikan, bahkan luas panen komoditas kunyit dan jamur cenderung menurun.

d) Produksi Peternakan Kota Binjai

Produksi hasil peternakan terdiri dari produksi daging, telur, dan susu. Produksi hasil peternakan Kota Binjai untuk daging dan telur selama tahun 2010-2015 mengalami pertumbuhan dengan tren sedikit meningkat yaitu masing-masing sebesar 2,03 %/tahun dan 11,91 %/tahun. Sedangkan produksi susu Kota Binjai mengalami penurunan sebesar -18,28 %/tahun.

**Tabel 10. Produksi Komoditas Peternakan Kota Binjai
Tahun 2010 – 2015**

No.	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata Pertumbuhan
Daging (ton) :		1.742	1.883	3.566	4.339	2.961	674	2,03%
1	Sapi	799	930	1.248	937	1.309	249	
2	Kerbau	24	19	28	13	68	4	
3	Kambing	34	35	36	37	37	4	
4	Domba	22	23	25	27	37	6	
5	Babi	574	583	623	639	194	143	
6	Kuda	0	0	0	0	0,05	0	
7	Ayam Buras	50	51	86	216	108	33	
8	Ayam Ras Petelur	225	231	753	1.510	690	2	
9	Ayam Ras Pedaging	7	7	703	896	496	206	
10	Itik	7	4	59	40	12	13	
11	Kelinci	0	0	0	0	0	0	
12	Burung Puyuh	0	0	5	15	2	0	
13	Merpati	0	0	0	0	0	0	
14	Itik Manila	0	0	0	9	8	13	
Telur (ton) :		8.448	8.592	9.691	19.555	8.983	8.741	11,91%
15	Ayam Buras	43	44	59	149	74	80	
16	Ayam Ras Petelur	8.363	8.510	9.573	19.181	8.763	8.527	
17	Itik	42	38	59	225	68	57	
18	Burung Puyuh	0	0	0	0	12	26	
19	Itik Manila	0	0	0	0	66	51	
Susu (kg) :		0	0	48.240	65.520	36.000	19.583	-18,28%
20	Sapi Perah	0	0	48.240	65.520	36.000	19.440	
21	Kambing Perah	0	0	0	0	0	143	

Sumber: Pusdatin Kementan 2010-2015

Produksi daging Kota Binjai tahun 2015 mencapai 674 ton. Produksi daging ini sebagian besar yaitu 36,96 % berasal dari daging sapi. Sedangkan daging ayam ras pedaging berkontribusi 30,63 % terhadap total produksi daging Kota Binjai.

Sedangkan produksi telur tahun 2015 mencapai 8.741 ton, yang terdiri dari telur ayam ras petelur (97,55%) dan lainnya berupa telur itik, telur ayam buras, telur itik manila dan telur burung puyuh. Sedangkan produksi susu Kota Binjai tahun 2015 mencapai 19.583 kg. Produksi susu ini masih terkonsentrasi di Kecamatan Binjai Barat.

Tabel 11. Populasi Ternak Kota Binjai Tahun 2010-2015

No.	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata Pertumbuhan
Ternak Ruminansia (ekor) :								
1	Sapi Potong	3,391	5,134	5,904	4,165	5,741	5,772	15.06 %
2	Sapi Perah	130	29	67	91	23	27	6.37 %
3	Kerbau	117	143	157	114	164	228	17.50 %
4	Kambing	4,681	4,792	6,083	5,904	6,026	5,820	5.00 %
5	Domba	6,425	6,585	9,058	19,175	7,731	6,623	15.54 %
Ternak Non Ruminansia (ekor)								
6	Babi	7,619	7,688	11,203	23,582	5,305	4,595	13.25 %
7	Kuda	0	0	0	0	2	2	0.00 %
8	Kelinci	0	0	0	0	907	632	-30.32 %
Ternak Unggas (ekor) :								
9	Ayam Buras	52,000	54,000	72,000	182,000	91,000	97,739	29.47 %
10	Ayam Ras Petelur	933,000	950,000	1,068,000	2,141,000	978,000	951,698	11.54 %
11	Ayam Ras Pedaging	647,000	660,000	856,000	1,091,000	604,000	378,591	-4.56 %
12	Itik	8,000	8,000	12,000	47,000	14,000	11,943	51.35 %
13	Burung Puyuh	9,000	10,000	22,000	67,000	7,000	5,512	44.97 %
14	Merpati	0	0	0	2,000	1,000	948	-27.60 %
15	Itik Manila	0	0	0	0	12,000	10,541	-12.16 %

Sumber: Pusdatin Kementan 2010-2014 dan ATAP Peternakan Kota Binjai 2015

e) Produksi Perikanan Kota Binjai

Produksi perikanan utama Kota Binjai terdiri dari komoditas perikanan air tawar yaitu lele, nila, gurame, dan ikan mas. Produksi perikanan Kota Binjai untuk lele dan gurame selama tahun 2010-2015 mengalami pertumbuhan yang cukup berarti yaitu masing masing sebesar 84,25 %/tahun dan 5,14 %/tahun. Sedangkan produksi nila dan ikan mas di Kota Binjai mengalami penurunan masing-masing sebesar -17,27 %/tahun dan -17,07 %/tahun.

**Tabel 12. Produksi dan Luas Panen Komoditas Perikanan Kota Binjai
Tahun 2010-2015**

Komoditas		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata Pertumbuhan
Lele	Produksi (ton)	402.12	637.37	645.00	3,021.48	3,082.10	2807.96	84.25 %
	Luas Panen (ha)	9.43	9.50	9.55	7.84	7.92	7.92	-3.12 %
	Produksi Benih (ekor)	15,000,000	15,750,000	39,532,500	60,951,500	62,170,530	33,708,000	
Nila	Produksi (ton)	122.83	135.11	138.09	61.30	41.93	37.17	-17.27 %
	Luas Panen (ha)	3.19	3.40	3.40	2.55	2.55	2.55	-3.68 %
	Produksi Benih (ekor)	0	0	58,000	216,000	220,320	911,000	
Gurame	Produksi (ton)	16.45	17.87	18.00	12.51	24.65	12.28	5.14 %
	Luas Panen (ha)	0.93	0.95	0.97	4.00	4.52	4.52	65.93 %
	Produksi Benih (ekor)	20,000	21,000	22,000	61,500	62,730	203,250	
Ikan Mas	Produksi (ton)	14.62	7.68	7.68	2.13	3.90	2.00	-17.07 %
	Luas Panen (ha)	0.88	0.90	0.90	2.00	2.00	2.00	24.90 %
	Produksi Benih (ekor)	0	0	0	0	0	99,500	

Sumber: BPS Kota Binjai 2010-2015

Bila dilihat dari luas panen, maka komoditas perikanan Kota Binjai yang mengalami peningkatan luas panen yang signifikan adalah komoditas gurame dan ikan mas. Sedangkan komoditas lele dan nila justru mengalami sedikit penurunan luas panen.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

a) Pemenuhan Pangan Masyarakat, Bahan Baku Industri dan Energi

Tantangan nasional di masa mendatang adalah bagaimana penyediaan pangan dan energi bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat. Penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 305,65 juta pada tahun 2035, dan apabila dikaitkan dengan adanya perubahan preferensi konsumen maka ketahanan pangan secara nasional akan menjadi suatu tantangan yang nyata. Di lain pihak, ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, intensitas erosi permukaan tanah maupun perluasan industri, perumahan dan sektor-sektor lainnya.

Ketersediaan pangan, energi dan sumber lainnya serta perlindungan dari gangguan iklim dan lingkungan tidak hanya menjadi kepentingan Kota Binjai, tetapi juga menjadi komitmen nasional. Untuk itu, penerapan teknologi tepat guna yang progresif menjadi suatu kewajiban. Produk dan prosedur yang inovatif dalam dunia usaha memberi peluang untuk menghasilkan produksi yang berkelanjutan. Tantangan bagi sektor pertanian adalah bagaimana memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya alam dan

ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi cukup bagi penduduk.

Bahan bakar minyak (BMM) dan bahan bakar gas (BBG) yang berasal dari sumberdaya fosil merupakan hal yang tidak terlepas dari kegiatan kehidupan, yakni sebagai sumber energi penggerak utama transportasi, industri, dan juga pertanian. Pada saat ini bahan bakar berasal dari fosil jumlahnya semakin terbatas. Sejak dieksploitasi mulai abad 20-an diperkirakan sumberdaya fosil akan semakin langka. Dengan terbatasnya ketersediaan energi dan fosil, maka harus dicari sumber energi alternatif lain. Dari hasil penelitian beberapa komoditas pertanian yang dapat diolah menjadi sumber energi, seperti kelapa sawit, jagung, ubi kayu, tebu, kemiri sunan, jarak pagar dan kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi. Apabila sumber energi dari hayati ini atau disebut Bahan Bakar Nabati (BBN) dapat dikembangkan dengan baik, maka ketergantungan terhadap BBM semakin kecil. Di sisi lain dengan berkembangnya permintaan terhadap BBN maka akan memberikan peluang pasar baru bagi produk hasil pertanian para petani.

b) Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan, dan Bencana Alam

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, ekspansi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.

Sejak tahun 1898 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 % per tahun. Dalam 5 tahun terakhir total luas lahan sawah Kota Binjai yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 140 ha terkena banjir dan 243 ha terkena kekeringan. Kondisi ini cenderung akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kecamatan. Disamping itu, inovasi dan teknologi tepat guna sangat penting dan strategis untuk dikembangkan dalam rangka untuk upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Penciptaan atau penggunaan varietas unggul yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran terhadap suhu tinggi maupun rendah, kekeringan, banjir/genangan dan salinitas menjadi sangat penting.

Selain itu, Kota Binjai termasuk wilayah dengan frekuensi bencana alam berupa banjir cukup sering sehingga disebut sebagai wilayah “rawan bencana” di beberapa tempatnya. Kelurahan Pekan Binjai, Kelurahan Binjai, Kelurahan Limau Mungkur, Kelurahan Berngam, Kelurahan Setia, Kelurahan Mencirim dan Kelurahan Rambung Barat merupakan lokasi yang berdekatan dengan Sungai Bingai, Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan selalu mengalami banjir pada periode-periode tertentu akibat curah hujan yang tinggi. Semua bencana alam berupa banjir ataupun kekeringan tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian nasional mulai proses produksi, jalur distribusi, rehabilitasi ekonomi, masa panen, dan menimbulkan trauma bagi masyarakat korban bencana. Karena itu, kemampuan untuk antisipasi bencana alam, penanganan korban bencana, serta kemampuan rehabilitasi ekonomi pasca bencana menjadi penting.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sering terdampak bencana alam paling besar. Bencana alam tersebut berdampak buruk dan mengakibatkan rusaknya infrastruktur pertanian yang meliputi bangunan jaringan irigasi, jalan usaha tani, kerusakan tanaman dan ternak, hingga penurunan produktivitas dan produksi pangan. Naiknya suhu permukaan bumi dan pergeseran pola curah hujan menyebabkan terjadinya pergeseran pola musim yang berdampak pada perubahan pola dan kalender tanam. Cuaca yang tidak menentu sering mengakibatkan petani sulit memperkirakan waktu untuk mengolah lahan dan memanen. Akibat perubahan iklim, beberapa wilayah pertanian di Kota Binjai menghadapi musim hujan yang cenderung mundur dan musim kemarau yang cenderung maju, sehingga musim tanam menjadi pendek. Kondisi ini akan sangat berdampak buruk terhadap intensitas tanam jika tidak ada terobosan inovasi dan teknologi yang mampu memecahkan masalah tersebut. Salah satu inovasi yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian yang patut ke depan diaplikasikan di Kota Binjai adalah varietas unggul berumur genjah dan sangat genjah serta inovasi teknologi pengelolaan tanah, air dan tanaman pendukungnya.

c) Kondisi Perekonomian Regional

Perkembangan regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 menjadikan pergeseran pusat kekuatan ekonomi yang terlihat dari menguatnya peran Asia dalam dekade terakhir. Beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan basis perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai negara *emerging economic* dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya juga mulai menunjukkan kekuatannya sebagai penggerak roda perekonomian regional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju serta besarnya jumlah penduduk yang menjadikannya sebagai modal sosial yang besar maupun pasar yang potensial. Sementara itu, pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di

kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan penerapan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002.

Tujuan akhir MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global. Dengan semakin terbukanya pasar ASEAN bagi para negara anggotanya, tingkat persaingan pun akan semakin tinggi. Di lain pihak, peranan ekspor Indonesia di pasar ekspor ASEAN masih lebih rendah dibandingkan negara Singapura, Thailand dan Malaysia; dimana kontribusi ekspor Indonesia terhadap ekspor negara ASEAN (untuk pasar ASEAN) baru mencapai 14,6 % di tahun 2011, sedangkan Singapura, Thailand dan Malaysia berturut-turut memberikan sumbangan sebesar 44,2 %; 19,4 %; dan 18,8 %.

Jika dilihat dari sisi potensi ekonomi, Indonesia merupakan salah satu *emerging country* yang saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi ASEAN. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,3 persen, dibandingkan dengan Malaysia 5,4 persen, Thailand 5 persen, Singapura 1,2 persen, Filipina 6,6 persen, dan Vietnam 5,7. Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar yakni 247 juta jiwa sebagai pasar potensial dan tenaga kerja.

Prospek Indonesia sebagai negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia setelah China, Jepang dan India, serta terbesar di Asia Tenggara, semakin menjanjikan karena didukung oleh melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang makin kondusif. Dengan masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia akan berkesempatan menggenjot ekspor ke berbagai negara, di sisi lain bila tidak siap, dunia usaha lokal akan tergulung diterpa produk impor, masyarakat ekonomi ASEAN akan membuat pertukaran tenaga kerja, modal dan perdagangan berlangsung terbuka antar negara ASEAN. Dengan karakter

seperti itu, persaingan tidak lagi semata-mata dalam konteks antar negara, tetapi juga antar daerah (region) atau antar kota dan bahkan antar individu.

Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani. Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

Krisis pangan dunia dimulai sejak tahun 2005 ketika negara-negara dunia mulai mengkhawatirkan kelangkaan bahan pangan yang menimbulkan kenaikan harga pangan. Laporan FAO menyebutkan bahwa diperkirakan sekitar 36 negara mengalami peningkatan harga pangan yang cukup tajam berkisar yaitu dari 75 % sampai 200 %. Dalam tiga tahun terakhir, harga pangan dunia telah meningkat dua kali lipat dan disusul dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak mampu mengakses bahan pangan. Krisis pangan dikhawatirkan terjadinya gejolak sosial dan politik bagi negara-negara yang mengalami krisis pangan. Mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, pemerintah Indonesia khususnya juga pemerintah daerah Kota Binjai harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Atas dasar situasi dan pertimbangan di atas, maka peningkatan produksi pangan menjadi jalan keluar mutlak yang tidak bisa ditawar. Pergerakan harga global berdampak terhadap pengeluaran konsumsi dan biaya hidup, terutama terhadap negara berkembang yang cenderung pangsa pengeluaran pangan sangat besar. Kondisi ini harus diantisipasi, bila terjadi gejolak harga pangan kedelai akan mengganggu stabilitas, terutama produsen tahu tempe. Lonjakan harga daging juga meningkatkan inflasi, demikian halnya dengan gejolak harga bawang dan cabai.

d) Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Binjai

Jumlah penduduk Kota Binjai telah mencapai 261.490 jiwa pada tahun 2014. Dari jumlah tersebut, 4,35 % penduduk berada di pedesaan dan 95,65 % penduduk berada di di perkotaan. Sementara kapasitas ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi lahan yang cukup tinggi untuk kebutuhan perumahan dan industri. Untuk itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis dalam rangka menjaga atau mengurangi laju konversi lahan yang terus terjadi.

Sementara itu, generasi muda cenderung meninggalkan pedesaan/pertanian. Sektor pertanian menjadi kurang diminati generasi penerus. Fenomena tersebut dipandang sebagai konsekuensi dari berkembangnya sektor industri dan perdagangan di perkotaan yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional pedesaan. Kondisi ini mengakibatkan transfer tenaga kerja sektor pertanian pedesaan ke sektor industri dan perdagangan di perkotaan. Kondisi ini juga berdampak pada semakin langkanya ketersediaan tenaga kerja muda di pertanian, karena diserap oleh kegiatan industri dan perdagangan di perkotaan. Akibatnya makin dominannya petani berusia tua di pedesaan yang mengusahakan budidaya pertanian. Oleh karena itu tantangan ke depan perlu menciptakan kegiatan pertanian yang lebih diminati oleh generasi muda. Salah satunya adalah pengembangan agroindustri di pedesaan.

e) Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, merupakan tantangan besar, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Sebagian penduduk miskin tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen.

Masalah yang dijumpai dalam mendukung kelancaran distribusi dan akses pangan adalah : (1) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar wilayah, (4) sistem informasi pasar, (5) keterbatasan lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.

Kestabilan pasokan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga yang terjadi. Oleh sebab itu, kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan pangan tersebut.

Dari sudut pandang produsen pangan dan produk pertanian, pemasaran merupakan bagian hilir dari segala upaya yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Dalam pasar dan pemasaran, faktor kualitas, kontinuitas dan kuantitas menjadi faktor kunci. Tantangan ke depan bagi produsen pertanian atau petani adalah bagaimana memproduksi hasil pertanian yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing dari suatu produk pertanian akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk tersebut tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar tersebut akan diisi oleh produk sejenis yang berasal daerah di luar Kota Binjai bahkan berasal dari impor.

2.4.1. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

a) Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem Kota Binjai

Kota Binjai sejak lama dikenal sebagai kota rambutan. Namun beberapa tahun ini, Kota Binjai juga dikenal sebagai kota jambu air. Ini merupakan beberapa contoh keanekaragaman hayati yang dimiliki Kota Binjai. Selain itu terdapat beberapa spesies tanaman semusim (seperti bengkuang) dan ikan air tawar (seperti lemeduk, jurung, paitan, cancan, dongdong, dan baung) ditemukan di kota ini, meskipun luas daratan Kota Binjai hanya 0,12 % dari total luas daratan di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 13. Daftar Varietas Tanaman Buah Unggulan Kota Binjai

No.	Jenis Tanaman Buah	Nama Varietas	No. Terdaftar	Tanggal Terdaftar	Keterangan
1	Rambutan	Brahrang	6.37.3	21 Januari 1997	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 039/Kpts/TP.240/1/1997
2	Bengkuang	<i>Belum Terdaftar</i>	-	-	-
3	Manggis	Idaman	13/PVL/2012	09 Juli 2012	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 039/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2013
4	Jambu Air	Deli Hijau	21/PVL/2012	29 Desember 2012	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 047/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2013
5	Jambu Air	Kesuma Merah	22/PVL/2012	30 Desember 2012	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 048/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2013
6	Alpukat	Idola	114/PVL/2014	03 Maret 2014	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 072/Kpts/SR.120/D.2.7/8/2014
7	Jambu Biji	Bipara	113/PVL/2014	03 Maret 2014	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 073/Kpts/SR.120/D.2.7/8/2014
8	Jambu Air	Jumbo Hijau	115/PVL/2014	03 Maret 2014	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 074/Kpts/SR.120/D.2.7/8/2014

Potensi sumber hayati Kota Binjai berasal dari tumbuhan terdiri dari jenis tanaman penghasil buah dan jenis tanaman berumbi. Keanekaragaman hayati Kota Binjai sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian besar lagi belum teridentifikasi. Keanekaragaman hayati tersebut merupakan tumpuan hidup manusia, karena setiap orang membutuhkannya untuk menopang kehidupan, sebagai sumber pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi dan obat-obatan. Salah satu pemanfaatan keanekaragaman hayati adalah melalui perdagangan tanaman obat dengan nilai perdagangan tanaman obat dan produk berasal dari tumbuhan termasuk suplemen. Selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem.

Kota Binjai juga memiliki sumberdaya biofisik yang cukup beragam untuk mendukung pengembangan pertanian antara lain adalah ketersediaan tanah, hara, dataran, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban udara dan organisme-organisme, serta setidaknya memiliki beberapa ekosistem alami yang berbeda seperti ekosistem agro dan ekosistem sungai. Untuk itu, agar keanekaragaman hayati dan agosistem tidak terancam kelestariannya, maka kita harus arif (bijaksana) dalam memanfaatkannya, dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan aspek kelestariannya.

b) Lahan Pertanian Kota Binjai

Kota Binjai merupakan sebagai salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah mencapai 90,23 km² dan dilalui oleh tiga sungai besar yang menjadi sumber air permukaan yaitu Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan dengan keseluruhan total panjang sungai yang melewati Kota Binjai mencapai 39 km dan luasnya sebesar 345 km². Luasan daerah yang memiliki potensi ketersediaan lahan yang tidak bisa dianggap kecil dan cukup potensial pengembangan sektor pertanian dan perikanan.

Berdasarkan data BPS Kota Binjai 2015, Kota Binjai memiliki luas wilayah 9.023,62 hektar. Dari luas wilayah tersebut, sekitar 4.478,79 hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 657 hektar berada di lahan sawah irigasi, 1.101 hektar di lahan sawah tadah hujan, 1.132 hektar di lahan tegalan/ kebun, 1.533,72 hektar di lahan perkebunan, dan 55,07 hektar di lahan lainnya (kolam, empang, dan lain-lain). Dari luasan lahan potensial tersebut sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk pertanian.

Potensi ketersediaan lahan pertanian di Kota Binjai sangat terbatas dan telah dimanfaatkan secara optimal. Jumlah luasan daratan mendatar, sungai serta curah hujan yang cukup tinggi, sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Sungai, air tanah, dan air permukaan lainnya sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian. Potensi ini apabila dapat dimanfaatkan secara optimal merupakan peluang Kota Binjai untuk menjadi lebih maju dan sejahtera. Potensi sumberdaya ini harus dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk produksi komoditas tanaman pangan dan meningkatkan pendapatan petani.

c) Teknologi Pertanian Kota Binjai

Berkat bantuan dan fasilitasi dari Kementerian Pertanian, maka teknologi pertanian Kota Binjai sendiri cukup berkembang. Dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir. Banyak aplikasi teknologi yang digunakan dalam industri pertanian modern di Kota Binjai guna mengejar hasil yang tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Berbagai inovasi teknologi telah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian yang sebagiannya

kemudian diterapkan di Kota Binjai. Melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di daerah yang menghasilkan teknologi pertanian spesifik lokasi, untuk mendorong sistem dan usaha pertanian yang efisien, dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal. Teknologi tersebut diantaranya adalah pengelolaan sumberdaya air seperti teknologi pemanfaatan air secara efisiensi melalui jaringan irigasi tingkat desa (JIDES) dan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT).

Selain itu, Kementerian pertanian menghasilkan berbagai macam prototipe alat dan mesin pertanian yang bermanfaat bagi petani di Kota Binjai. Prototipe tersebut merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan perekayasaan alsintan, menghasilkan varietas baru, produk lainnya, seperti vaksin, bibit ternak, *tool kit*, peta, dan sebagainya. Teknologi pascapanen diyakini merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas produk hasil panen. Selain itu teknologi pengolahan juga diperlukan sehingga mampu memberikan nilai tambah dan kualitas dari suatu produk pertanian. Demikian pula teknologi yang terkait dengan pemasaran, misalnya teknologi pengemasan, penyimpanan, sortasi dan lainnya yang tentunya menjadi tantangan bagi lembaga penelitian untuk menghasilkan teknologi yang aplikatif.

Berbagai macam paket teknologi tersebut diharapkan tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas aneka produk pertanian. Berbagai varietas, klon dan bangsa ternak berdaya produksi tinggi; teknologi produksi pupuk dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian, masyarakat petani dan swasta, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Bioteknologi dan teknologi untuk pertanian organik merupakan tulang punggung IPTEK yang belum optimal dikembangkan, perlu diperkuat sehingga menghasilkan produk pertanian yang ramah lingkungan. Teknologi informasi yang dikembangkan membuka kesempatan dikembangkannya pertanian cermat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas biologis sistem pertanian baik dalam skala nasional,

regional, perusahaan hingga usaha tani. Hal ini dapat mendukung pengembangan bioproduct yang mempunyai nilai jual lebih baik.

d) Tenaga Kerja Pertanian Kota Binjai

Pada tahun 2014 terdapat sejumlah penduduk Kota Binjai yang tinggal di perdesaan yaitu sebesar 11.374 orang dan mereka cenderung memiliki budaya kerja keras sehingga merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Sampai saat ini, sekitar 5.714 tenaga kerja Kota Binjai masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja tersebut belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk pengembangan pertanian yang berdaya saing.

Apabila keberadaan penduduk di suatu wilayah dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, maka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas pertanian bagi pemenuhan kebutuhan pasar. Peningkatan kapasitas penduduk dalam hal pengetahuan dan keterampilan pertanian dapat juga dilakukan melalui penempatan tenaga kerja pertanian terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya dan penyediaan fasilitas pertanian dalam bentuk faktor produksi, bimbingan teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik.

Sub-sektor tanaman pangan merupakan lapangan usaha yang menyerap bagian terbesar tenaga kerja dan sangat dominan dalam mewarnai struktur ketenagakerjaan sektor pertanian di Kota Binjai. Hampir setengah lebih penduduk di perdesaan bekerja di sub-sektor tanaman pangan.

Selain semakin meningkatnya kebutuhan terhadap produk pangan, juga posisi tanaman pangan saat ini masih dipandang sebagai komoditas strategis, politis, ekonomis sehingga dipandang perlu upaya peningkatan produktivitas tenaga kerjanya. Disamping itu kegiatan-kegiatan yang berorientasi pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan terutama petani terus akan menjadi prioritas, mengingat masih rendahnya kualitas SDM pertanian di Kota Binjai.

Secara kuantitatif tenaga kerja untuk sub-sektor tanaman pangan tersedia di pedesaan, namun ada kecenderungan terus menurun dengan indikasi semakin berkurangnya minat generasi muda di pedesaan untuk bekerja di sub-sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja Kota Binjai yang berusaha di bidang pertanian selama 5 tahun terakhir (2010-2015) diindikasikan menurun sebanyak 4.486 orang. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, tenaga kerja ini masih sangat kurang. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat mengupayakan secara berkelanjutan penyediaan SDM Pertanian yang berkualitas.

e) Pasar Produk Pertanian Kota Binjai

Daya beli masyarakat Kota Binjai yang terus meningkat serta jumlah penduduk Kota Binjai yang terus bertambah merupakan pasar dalam kota yang sangat potensial bagi produk-produk pertanian dan perikanan yang dihasilkan petani Kota Binjai. Berdasarkan data BPS Kota Binjai tahun 2015 jumlah penduduk Kota Binjai tercatat sebesar 261.490 jiwa dengan pertumbuhan 1,53 %/tahun. Saat ini secara nasional, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang saat ini tengah giat dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan di satu sisi, maka dapat terjadi peningkatan permintaan produk termasuk pertanian tanaman pangan di sisi lain. Permintaan pasar domestik, di samping jumlahnya yang semakin meningkat, juga membutuhkan keragaman produk yang bervariasi, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk.

Pertumbuhan kelas menengah yang sangat pesat, menurut data McKinsey Global Institute, saat ini kelas menengah di Indonesia berjumlah 45 juta jiwa dan akan meningkat menjadi 135 juta pada tahun 2030. Hal ini merupakan pasar yang harus kita antisipasi, mengingat ragam permintaannya terhadap produk pertanian semakin besar dan spesifik. Selain itu, semakin penting dengan telah ditetapkannya pasar tunggal ASEAN pada

tahun akhir 2015 (MEA), dimana pasar domestik akan dipenuhi oleh produk negara ASEAN bila tidak mampu menghasilkan produk yang diminta kelas menengah tersebut.

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Kota Binjai juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar nasional ataupun regional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan regional dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Kota Binjai.

Pada tahun 2015, kesepakatan ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN telah terealisasi. Pilar utama dalam MEA adalah mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal yang didukung dengan aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang lebih bebas. Lebih bebas yang dimaksudkan adalah adanya pengurangan hambatan tarif maupun non tarif dalam perdagangan antar negara ASEAN. MEA akan membuka peluang bagi Kota Binjai untuk memperluas pangsa pasar, mendorong daya saing serta berpotensi menyerap tenaga kerja Kota Binjai. Perwujudan MEA telah membentuk ASEAN sebagai pasar terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India, dan Indonesia yang jumlah penduduknya 40 persen dari total jumlah penduduk kawasan menjadikan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang produktif dalam pasar ASEAN.

Penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia termasuk ke Kota Binjai. Kondisi inilah yang cukup mengkhawatirkan karena berpengaruh pada eksistensi produk lokal, peningkatan daya saing produk lokal sangat diperlukan menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 yang sudah berjalan, diantaranya: 1) meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi, 2) menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing, 3) memperluas jaringan pemasaran, serta 4) meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran. Selain itu, rasa nasionalisme Bangsa Indonesia perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Bila perbaikan ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya, maka akan mampu



memberikan peluang bagi industri manufaktur di Kota Binjai untuk memasarkan produknya dan mampu bersaing dengan produk-produk impor baik di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pembangunan Pertanian Kota Binjai periode 2010-2015 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2005-2009). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2016-2021, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan; akses petani terhadap permodalan; kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

a) Lahan Pertanian Kota Binjai

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian terkait dengan lahan adalah sebagai berikut:

1) Konversi Lahan yang Tidak Terkendali

Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian–tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai *real estate*, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan.

Laju konversi lahan sawah Kota Binjai mencapai 533 hektar dalam lima tahun terakhir. Sedangkan kemampuan pemerintah daerah dalam pencetakan sawah baru masih terbatas. Dengan demikian, jumlah lahan yang terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru.

Konversi lahan sawah banyak terjadi di wilayah sentra produksi pangan Kota Binjai yaitu Kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan. Hal ini berdampak pada persoalan ketahanan pangan, mau tidak mau harus didukung oleh lahan yang produktif. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) terutama dalam penyediaan peraturan perlindungan bagi lahan pertanian. Beragam kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk memberikan insentif dan perlindungan, atau melarang konversi lahan pertanian produktif, agar lahan pertanian tidak terus menerus berkurang tanpa terkendali.

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan juga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut.

2) Keterbatasan Dalam Pencetakan Lahan Baru

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai belum bisa mencetak sawah baru setiap tahunnya. Kemampuan cetak sawah oleh pemerintah daerah memang belum bisa mengimbangi laju konversi lahan sawah seluas 107 ha per tahun, terhitung sejak periode tahun 2010-2015. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Untuk mencetak satu hektar sawah sedikitnya dibutuhkan dana sekitar 30 juta rupiah. Selain itu, sangat tergantung dari koordinasi dengan berbagai pihak dan juga adanya berbagai persoalan yang dihadapi dalam merealisasikan, terutama masalah status penguasaan dan kepemilikan lahan.

3) Penurunan Kualitas Lahan

Sebagian lahan pertanian di Kota Binjai diduga sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan sebagian diantaranya termasuk kategori kritis. Hal

ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Disamping itu, produk-produk kimiawi tersebut, selain mengandung bahan yang diperlukan tanaman, dapat juga mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup. Bila kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan kerusakan lahan semakin luas dan berakibat penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

Langkah penanganan untuk mengatasi penurunan kualitas lahan melalui memanfaatkan produk bioteknologi, seperti pupuk dan pestisida hayati yang mengandung mikroba bersifat ramah lingkungan. Penggunaan mikroba sebagai pupuk hayati dapat membantu menyediakan unsur hara yang lengkap bagi tanaman, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah dan juga sangat penting dalam memperbaiki struktur tanah. Sedangkan pemakaian pestisida hayati diharapkan selain dapat menanggulangi serangan hama dan penyakit dan mampu menjaga lingkungan tetap sehat.

4) Rata-Rata Kepemilikan Lahan yang Sempit

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Data Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga pertanian Kota Binjai adalah rumah tangga petani gurem yang berjumlah sekitar 4.928 rumah tangga. Rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Akibat pertumbuhan dan dinamika wilayah perkotaan diperkirakan rata-rata penguasaan lahan oleh petani Kota Binjai akan semakin menyempit pada tahun-tahun mendatang. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani karena penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusaha tani.

5) Ketidakpastian Status Kepemilikan Lahan

Data Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga pertanian Kota Binjai adalah rumah tangga petani gurem yang berjumlah sekitar 4.928 rumah tangga. Rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan

pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum, (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah. Menurunnya rata-rata luas pemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pemilikan lahan terjadi pada agroekosistem persawahan.

Status penguasaan lahan oleh petani Kota Binjai sebagian besar belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru.

Upaya menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

6) Beternak Tidak Mempunyai Lahan

Selama ini usaha peternakan menggunakan lahan kosong di pemukiman atau lahan yang ditanami dengan tanaman pangan maupun perkebunan. Penyebab hal ini karena regulasi seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Binjai yang kurang memberikan ruang untuk peternakan. Akibatnya, sering kawasan peternakan yang mulai maju usahanya terusir untuk kepentingan pemukiman atau usaha yang lain.

Sehubungan hal di atas dan menjamin kebutuhan pangan nasional asal ternak, maka usaha peternakan harus maju dan berkembang. Salah satu syaratnya adalah peternakan harus diberi lahan dengan cara memberi kepastian dalam RTRW untuk ruang peternakan.

b) Infrastruktur Pertanian Kota Binjai

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat menjadi perhatian adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian berakibat sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi,

kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Selain itu, masih terbatasnya jalan usaha tani, jalan produksi, pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, kebun dan kandang penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, tempat informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik komoditas.

Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk dapat menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

Disamping itu, masalah transportasi distribusi ternak belum optimal, yaitu tata niaga daging sapi domestik masih mengandalkan pada pengiriman sapi hidup dan masih memiliki hambatan, sehingga belum efisien. Penyebab inefisiensi diantaranya: belum memadainya jumlah dan kapasitas alat angkut dan minimnya kualitas sarana angkutan yang digunakan. Kondisi buruk lainnya adalah adanya retribusi selama proses pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke daerah tujuan.

c) Sarana Produksi Pertanian Kota Binjai

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya penyediaan benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Benih merupakan sarana penting bagi usaha di bidang pertanian, apabila benih/bibit yang tersedia tidak baik atau palsu maka hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengadaan benih belum sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai dilokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadaluarsa. Kondisi dikarenakan infrastruktur dan sistem perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta

yang mau menanamkan investasi untuk usaha perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah kurang berdaya menangani perbenihan.

Dalam sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Sampai saat ini, benih unggul banyak diimpor seperti: padi hibrida, sayuran dan tanaman hias, serta bibit sapi.

Permasalahan pembibitan sapi potong yang dihadapi saat ini adalah : (1) jumlah bibit ternak belum terpenuhi; (2) kualitas bibit masih rendah; (3) pelaku usaha pembibitan masih kurang respon dalam pembibitan; (4) pengurusan betina produktif akibat pemotongan betina produktif; (5) sumber pembibitan ternak masih menyebar dengan kepemilikan rendah sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan pengumpulan; serta (6) kelembagaan pembibitan belum memadai.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga yang relatif tinggi mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

d) Regulasi Pertanian

Pengembangan sektor pertanian yang bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam saat ini dihadapkan dengan berbagai macam regulasi yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, untuk mencapai sasaran yang diharapkan perlu regulasi dan kelembagaan untuk mensinergikan upaya yang saling mendukung untuk pencapaian sasaran dimaksud. Oleh karena itu, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan pertanian mutlak diperlukan, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Regulasi juga diperlukan untuk melindungi pengembangan komoditas usaha di bidang pertanian. Pengembangan pertanian memerlukan dukungan agar tercipta iklim yang kondusif melalui formulasi kebijakan dan pengamanan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan pemerintah pusat tentu akan berpengaruh di daerah termasuk Kota Binjai. Namun pada kenyataannya, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan belum berjalan efektif dan belum berpihak pada sektor pertanian, seperti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang hanya sedikit di atas biaya produksi, pengendalian harga penjualan (beras) agar tidak memicu kenaikan inflasi, serta pencegahan penyelundupan masuknya produk luar negeri belum maksimal.

Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan pasar antar komoditas pangan semakin ketat. Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan pangan domestik. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik serta kontinuitas pasokan yang lebih terjamin.

Perubahan konstalasi pemerintahan dari sentralistik menuju otonomi daerah tidak serta merta dapat mengaktualisasikan peran kelembagaan petani dan penyuluhan di daerah. Upaya nyata telah dilakukan oleh pemerintah pasca reformasi dan otonomi daerah, namun belum dapat menunjukkan hasil yang benar-benar dapat memberikan jaminan berjalannya sistem budidaya dan penerapan teknologi untuk dapat mengakselerasi produksi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mendorong program peningkatan produksi dengan empat strategi a) peningkatan produktivitas, b) perluasan areal tanam, c) pengamanan produksi dari

gangguan organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim dan kehilangan hasil pada saat panen dan pascapanen, dan d) perbaikan kelembagaan dan pembiayaan. Penerapan ke empat strategi tersebut sampai di tingkat lapang masih terkendala beberapa aspek antara lain yang dirasakan sangat signifikan adalah pengawalan intensif dari aparat pertanian di daerah produksi (Dinas Pertanian, Penyuluh, POPT, dan lain-lain) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana sebagian kewenangan bidang pertanian telah dilimpahkan kepada daerah, melalui PP Nomor 38 Tahun 2007. Hasil identifikasi dan pencermatan yang dilakukan menunjukkan bahwa Program Nasional dalam rangka peningkatan produksi beras nasional dan pengembangan komoditas pangan lainnya, tidak terkawal dengan baik di daerah, karena dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan bidang pertanian kepada daerah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, tidak serta merta mendapat prioritas dari Pimpinan Daerah, sehingga program dan kegiatan tidak terkawal dengan baik, sebagaimana kita alami pada masa Bimas yang lalu. Hal ini harus menjadi fokus Pemerintah saat ini dan ke depan.

Langkah strategis yang harus dilakukan saat ini dan kedepan adalah, dengan menggerakkan seluruh elemen di daerah melalui peran strategis Pemimpin Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, sampai ke tingkat Desa), sehingga program peningkatan produksi beras nasional yang telah didukung dengan fasilitasi teknologi, sarpras produksi dan dukungan pembiayaan manajemen dapat menjadi suatu Gerakan Nasional dengan satu komando kebijakan untuk dapat mencapai dan mengawal peningkatan produksi beras nasional secara berkelanjutan “Menempatkan pangan sebagai bagian menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta rasa nasionalisme”. Untuk mencapai hal tersebut dalam jangka pendek dan menengah peran Presiden secara sentral sangat penting dan dibutuhkan dalam menggerakkan Gubernur, Bupati/Walikota beserta seluruh jajarannya mengawal program peningkatan produksi beras nasional. Forum APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia); APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), serta pelibatan aktif dunia usaha secara berkeadilan. Hal ini akan sangat besar perannya dalam membangun integrasi dan sinergi program pembangunan pertanian. Dalam jangka panjang harus segera dirancang suatu regulasi yang mampu mengaktualisasikan pangan sebagai kepentingan rakyat,

bangsa dan negara serta menumbuhkan rasa nasionalisme seluruh komponen bangsa.

e) Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pertanian Kota Binjai

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan pertanian. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

1) Kelembagaan Petani Belum Mempunyai Posisi Tawar Kuat

Pendekatan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian di Kota Binjai. Pengembangan kelembagaan pertanian baik formal maupun informal belum optimal memberikan peran berarti pembangunan pertanian di Kota Binjai. Hal ini disebabkan oleh peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, Balai Penelitian dan Penyuluhan (BPP) belum terkoordinasi dengan baik. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Koordinasi dan kinerja lembaga keuangan perbankan yang bergerak di sektor pertanian masih rendah. Koperasi yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum. Keberadaan lembaga-lembaga tradisional di sektor pertanian belum dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah daerah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di sektor pertanian.

Kelembagaan pasar yang belum dibangun selama ini, seperti kelembagaan pasar pada Pasar Lelang, Sub Terminal Agribisnis, Pasar Ternak, Pasar Tani dan kelembagaan pada sistem resi gudang masih harus dikaji untuk diwujudkan agar dapat memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan posisi tawar petani yang optimal.

2) Keterbatasan Petani Dalam Pemanfaatan Teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian. Kondisi ini dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian, karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha agroindustri. Agroindustri ini memegang peran penting dalam proses produksi seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha industri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa transportasi hasil pertanian, pengelolaan lembaga keuangan mikro, konsultan manajemen agribisnis serta tenaga pemasaran produk agroindustri.

3) Menurunnya Minat Generasi Muda

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Mereka lebih memilih untuk mengadu nasib ke sektor selain pertanian seperti bekerja di pabrik-pabrik, bidang kedokteran, menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan pekerjaan bergengsi lainnya. Selama ini rata-rata pekerja yang bekerja di sektor pertanian adalah penduduk dengan usia lebih dari 50 tahun. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan kesenjangan regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi masyarakat dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan

berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari dunia pertanian akan menyulitkan sektor pertanian dalam melaksanakan mandat menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan, serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita terhadap pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik generasi muda pada sektor pertanian adalah membangun pertanian lebih maju dan modern berbasis inovasi dan teknologi yang mampu menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi yang dibutuhkan pasar. Membangun pertanian dalam konteks industri yang syarat dengan inovasi dan teknologi yang menangani hulu hingga hilir akan memberikan peluang yang besar dalam menghasilkan aneka produk pertanian yang bernilai ekonomi tinggi. Pendekatan bioindustri pertanian menjadi sangat penting dan strategis untuk mewujudkan upaya tersebut. Jika kondisi tersebut dapat dibangun, tentu akan menciptakan kondisi perekonomian yang meningkat dan sangat menarik bagi generasi muda untuk menekuni dunia pertanian. Untuk itu beberapa hal penting harus dipersiapkan di perdesaan, yaitu (1) membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian di perdesaan, (2) meningkatkan kapasitas SDM generasi muda pertanian yang lebih baik, dan (3) mendorong kebijakan dan regulasi yang tepat terutama dalam kaitannya dengan kepastian mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan para generasi muda. Langkah konkrit untuk ini antara lain adalah menjaring seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya siswa baru Kota Binjai di sekolah-sekolah tinggi pertanian lingkup Kementerian Pertanian, yang diikuti dengan perbaikan kurikulum dan revitalisasi sarana prasarana belajar mengajar termasuk SDM pengajar.

f) Permodalan Pertanian

Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usaha tani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah seperti Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan skema kredit dengan penjaminan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani. Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan prudential perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan.

Kondisi petani Kota Binjai secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat.

Dengan terbatasnya pembinaan, pengawalan, dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengamanatkan bahwa Pemerintah menugasi BUMN bidang perbankan dan pemda menugasi BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani, dengan membentuk unit khusus pertanian sehingga pelayanan kebutuhan pembiayaan dengan prosedur mudah dan persyaratan lunak. Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti untuk dapat diimplementasikan sehingga petani mendapatkan kemudahan dalam mengakses kredit perbankan. Usaha pertanian juga memiliki risiko yang tinggi baik dari gangguan alam (banjir dan kekeringan), serangan hama dan penyakit tanaman serta

tidak adanya jaminan harga dan pasar hasil produksi pertanian dapat diatasi melalui pengembangan asuransi pertanian.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Binjai dan Wakil Walikota Binjai

a) Visi Pemerintah Kota Binjai

Berlandaskan kepada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai tahap ketiga Tahun 2016-2020, yang ditujukan kepada “pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan industri berbasis online dengan dukungan infrastruktur yang memiliki daya saing, yang berwawasan lingkungan”, maka berdasarkan kondisi masyarakat Kota Binjai saat ini, isu strategis, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun ke depan serta dengan memperhitungkan potensi dan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Kota maka Visi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 adalah :

***“TERWUJUDNYA KOTA CERDAS YANG LAYAK HUNI, BERDAYA SAING
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU BINJAI YANG
SEJAHTERA ”***

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ketiga Kota Binjai Tahun 2016-2020, ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada Visi yakni :

***“KOTA BINJAI SEBAGAI PUSAT PERMUKIMAN, PELAYANAN JASA,
PERDAGANGAN, DAN INDUSTRI YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN”.***

Adapun penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

1. **Kota Cerdas (*Smart City*)**, bermakna bahwa pembangunan Kota Binjai dalam 5 tahun kedepan akan dibangun dalam totalitas perwujudan Kota Cerdas yang melingkupi Pemerintahan yang Cerdas (*Smart Governance*), Sumber Daya Manusia yang Cerdas (*Smart People*), Infrastruktur Pendukung Mobilitas Masyarakat yang produktif (*Smart Mobility*), Perekonomian Tinggi dengan

Dukungan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan (*Smart Economy and Smart Environment*).

2. **Kota Layak Huni (*Smart Living*)**, mengandung pengertian bahwa optimalisasi pembangunan aspek fisik fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang dan lain-lain dan aspek non fisik (interaksi sosial, ekonomi, hukum dan politik) yang terwujud melalui indikator : (1) tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih dan listrik), (2) tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah dan kesehatan, (3) tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi, keamanan dengan bebas dari rasa takut dan (4) mendukung fungsi ekonomi, sosial, budaya dan (5) sanitasi lingkungan yang baik serta keindahan lingkungan fisik.
3. **Berdaya Saing**, mengandung pengertian bahwa kemajuan Kota Binjai diarahkan kepada peningkatan daya saing pada sektor permukiman, jasa, perdagangan dan industri dengan target capaian berada diatas capaian Provinsi Sumatera Utara dan meningkatnya investasi.
4. **Berwawasan Lingkungan**, mengandung pengertian bahwa pembangunan kedepan diarahkan dalam tindak lanjut pembangunan Kota Binjai Eco-Green City yang telah dimulai sejak 5 tahun terakhir.
5. **Sejahtera**, mengandung pengertian terwujudnya peningkatan pendapatan, penurunan kesenjangan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat dengan capaian yang lebih baik dari Provinsi Sumatera Utara.

b) Misi Pemerintah Kota Binjai

Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya Visi tersebut diwujudkan melalui Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
2. Membangun sumber daya manusia berkualitas (*Smart People*) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera;
3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;

4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang terampil, inovatif, kreatif dan produktif (*Smart Economy dan Smart Environment*);
5. Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. **Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya**, bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompetensi dan memiliki integritas, mewujudkan penegakan hukum dan penertiban keamanan, peningkatan kehidupan beragama melalui penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama, serta mendorong terwujudnya otonomi pemerintahan daerah;
2. **Membangun sumber daya manusia berkualitas (*Smart People*) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera**, bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Binjai yang unggul dan mandiri, sehat, cerdas, berkompetensi tinggi dan berdaya saing, serta memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (penguasaan IPTEK dan pengamalan IMTAQ), maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan sarana dan kualitas pelayanan kesehatan, pembinaan keterampilan untuk bekal hidup (*skill living*) serta penyaluran bakat olah raga dan seni budaya generasi muda, untuk terciptanya manusia yang sehat jasmani dan rohani, berkarakter dan menjunjung tinggi norma, adat dan budaya;
3. **Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat**, bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif didukung oleh peningkatan sarana dan

prasarana penunjang/ infrastruktur yang dapat mendorong pengembangan ekonomi, interaksi sosial, dan budaya masyarakat;

4. **Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (*Smart Economy and Smart Environment*)**, bermakna bahwa pembangunan kedepan diarahkan kepada optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) dan daya dukung lingkungan, melalui pengembangan SDM yang berkualitas, berkompotensi tinggi (berdaya saing).
5. **Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan**, bermakna bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai standar hidup layak maka kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penurunan angka kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan rumah layak huni dan peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat.

c) Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Binjai

1) Tujuan

Adapun tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kerukunan hidup antar umat beragama, peran pemuda, olahraga, dan seni budaya.
4. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing;
5. Meningkatkan kualitas dan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kota melalui efektifitas pembangunan infrastruktur;
6. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktifitas SDM;
7. Mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

2) Sasaran

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dituju adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan
4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat kecamatan dan kelurahan
5. Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama
6. Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya
7. Terciptanya daya saing Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya;
8. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran;
9. Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan RTRW;
10. Meningkatnya produktifitas perekonomian kota;
11. Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi koperasi dan kelompok UMKM yang berbasis potensi ekonomi kerakyatan;
12. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
13. Pengurangan tingkat resiko akibat bencana;
14. Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan, dan kenyamanan.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan tersebut harus diwujudkan oleh SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang tergambar dalam target tujuan dan target sasaran. Adapaun hubungan hirarki antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Hubungan Hirarki Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dengan Target Capaian Kinerja yang Harus Diwujudkan SKPD

VISI : “TERWUJUDNYA KOTA CERDAS YANG LAYAK HUNI, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU BINJAI YANG SEJAHTERA”									
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET CAPAIAN KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (<i>Smart Economy and Smart Environment</i>)	Tujuan 6 : Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktifitas SDM	Sasaran 9 : Meningkatnya produktifitas perekonomian kota	3. Ketahanan Pangan						
			Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi :						
			- Beras (<i>ribu ton</i>)	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
			- Jagung (<i>ton</i>)	7.100	7.150	7.200	7.250	7.300	7.350
			- Kedelai (<i>ton</i>)	50	75	100	125	150	200
			- % Swasembada	29,16	29,43	29,69	29,94	30,18	30,42
			- Penurunan konsumsi beras	120	119	118	117	116	115
			- Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (<i>KK</i>)	12.150	12.100	12.050	12.000	11.950	11.900
			- Skor Pola Pangan Harapan	75,5	76,0	76,5	77,0	77,5	78,0

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

a) Gambaran Renstra Kementerian Pertanian

1) Visi Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah :

**TERWUJUDNYA SISTEM PERTANIAN-BIOINDUSTRI
BERKELANJUTAN YANG MENGHASILKAN BERAGAM PANGAN
SEHAT DAN PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS
SUMBERDAYA LOKAL UNTUK KEDAULATAN PANGAN DAN
KESEJAHTERAAN PETANI**

2) Misi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan;
3. Mewujudkan kesejahteraan petani;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

3) Tujuan Kementerian Pertanian

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian;
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

4) Sasaran Kementerian Pertanian

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani;
6. Akuntabilitas kinerja aparaturnya pemerintah yang baik.

b) Gambaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

1) Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

**“MEWUJUDKAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASIS
KEPENTINGAN NASIONAL”**

2) Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni :

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

3) Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat;
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

4) Sasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan “Kesejahteraan”, yaitu :

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP;
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;

4. Tersedianya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif;
5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan;
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif;
7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang kompeten, profesional, dan berkepribadian;
8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal, dan mudah diakses;
9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan *akuntable*.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut hendaknya disinergiskan dengan program SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang ada di daerah. Ruang lingkup pembangunan pertanian dan perikanan secara geografis sangat luas melintasi batas-batas wilayah administratif. Ruang lingkup pemangku kepentingan juga beragam meliputi aparatur pemerintah, anggota badan legislatif, lembaga perguruan tinggi, lembaga penggerak swadaya masyarakat, serta pelaku usaha swasta dan masyarakat petani. Di sisi pemerintahan, pembangunan pertanian dan perikanan melibatkan lintas instansi pemerintah baik di level kementerian, maupun di level satuan kerja perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan yang berada instansi lintas sektoral harus dapat dioptimalkan dengan menghilangkan adanya kebijakan yang saling bertentangan atau terdapat perilaku pemangku kepentingan yang tumpang tindih. Kebijakan pendukung yang ada juga harus bersifat operasional, sehingga rancangan kebijakan harus diketahui sejak awal dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, tentu akan banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Tidak semuanya dapat diselesaikan di bawah kewenangan Pusat (Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan). Untuk itulah diperlukan dukungan dari instansi lain termasuk yang berada di daerah. Beberapa bentuk dukungan yang diharapkan dari instansi yang berada di daerah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Sinergitas Dalam Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah Kepada Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Terkait Pembangunan Pertanian dan Perikanan

Instansi	Dukungan
Pemerintah Daerah	Penerbitan Peraturan Daerah, termasuk diantaranya peraturan terkait RTRW
	Jaminan ketersediaan dan status lahan untuk investasi pangan, pengembangan padang penggembalaan dan hijauan makanan ternak
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluh pertanian oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
	Pembinaan pengembangan kawasan pertanian
	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kota Binjai

a) Kebijakan Kewilayahan

Fokus pembangunan Kota Binjai pada tahun 2016-2021 diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) MEBIDANGRO, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan, yakni :

- (1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat dalam wilayah Kota Binjai adalah Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kota Binjai adalah Kawasan Andalan Perkotaan Mebidangro.
- (3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan yang diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan *geosrategic* nasional yang terdapat dalam wilayah Kota Binjai adalah kawasan Brimob dan Arhanud SE-11BS di Kecamatan Binjai Timur.

Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan diarahkan kepada :

1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan;
2. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarannya;
3. Peningkatan keseimbangan pembangunan perKota an dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat industri, jasa dan sektor lainnya.
4. Peningkatan kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional MEBIDANG dan Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.

Skenario Pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) yang berdasarkan kepada wilayah koordinasi pemerintahan dan pengembangan pusat pelayanan di Kota Binjai yang dibagi kedalam :

1. **Pusat pelayanan kota fungsi primer** meliputi:
 - a. Pusat perdagangan dan jasa ditetapkan di Kecamatan Binjai Kota;
 - b. Pusat kawasan industri dan penambangan minyak dan gas ditetapkan di Kecamatan Binjai Utara;
 - c. Pusat kegiatan transportasi ditetapkan di Kecamatan Binjai Timur;
 - d. Pusat kegiatan pertahanan keamanan ditetapkan di Kecamatan Binjai Timur; dan
 - e. Pusat kegiatan pendidikan tinggi ditetapkan di Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Barat.
2. **Pusat pelayanan kota fungsi sekunder** meliputi:
 - a. Pusat perdagangan dan jasa ditetapkan di Kecamatan Binjai Kota;
 - b. Pusat pemerintahan kota ditetapkan di Kecamatan Binjai Timur; dan

- c. Pusat pelayanan wisata ditetapkan di Kecamatan Binjai Selatan.
3. **Sub Pusat pelayanan kota (SPK)**, dengan skala pelayanan bagian wilayah kota yang mencakup beberapa kelurahan, baik yang berada pada kecamatan yang sama maupun di beberapa kecamatan yang berbatasan.
4. **Pusat lingkungan (PL)**, melayani 2.500 hingga 3.000 jiwa penduduk terdapat di seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Binjai.

b) Kawasan Strategis Berkaitan dengan Aspek Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Dalam strategi pengelolaan kawasan lindung, ditetapkan kriteria kawasan strategis yang berkaitan dengan aspek lingkungan sebagai berikut :

- a. memberikan perlindungan lingkungan atau kawasan;
- b. memiliki nilai strategis memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
- c. memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan dan mengantisipasi bencana banjir;
- d. terdapat tuntutan politis pemerintah kota harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari luas wilayahnya;
- e. memiliki peran ekonomi tinggi kalau dapat dikelola dengan baik;
- f. kebutuhan pemberian identitas kota dengan pengembangan tanaman buah rambutan Binjai.

Kawasan strategis berkaitan dengan aspek lingkungan adalah :

- a. Kawasan Pariwisata Alam Pantai SB
- b. Kawasan Rencana pengembangan *bottanical garden*/ hutan kota di sekitar kawasan pusat pemerintahan dan di Kawasan Wisata pantai SB
- c. Kawasan rencana pengembangan waduk-waduk buatan yang menyebar di Kota Binjai

Pengembangan pariwisata pantai SB dan sekitarnya meliputi kegiatan wisata alam menikmati pemandangan sungai, perkebunan kelapa sawit, dan danau buatan. Pengembangan pantai SB dilengkapi dengan kolam-kolam buatan sebagai pengendali banjir, penampungan air, dan sebagai wisata air.

Pengembangan Hutan kota berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tangkapan air, juga berfungsi untuk memperbaiki kualitas udara dan keindahan atau *landscape* kota. Hutan kota dikembangkan juga sebagai obyek wisata dan pendidikan, sehingga hutan kota dapat dikembangkan sebagai "*botanical garden*". Hutan kota

ditanami dengan tanaman keras/ tahunan yang dapat menunjang estetika kota dan pelestarian/ pengembangan tanaman rambutan Binjai.

Pengembangan danau buatan sebagai kawasan rekreasi air ini adalah dalam rangka peningkatan ruang terbuka hijau, pengendalian banjir, peningkatan resapan air kota, dan sebagai cadangan air di musim kemarau. Pengembangan danau buatan diarahkan untuk menunjang pengembangan taman rekreasi kota dan pendidikan *aqua culture*.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Kota Binjai

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan dan kehutanan) pada tahun 2014, yaitu sekitar 244,003 milyar rupiah atau 3,92 % dari PDRB Kota Binjai yang besarnya 6.230,55 milyar rupiah (berdasarkan harga konstan tahun 2010). Selama periode 2010-2014, pertumbuhan PDRB pertanian dalam arti luas tersebut berkisar antara -3,66 % hingga 3,35 % dengan rata-rata sekitar 0,45 %, pada saat yang sama PDRB Kota Binjai tumbuh sekitar 5,87 %. Dengan adanya ketimpangan pertumbuhan tersebut, maka kontribusi pertanian semakin menurun dari 4,74 % di tahun 2010 menjadi 3,92 % dari total PDRB Kota Binjai di tahun 2014.

Tabel 16. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertanian Kota Binjai 2010-2014 (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)

Keterangan	Tahun					Rerata
	2010	2011	2012	2013	2014	
PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (<i>dalam juta rupiah</i>)	240.034,5	248.085,1	253.018,6	243.758,6	244.003,7	
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		3,35%	1,99%	-3,66%	0,10%	0,45%
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Binjai (<i>dalam juta rupiah</i>)	4.960.424,6	5.236.274,0	5.553.626,0	5.887.466,9	6.230.550,2	
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Binjai		5,56%	6,06%	6,01%	5,83%	5,87%
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB Kota Binjai	4,84%	4,74%	4,56%	4,14%	3,92%	4,44%

Sumber : Diolah dari BPS Kota Binjai

b) Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kota Binjai

Selama periode 2010-2014, sektor pertanian masih merupakan sektor dengan pangsa penyerapan tenaga kerja yang tidak bisa dipandang kecil, walaupun ada kecenderungan menurun. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian di Kota Binjai pada tahun 2010 sebanyak 10.200 orang atau sekitar 9,40 % dari total tenaga kerja. Pada tahun 2014, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian di Kota Binjai mengalami penurunan menjadi 5.714 orang atau 5,14 % dari total tenaga kerja. Data penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tersebut hanya berasal dari kegiatan sektor pertanian primer, belum termasuk sektor sekunder dan tersier dari sistem dan usaha agribisnis. Bila tenaga kerja dihitung dengan yang terserap pada sektor sekunder dan tersiernya, maka kemampuan sektor pertanian tentu akan lebih besar. Walaupun kemampuan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja nasional sangat besar, namun di sisi lain justru menjadi beban bagi sektor pertanian dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya.

Tabel 17. Pertumbuhan Pangsa Tenaga Kerja Pertanian dan Pertumbuhan Pangsa PDRB Pertanian Kota Binjai Tahun 2010-2014

Keterangan	Tahun					Rerata
	2010	2011	2012	2013	2014	
PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (<i>dalam juta rupiah</i>)	240.034,5	248.085,1	253.018,6	243.758,6	244.003,7	
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		3,35%	1,99%	-3,66%	0,10%	0,45%
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Pada Lapangan Pekerjaan Pertanian (<i>dalam orang</i>)	10.200	7.671	7.648	5.630	5.714	
Pertumbuhan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Pada Lapangan Pekerjaan Pertanian		-24,79%	-0,31%	-26,39%	1,49%	-12,50%

Sumber : Diolah dari BPS Kota Binjai

Bila disandingkan data pertumbuhan pangsa tenaga kerja pertanian dengan pertumbuhan pangsa PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, maka pada periode tahun 2010-2014 terjadi penurunan pangsa tenaga kerja pertanian sebesar -12,50 % per tahun dan pada saat yang bersamaan terjadi pula sedikit kenaikan pertumbuhan pangsa PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,45 % per tahun. Dengan membandingkan tingkat penurunan pangsa tenaga kerja pertanian yang cukup besar dibandingkan dengan sedikit tingkat kenaikan pangsa PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, maka dapat

dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan per kapita tenaga kerja di sektor pertanian semakin membaik (lihat Tabel 2).

c) Investasi Sektor Pertanian Kota Binjai

Investasi sektor pertanian terdiri dari investasi swadaya petani, pemerintah daerah, dan swasta. Dari data yang diolah diperkirakan total investasi sektor pertanian mencapai 102 milyar rupiah di tahun 2015. Investasi sektor pertanian terbesar berasal dari swadaya petani dalam bentuk prasarana lahan serta sarana pendukungnya. Sedangkan investasi pemerintah daerah melalui APBD tahun 2015 hanya sebesar 7,13 milyar rupiah atau sekitar 6,99 % dari total investasi di sektor pertanian di Kota Binjai.

Kontribusi investasi swasta terhadap total investasi di sektor pertanian sangat kecil, namun peningkatan investasi swasta di sektor pertanian akan mencerminkan kondisi yang kondusif bagi sektor pertanian sebagai tujuan investasi. Investasi merupakan penggerak pertumbuhan PDRB sektor pertanian dimana makin tinggi investasi, maka makin besar pertumbuhan PDRB sektor pertanian.

Salah satu indikator aliran investasi ke sektor pertanian adalah persetujuan investasi di sektor tersebut. Data yang diolah dari Badan Statistik (BPS) Kota Binjai menjelaskan bahwa selama periode 2010-2014, persetujuan investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kota Binjai meningkat dengan pertumbuhan sebesar 291,03 %/tahun. Sedangkan data yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Sumatera Utara menjelaskan bahwa selama periode 2014-2015 total investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Binjai tahun 2015 menurun dengan penurunan pertumbuhan sebesar -20,12 %/tahun. Berdasarkan data yang ada, tidak diketahui berapa nilai PMA untuk sektor pertanian Kota Binjai. Nilai investasi PMDN Kota Binjai tahun 2014 sekitar 10,96 milyar rupiah, sedangkan untuk total investasi PMA Kota Binjai tahun 2014 sekitar 26,96 milyar rupiah. Dari besaran nilai investasi PMDN/ PMA Kota Binjai tersebut belum didapat data terperinci nilai investasi yang mengalir ke sektor pertanian. Data yang diperoleh hanya menggambarkan bahwa sepanjang tahun 2010-2015 terdapat rata-rata sebanyak 9 perusahaan baru tiap tahun yang menanamkan PMDN di sektor pertanian Kota Binjai.

Namun dapat pula digambarkan bahwa realisasi investasi sektor pertanian baik PMDN maupun PMA di Sumatera Utara, lebih terfokus pada sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan dibandingkan dengan sub-sektor peternakan. Pada periode 2011-2015, realisasi investasi PMDN dan PMA di Sumatera Utara pada sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan mencapai 96,89 %. Sementara sisanya adalah investasi di sub-sektor peternakan dan sub-sektor perikanan.

Tabel 18. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian di Kota Binjai dan Sumatera Utara Tahun 2010-2015

Daerah	Jenis Penanaman Modal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
Kota Binjai	PMA (dalam juta US \$)					26.960,72	21.536,25	
	Pertumbuhan PMA						-20,12%	-20,12%
	PMDN (dalam juta rupiah)	2.170	811	811	10.760	10.760		
	Pertumbuhan PMDN		-62,63%	0,00%	1226,76%	0,00%		291,03%
	Jumlah Perusahaan Baru di Sektor Pertanian	4	18	15	2	7		9,20
Sumatera Utara	PMA (dalam juta US \$)	Sub-Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan	80.917,94	63.919,67	98.854,44	865.776,44	278.313,75	99,69%
		Sub-Sektor Peternakan		0	0	0	4.321,25	0,31%
		Total Sektor Pertanian Umum		80.917,94	63.919,67	98.854,44	865.776,44	282.635,00
	PMDN (dalam juta rupiah)	Sub-Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan	1.106.095,98	511.392,45	599.158,40	750.088,55	73.791,60	94,09%
		Sub-Sektor Peternakan		141,80	5.966,10	45.293,10	85.009,80	5,79%
		Sub-Sektor Perikanan		0	0	3.843,50	0	0,12%
		Total Sektor Pertanian Umum		1.106.237,78	517.358,55	648.295,00	800.914,45	158.801,40

Sumber : Diolah dari BPS Kota Binjai, BPS Sumatera Utara dan BPMP Sumatera Utara

Kawasan konsentrasi pengembangan pertanian dipusatkan di daerah Binjai sebelah timur dan selatan. Sedangkan daerah pengembangan peternakan dipusatkan di kawasan Binjai Barat. Bidang hortikultura tanaman buah-buahan yang menjadi perhatian adalah kebun pohon rambutan Kota Binjai yang mencapai 298,2 ha dengan kapasitas produksi 2.514,7 ton pada tahun 2015. Kapasitas sebesar ini merupakan potensi besar investasi untuk melakukan modernisasi industri pengolahan rambutan menjadi komoditi unggulan yang bernilai plus dibandingkan dengan hanya menjual buah rambutan itu sendiri, misalnya industri pengalengan rambutan dengan jalur pemasaran yang komplit.

d) Neraca Perdagangan Sektor Pertanian

Data neraca perdagangan sektor pertanian untuk Kota Binjai memang secara terperinci belum tercatat dalam data statistik dari BPS Kota Binjai. Data yang diperoleh dari BPS Sumatera Utara dapat digambarkan bahwa secara keseluruhan neraca perdagangan sektor pertanian di Sumatera Utara masih berada pada posisi surplus. Namun pertumbuhan ekspor selama periode 2010-2014 menurun sebesar -3,68 %/tahun, sementara pertumbuhan impor justru meningkat sekitar 21,59 %/tahun. Secara rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan masih tumbuh negatif dengan penurunan sebesar -6,86 %/tahun.

Tabel 19. Perkembangan Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Sumatera Utara Tahun 2010-2014

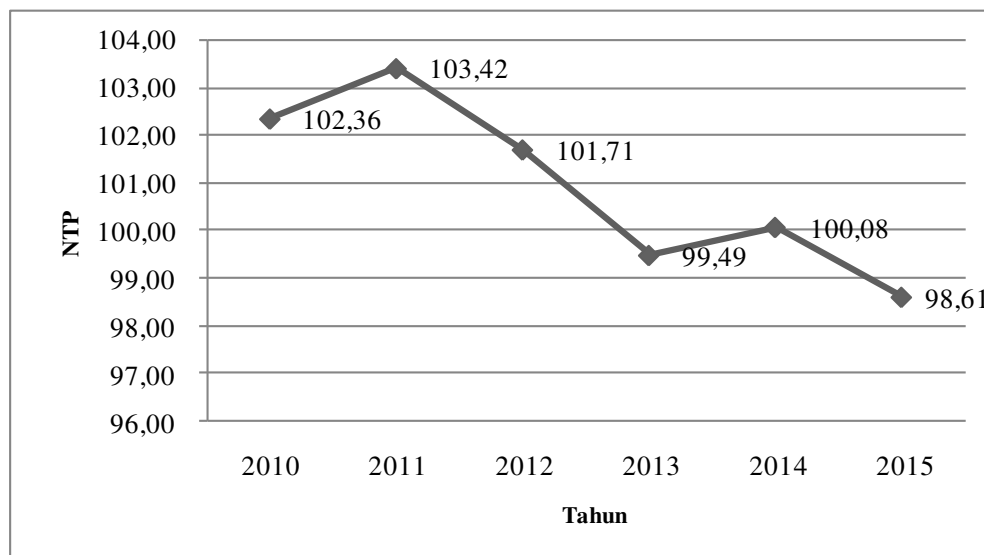
Sektor Pertanian	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata
Nilai Ekspor (<i>dalam ribu US \$</i>)	2.677.304	3.951.429	2.740.148	2.403.011	1.937.883	
Pertumbuhan Ekspor		47,59%	-30,65%	-12,30%	-19,36%	-3,68%
Nilai Impor (<i>dalam ribu US \$</i>)	197.537	298.482	343.038	408.375	413.646	
Pertumbuhan Impor		51,10%	14,93%	19,05%	1,29%	21,59%
Neraca Perdagangan (<i>dalam ribu US \$</i>)	2.479.767	3.652.947	2.397.110	1.994.636	1.524.237	
Pertumbuhan Neraca Perdagangan		47,31%	-34,38%	-16,79%	-23,58%	-6,86%

Sumber : Diolah dari BPS Sumatera Utara

e) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana It menunjukkan fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani sementara Ib mencerminkan harga barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. NTP digunakan untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Umumnya, NTP digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani. Namun demikian, sebagai alat ukur kesejahteraan petani, penggunaan asumsi tingkat produksi yang tetap dinilai kurang relevan, karena kuantitas tetap berarti NTP tidak mengakomodasi kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi, dan pembangunan. Karena itu NTP cukup diposisikan sebagai alat ukur untuk menghitung daya beli penerimaan petani

terhadap pengeluaran petani. Dengan kata lain, bahwa NTP bukan mutlak sebagai ukuran kesejahteraan petani karena walaupun indeks harga yang diterima petani meningkat dengan berbagai kebijakan perlindungan harga yang dilakukan Pemerintah, namun belum tentu NTP meningkat, karena masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani.



Sumber : Diolah dari BPS Sumatera Utara

**Gambar 2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumatera Utara
Tahun 2010-2015 (tahun dasar 2012 = 100)**

Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara merupakan gabungan dari seluruh NTP sub-sektor (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan). Data Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Binjai memang secara terperinci belum tercatat dalam data statistik dari BPS Kota Binjai. Namun data yang diperoleh dari BPS Sumatera Utara dapat digambarkan bahwa selama periode 2010-2015, secara umum NTP Sumatera Utara menurun walaupun sempat meningkat pada tahun 2011. Penurunan NTP tertinggi terjadi pada tahun 2015. Rata-rata NTP Sumatera Utara pada tahun 2015 adalah sebesar 98,61.

Penurunan NTP tersebut disebabkan oleh laju peningkatan indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan laju peningkatan indeks harga yang dibayar petani. Harga barang konsumsi dan biaya produksi naik lebih besar dari kenaikan harga produksinya. Pengeluaran petani naik lebih besar dari pendapatannya dengan demikian tingkat kesejahteraan petani Sumatera Utara tahun 2015 lebih rendah dibandingkan tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar (2012 = 100).

Peningkatan indeks harga yang diterima petani merupakan hasil dari kebijakan Dinas Pertanian Sumatera Utara bersama Kementerian Pertanian dalam upaya perlindungan harga komoditas pertanian, sedangkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani merupakan hasil kebijakan diluar kendali Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Sumatera Utara. Peningkatan NTP dapat dilakukan dengan meningkatkan indeks harga yang diterima petani, namun hal ini dapat memacu inflasi. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan NTP perlu diupayakan agar peningkatan indeks harga yang dibayar petani tidak terlalu progresif.

f) Kesejahteraan Petani Kota Binjai

Kesejahteraan petani (termasuk peternak dan pembudidaya ikan) merupakan sasaran akhir yang akan dicapai dari pembangunan pertanian (termasuk sub-sektor peternakan dan perikanan) di Kota Binjai. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam membangun pertanian, peternakan, dan perikanan merupakan sarana atau instrumen bagi para pengambil kebijakan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Tingkat kesejahteraan petani diukur dari: (a) pendapatan per kapita; (b) tingkat kemiskinan; dan (c) tingkat kerawanan pangan rumah tangga pertanian.

1) Pendapatan Per Kapita Petani Kota Binjai

Kesejahteraan petani yang diukur dengan pendapatan per kapita petani diperoleh dengan menghitung nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dibagi dengan jumlah penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian. Data yang tersedia di tingkat Kota Binjai untuk pertanian adalah jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian (termasuk perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan). Oleh karena itu, untuk menghitung jumlah penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian diperoleh dengan mengalikan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga tiap tahunnya. Berdasar perhitungan tersebut data pada tabel 5 menunjukkan

perkembangan pendapatan/ kapita petani masing-masing untuk perhitungan berdasarkan PDRB sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) Kota Binjai dengan harga konstan tahun 2000.

Tabel 20. Perkembangan Pendapatan Per Kapita Sektor Pertanian Kota Binjai Tahun 2010-2014 atas Harga Konstan Tahun 2000

No.	Keterangan	Tahun					Rerata
		2010	2011	2012	2013	2014	
a	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (<i>dalam rupiah</i>)	240.034.500.000	248.085.100.000	253.018.600.000	243.758.600.000	244.003.700.000	
b	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Pada Lapangan Pekerjaan Pertanian (<i>dalam orang</i>)	10.200	7.671	7.648	5.630	5.714	
c	Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga	4,34	4,32	4,29	4,27	4,34	
d	Jumlah Penduduk yang Terlibat Dalam Sektor Pertanian (<i>b dikali c</i>)	44.269	33.141	32.810	24.040	24.799	
e	Pendapatan Per Kapita (<i>fa dibagi d</i>)	451.849	623.820	642.639	844.982	819.946	
f	Garis Kemiskinan Kota Binjai (<i>rupiah/kapita/bulan</i>)			295.265	305.596	310.384	
g	Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita		38,06%	3,02%	31,49%	-2,96%	17,40%

Sumber: Diolah dari BPS Kota Binjai

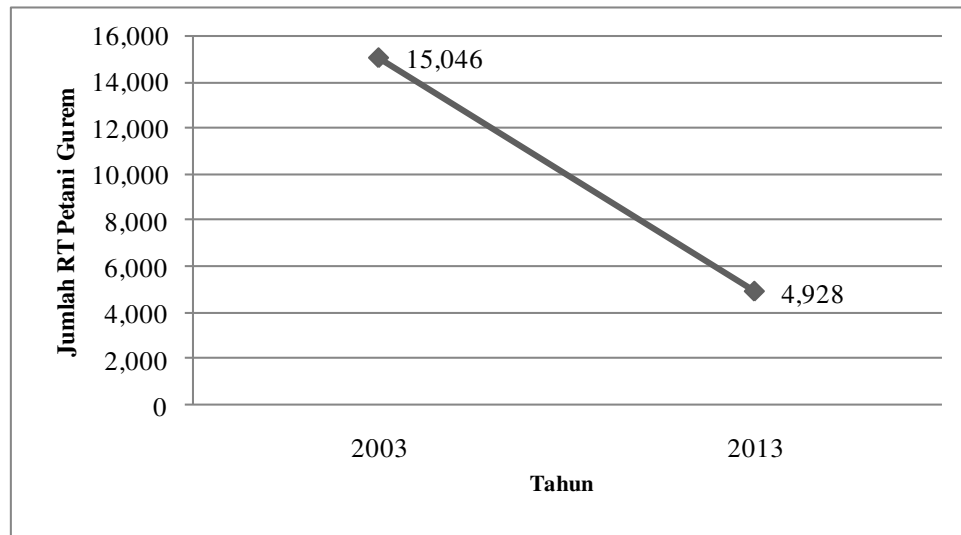
Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa berdasarkan harga konstan tahun 2000, tingkat pendapatan petani menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif sebesar 17,40 % selama kurun waktu 201-2014. Walaupun terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian, namun demikian secara nominal tingkat pendapatan/kapita petani tersebut masih berada di atas garis kemiskinan sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan bagi keluarga petani Kota Binjai. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2014 misalnya, tingkat pendapatan/kapita sektor pertanian sebesar Rp 819.946/kapita/bulan padahal berdasarkan BPS Kota Binjai, batas garis kemiskinan adalah pendapatan Rp 310.384/kapita/bulan, tentu ini menunjukkan masih relatif tingginya tingkat kesejahteraan petani atau penduduk yang bekerja di sektor pertanian di Kota Binjai.

2) Tingkat Kemiskinan Sektor Pertanian Kota Binjai

Hingga kini, kemiskinan di Kota Binjai masih menjadi fenomena di sektor pertanian. Secara faktual, masih ditemukan penduduk miskin yang bekerja sebagai petani dan buruh tani. Salah satu penyebab kemiskinan yang mengarah pada sektor pertanian adalah penguasaan lahan pertanian oleh petani yang kian sempit. Skala usaha yang kecil mengakibatkan pendapatan dari

kegiatan usaha tani tidak mencukupi kebutuhan hidup meski kegiatan usaha tani yang dijalankan sebenarnya cukup menguntungkan. BPS telah merilis jumlah rumah tangga petani gurem melalui hasil Sensus Pertanian tahun 2013.

Gambar 3. Jumlah Rumah Tangga Petani Gurem di Kota Binjai Tahun 2003 dan 2013



Sumber : Data BPS

Tingkat kemiskinan di pertanian didekati dengan menggunakan data jumlah rumah tangga petani gurem. Rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Penghitungan jumlah rumah tangga petani gurem berdasarkan jumlah luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga baik lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Rumah tangga pertanian yang hanya melakukan kegiatan budidaya ikan di perairan umum, penangkapan ikan di perairan umum, pemungutan hasil hutan/ penangkapan satwa liar, dan jasa pertanian dikategorikan rumah tangga pertanian bukan pengguna lahan.

Pada tahun 2003 dan 2013, jumlah rumah tangga petani gurem di Kota Binjai menurun dari sekitar 15.046 pada tahun 2003 menjadi 4.928 pada tahun 2013. Angka ini menunjukkan penurunan jumlah rumah tangga petani gurem sebesar 10.118 atau sekitar 67,25 % bila dibandingkan dengan kondisi 10 tahun yang lalu. Perkembangan jumlah rumah tangga petani gurem dapat dianggap sebagai representasi perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Karena itu, penurunan jumlah rumah tangga petani gurem ini merupakan petunjuk bahwa telah terjadi perbaikan kesejahteraan di sektor pertanian Kota Binjai.

3) Kerawanan Pangan Rumah Tangga di Kota Binjai

Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan. Berdasarkan data yang tersedia, maka angka kerawanan pangan didekati dengan menggunakan dan menjumlahkan data jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. BkkbN telah merilis data jumlah Keluarga Sejahtera melalui hasil Pendataan Keluarga tahun 2012-2014. Dilihat dari aspek konsumsi pangan saja, definisi Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi indikator tahapan Keluarga Sejahtera I. Sedangkan definisi Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator yaitu pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih namun keluarga tersebut tidak dapat memenuhi paling kurang sekali seminggu, seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.

**Tabel 21. Jumlah Keluarga Rawan Pangan Kota Binjai
Tahun 2012–2014**

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	2012	2013	2014
a	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	745	751	648
b	Jumlah Keluarga Sejahtera I	11,168	11,598	11,571
c	Jumlah Keluarga Rawan Pangan (a + b)	11,913	12,349	12,219

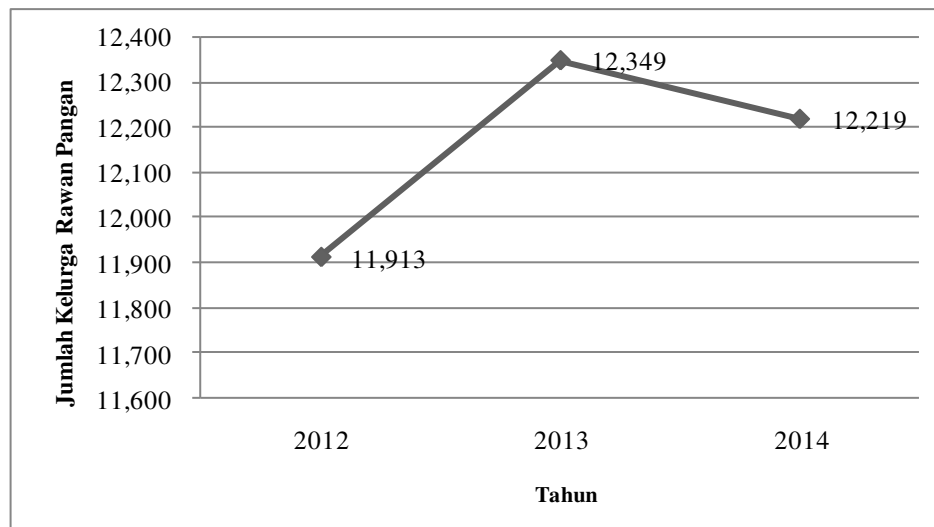
Sumber : Diolah dari BkkbN

Tabel 22. Daerah Potensi Rawan Bencana di Kota Binjai

Kecamatan	Banjir	Kekeringan	Angin Puting Beliung
Binjai Utara		Potensi Rawan	Potensi Rawan
Binjai Timur	Potensi Rawan		
Binjai Selatan	Potensi Rawan		
Binjai Barat			
Binjai Kota	Potensi Rawan		

Sumber : BPS Kota Binjai dan BPBD Kota Binjai untuk kejadian tahun 2014-2015

Gambar 4. Perkembangan Keluarga Rawan Pangan Kota Binjai Tahun 2012–2014



Sumber : Diolah dari BkbbN

Pada periode tahun 2012-2014, jumlah keluarga rawan pangan di Kota Binjai pada tahun 2012 adalah 11.913 keluarga bertambah menjadi 12.349 keluarga pada tahun 2013. Pada tahun 2014 menurun sedikit menjadi 12.219 keluarga. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari jumlah keluarga rawan pangan menjadi keluarga aman pangan atau sebaliknya.

Kondisi rawan pangan serta daerah rawan bencana masih terjadi di Kota Binjai, terutama pada beberapa kecamatan yang pada waktu-waktu tertentu terkena kekeringan, bencana banjir, angin puting beliung, dan sebagainya. Penduduk rawan pangan dan daerah yang rawan bencana tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

a) Visi SKPD

Dengan memperhatikan visi Pemerintah Kota Binjai dan mempertimbangkan masalah serta tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan maka visi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai adalah :

**"TERWUJUDNYA SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN YANG
MENGHASILKAN BERAGAM PANGAN SEHAT DAN PRODUK
BERDAYA SAING TINGGI BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL UNTUK
KETAHANAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI
MENUJU BINJAI YANG SEJAHTERA"**

Tabel 23. Pokok-Pokok Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

Pokok-Pokok Visi	Makna Visi
Sistem Pertanian Berkelanjutan	Sistem pertanian yang dilakukan secara seimbang dan disesuaikan dengan daya dukung ekosistem sehingga kontinuitas produksi pertanian dapat dipertahankan dalam jangka panjang, dengan menekankan tingkat kerusakan lingkungan sekecil mungkin
Beragam	Mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman sumberdaya, mengoptimalkan peluang pasar, mengurangi potensi dampak resiko, memenuhi meningkatnya preferensi konsumen akibat kenaikan pendapatan ataupun selera
Pangan Sehat	Menyediakan produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang aman, sehat, dan halal
Produk Berdaya Saing Tinggi	Mengupayakan menghasilkan produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang mensejahterakan pelaku/petani, mendorong dihasilkannya aneka produk segar, produk olahan, produk turunan, produk samping, produk ikutan dan limbah
Sumberdaya Lokal	Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah dan komoditas, meningkatkan efisiensi
Ketahanan Pangan	Mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau
Kesejahteraan Petani	Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya
Binjai yang Sejahtera	Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat petani, penurunan kesenjangan pendapatan, dan perluasan kesempatan kerja di atas capaian Provinsi Sumatera Utara

b) Misi SKPD

Dalam rangka mewujudkan visi ini, maka misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai adalah :

1. Mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai.
2. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan di Kota Binjai.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani di Kota Binjai.
4. Mewujudkan reformasi birokrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

a) Tujuan SKPD

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian Kota Binjai periode 2016-2021 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian, peternakan, dan perikanan Kota Binjai.
3. Meningkatkan upaya ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi di Kota Binjai.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Binjai.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang amanah dan profesional.

b) Sasaran SKPD

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam dalam periode 2016-2021 adalah :

1. Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai.
2. Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai.
3. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar.
4. Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai.

5. Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai.
6. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik.

**Tabel 24. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
Tahun 2016-2021**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Sistem Pertanian Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Menuju Binjai yang Sejahtera	1. Mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai	1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai	1. Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai
			2. Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai
	2. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan di Kota Binjai	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian, peternakan, dan perikanan Kota Binjai	3. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar
		3. Meningkatkan upaya ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi di Kota Binjai	4. Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai
	3. Mewujudkan kesejahteraan petani di Kota Binjai	4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Binjai	5. Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai
	4. Mewujudkan reformasi birokrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang amanah dan profesional	6. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai akan melaksanakannya melalui 4 (empat) Misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan dalam jangka waktu 5(lima) tahun mendatang.

a) Strategi SKPD

1. Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Pertama : “Mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai”**, dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - (a) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil produksi tanaman pangan serta menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian.
 - (b) Meningkatkan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.
 - (c) Pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat.
 - (d) Pemenuhan pangan berupa ikan dan pengelolaan sumberdaya perikanan.
 - (e) Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
2. Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Kedua : “Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan di Kota Binjai”**, dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - (f) Meningkatkan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian.
 - (g) Menyediakan dan meningkatkan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
3. Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Ketiga : “Mewujudkan kesejahteraan petani di Kota Binjai”**, dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - (h) Meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Keempat : “Mewujudkan reformasi birokrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai”**, dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - (i) Meningkatkan akuntabilitas aparatur dinas pertanian dan perikanan Kota Binjai.

b) Kebijakan SKPD

1. Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan **Misi Pertama** :
Mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tujuan 1 : **Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai**

Sasaran 1 : **Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai**

Strategi a : *Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil produksi tanaman pangan serta menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian*, dengan kebijakan yang dilaksanakan melalui :

- (1) Mempertahankan tingkat produksi tanaman pangan

Strategi b : *Meningkatkan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian*, dengan kebijakan yang dilaksanakan melalui :

- (1) Peningkatan kemampuan/ kualitas sdm pertanian serta menghidupkan dan memperkuat kelembagaan pertanian

Strategi c : *Pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat*, dengan kebijakan yang dilaksanakan melalui :

- (1) Memperkuat fungsi-fungsi pengawasan penyakit yang berhubungan dengan hewan
- (2) Meningkatkan produksi ternak
- (3) Penguatan dan perbaikan manajemen kesmavet, pasca panen dan pemasaran ternak
- (4) Peningkatan manajemen pemeliharaan ternak

Strategi d : *Pemenuhan pangan berupa ikan dan pengelolaan sumberdaya perikanan*, dengan kebijakan yang dilaksanakan melalui :

- (1) Peningkatan produksi perikanan dan kesehatan ikan
- (2) Penguatan dan perbaikan manajemen pasca panen dan pemasaran ikan

Sasaran 2 : Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai

Strategi e : *Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat*, dengan kebijakan yang dilaksanakan melalui :

- (1) Pengembangan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan, sistem distribusi dan stabilitas harga pangan

2. Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan **Misi Kedua : Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan di Kota Binjai**, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tujuan 2 : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian, peternakan, dan perikanan Kota Binjai

Sasaran 3 : Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar

Strategi f : *Meningkatkan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian*, dengan kebijakan yang dilaksanakan melalui :

- (1) Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil hortikultura ramah lingkungan serta pengembangan pemasaran hasil pertanian

Tujuan 3 : Meningkatkan upaya ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi di Kota Binjai

Sasaran 4 : Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai

Strategi g : *Menyediakan dan meningkatkan bahan baku bioindustri dan bioenergi*, dengan kebijakan yang dilaksanakan melalui :

- (1) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bahan baku bioenergi

3. Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan **Misi Ketiga** :
Mewujudkan kesejahteraan petani di Kota Binjai, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tujuan 4 : Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Binjai

Sasaran 5 : Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai

Strategi h : *Meningkatkan kesejahteraan petani*, dengan kebijakan yang dilaksanakan melalui :

(1) Peningkatan pendapatan petani

4. Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan **Misi Keempat** :
Mewujudkan reformasi birokrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang amanah dan profesional

Sasaran 6 : Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik

Strategi i : *Meningkatkan akuntabilitas aparatur dinas pertanian dan perikanan Kota Binjai*, dengan kebijakan yang dilaksanakan melalui :

(1) Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian

Penjabaran hubungan antara Strategi dan Kebijakan dari Tujuan dan Sasaran untuk pencapaian Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dapat terlihat pada gambar berikut :



**Tabel 25. Hubungan Antara Strategi dan Kebijakan Dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Sistem Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Menuju Binjai yang Sejahtera	1. Mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai	1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai	1. Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai	a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil produksi tanaman pangan serta menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian	1. Mempertahankan tingkat produksi tanaman pangan
				b. Meningkatkan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian	2. Peningkatan kemampuan/ kualitas sdm pertanian serta menghidupkan dan memperkuat kelembagaan pertanian
				c. Pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat	3. Memperkuat fungsi-fungsi pengawasan penyakit yang berhubungan dengan hewan
					4. Meningkatkan produksi ternak
					5. Penguatan dan perbaikan manajemen kesmavet, pasca panen dan pemasaran ternak
				d. Pemenuhan pangan berupa ikan dan pengelolaan sumberdaya perikanan	6. Peningkatan manajemen pemeliharaan ternak
					7. Peningkatan produksi perikanan dan kesehatan ikan
	2. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan di Kota Binjai	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian, peternakan, dan perikanan Kota Binjai	2. Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	e. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	8. Penguatan dan perbaikan manajemen pasca panen dan pemasaran ikan
					9. Pengembangan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengankaragaman konsumsi, keamanan pangan, sistem distribusi dan stabilitas harga pangan
					10. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil hortikultura ramah lingkungan serta pengembangan pemasaran hasil pertanian
					11. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bahan baku bioenergi
	3. Mewujudkan kesejahteraan petani di Kota Binjai	4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Binjai	5. Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	h. Meningkatkan kesejahteraan petani	12. Peningkatan pendapatan petani
	4. Mewujudkan reformasi birokrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang amanah dan profesional	6. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	i. Meningkatkan akuntabilitas aparatur dinas pertanian dan perikanan Kota Binjai	13. Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Pengantar : Kerangka Pendanaan SKPD

Dalam menjalankan pembangunan pertanian dan perikanan di Kota Binjai dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Sumber pendanaan tidak bisa hanya berasal dari APBD Kota Binjai, namun perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain diantaranya : Pemerintah Pusat berupa DAK, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan; Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupa APBD Sumatera Utara ataupun BDB; keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, investasi dalam negeri dan investasi asing, perbankan (skim kredit dan kredit komersial) serta dari swadaya masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan ICVAR (*Incremental Capital Value-Added Ratio*), untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian dan perikanan Kota Binjai guna mencapai target yang telah ditetapkan selama periode jangka waktu 2016-2021 adalah cukup besar, yaitu sekitar Rp 114 milyar lebih setiap tahunnya. Sebagian besar (85 - 90 %) merupakan pembiayaan yang bersumber dari swasta, perbankan, dan masyarakat. Sebagian kecil (sekitar 10-15 %) anggaran tersebut disediakan oleh pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD Kota Binjai.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja organisasi pelaksana (Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai) dalam memfasilitasi proses manajemen pembangunan pertanian dan perikanan Kota Binjai, maka harus didukung dengan sumber pendanaan APBD Kota Binjai, APBD Provinsi Sumatera Utara, dan atau APBN. Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk melaksanakan proses koordinasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.

a) Pendanaan Swasta dan Swadaya Masyarakat

Pendanaan swasta, baik yang bersumber dari kredit usaha komersial perbankan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) hendaknya dapat ditingkatkan melalui promosi investasi oleh instansi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai, instansi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, dan atau instansi Kementerian Pertanian dan Kementerian

Kelautan dan Perikanan. Promosi tersebut didasarkan pada potensi dan prospek pembangunan pertanian dan perikanan di Kota Binjai.

Kredit usaha komersial perbankan sepenuhnya tergantung pada kelayakan kredit setiap unit usaha. Prinsip yang harus dianut dalam pendanaan swasta adalah *public private partnership*, yaitu kerja sama usaha yang saling memperkuat, saling membesarkan, dan saling menguntungkan antara pihak industri dengan pihak petani dalam membentuk manajemen rantai pasokan (*supply chain management*).

Sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pertanian dan perikanan Kota Binjai adalah yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu bagian dari keuntungan usaha swasta dan BUMN/BUMD.

b) Pendanaan APBD Kota Binjai

Peran yang lebih besar dalam pembangunan pertanian dan perikanan Kota Binjai seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Binjai melalui APBD Kota Binjai (termasuk di dalamnya Dana Alokasi Khusus) yang diperuntukkan bagi : (1) penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian dan perikanan yang tidak diminati swasta dan tidak mampu dibangun dan dipelihara oleh masyarakat petani; (2) pengembangan kapasitas kelembagaan pelayanan dasar di bidang pertanian dan perikanan yang meliputi pelayanan pengembangan sumberdaya manusia, teknologi, permodalan, pasar, dan informasi pasar; dan (3) mengatasi hambatan dalam pemasaran produk pertanian dan perikanan.

Penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian dan perikanan Kota Binjai dari hulu sampai hilir meliputi : jaringan irigasi (kurang dari 1.000 ha untuk APBD Kota Binjai), sumur dalam (artesis), jaringan jalan produksi dan jalan pemasaran ke industri pengolahan, kebun bibit dasar/blok fondasi, balai inseminasi daerah, pusat perbibitan masyarakat, laboratorium sertifikasi benih/bibit, pos kesehatan hewan, sarana dan peralatan inseminasi buatan di daerah introduksi, peralatan pengolah tanah berkapasitas besar/traktor, kandang-kandang ternak komunal, pos pengawasan lalu lintas ternak (*check point*), padang penggembalaan dan kebun bibit hijauan makanan ternak, lantai jemur dan alat pengering (*drier*), Rumah Potong Hewan (RPH), Balai Benih Ikan (BBI), gudang/silo yang dilengkapi

pergudangan berpendingin ruangan, pasar ternak dan pasar komoditas lainnya, pusat promosi produk dan lain-lain.

Pengembangan kapasitas pelayanan dasar mencakup kelembagaan konsultasi; pendanaan; penyediaan sarana produksi (pupuk, media tanam, benih/bibit, pestisida, vaksin, obat hewan, alsin, pengolahan sederhana, kemasan); pelayanan teknologi, pengembangan sumber daya manusia/penyuluhan; proteksi hama dan penyakit/klinik kesehatan tanaman/hewan/ikan; sertifikasi produk; pengujian mutu produk; usaha produksi kelompok; koperasi; usaha produksi skala menengah dan besar; pasar dan informasi pasar, dan yang lainnya.

c) Pendanaan APBD Sumatera Utara

Dalam pembangunan pertanian dan perikanan Kota Binjai diharapkan juga ada peran dan kontribusi yang lebih dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui APBD Sumatera Utara (termasuk di dalamnya Bantuan Daerah Bawahan) yang diperuntukkan bagi : (1) penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian yang tidak diminati swasta dan tidak mampu dibangun dan dipelihara oleh masyarakat petani; (2) pengembangan kapasitas kelembagaan pelayanan dasar di bidang pertanian yang meliputi pelayanan pengembangan sumberdaya manusia, teknologi, permodalan, pasar dan informasi pasar; dan (3) mengatasi hambatan dalam pemasaran produk pertanian.

Penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian dan perikanan Kota Binjai dari hulu sampai hilir meliputi : jaringan irigasi (1.000-3.000 ha untuk APBD Sumatera Utara), sumur dalam (artesis), jaringan jalan produksi dan jalan pemasaran ke industri pengolahan, kebun bibit dasar/blok fondasi, balai inseminasi daerah, pusat perbibitan masyarakat, laboratorium serifikasi benih/bibit, pos kesehatan hewan, sarana dan peralatan inseminasi buatan di daerah introduksi, peralatan pengolah tanah berkapasitas besar/traktor, kandang-kandang ternak komunal, pos pengawasan lalu lintas ternak (*check point*), padang penggembalaan dan kebun bibit hijauan makanan ternak, rantai jemur dan alat pengering (*drier*), Rumah Potong Hewan (RPH), Balai Benih Ikan (BBI), gudang/silo yang dilengkapi pergudangan berpendingin ruangan, pasar ternak dan pasar komoditas lainnya, pusat promosi produk dan lain-lain.

Pengembangan kapasitas pelayanan dasar mencakup kelembagaan konsultasi; pendanaan; penyediaan sarana produksi (pupuk, media tanam,

benih/bibit, pestisida, vaksin, obat hewan, alsin, pengolahan sederhana, kemasan); pelayanan teknologi, pengembangan sumber daya manusia/penyuluhan; proteksi hama dan penyakit/klinik kesehatan tanaman/hewan; sertifikasi produk; pengujian mutu produk; usaha produksi kelompok; koperasi; usaha produksi skala menengah dan besar; pasar dan informasi pasar, dan yang lainnya.

d) Pendanaan APBN

Khusus kewenangan di bidang pertanian dan perikanan yang merupakan kewenangan pilihan, maka peran pemerintah pusat dapat diberikan melalui kerangka regulasi, pelayanan publik dan investasi. Investasi dalam bentuk APBN, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan sektor (K/L) hanya dimungkinkan pada urusan yang memang menjadi kewenangannya, seperti koordinasi perencanaan, pembinaan data dan statistik pertanian, perkarantinaan, penelitian dan pengembangan teknologi spesifik lokasi, pembangunan dan pemeliharaan daerah irigasi yang masih menjadi kewenangan Pemerintah, pengembangan sumberdaya manusia aparatur pertanian di provinsi yang bersifat strategis nasional, penyediaan bibit/benih, vaksin dan obat-obatan hewan yang bersifat lintas provinsi, pelayanan pengujian mutu alat mesin pertanian, pupuk, pestisida dan pakan ternak, subsidi bunga kredit/program, subsidi sarana produksi (terutama benih dan pupuk) kepada petani miskin berlahan sempit; fasilitasi bencana alam yang berstatus bencana nasional, serta proteksi impor dan promosi produk yang berorientasi ekspor.

Sekitar 30 persen dari APBN tahunan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan diupayakan akan dialokasikan untuk memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian atau perikanan yang dibiayai dari APBN. Jenis komoditas dan lokasi pengembangan kawasan ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Sedangkan sekitar 70 % dari APBN tahunan dekonsentrasi dan tugas pembantuan akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan pertanian atau perikanan agar sesuai dengan standar pelayanan teknis yang telah ditetapkan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).



5.2. Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Tabel 26. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi																		
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						Tahun 2021																	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp																
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)																
			2	01		Ketahanan Pangan dan Pertanian																																		
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang amanah dan profesional	6. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	2	01	01	Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggara-nya ketatausahaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, kerumah-tanggaan yang baik dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang pertanian	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai adalah 58.39	60.00	1,243,000,000	62.50	1,243,000,000	65.00	1,273,000,000	67.50	1,303,000,000	70.00	1,333,000,000	72.50	1,363,000,000	72.50	7,758,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai																	
			2	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		110,000,000		110,000,000		115,000,000		120,000,000		125,000,000		130,000,000		710,000,000		Binjai
			2	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik																	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		120,000,000		120,000,000		125,000,000		130,000,000		135,000,000		140,000,000		770,000,000		Binjai
			2	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000		Binjai
			2	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional																	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		900,000,000		Binjai
			2	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan																	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		70,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000		420,000,000		Binjai
			2	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor																	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		170,000,000		170,000,000		175,000,000		180,000,000		185,000,000		190,000,000		1,070,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			2	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		240,000,000		Binjai		
			2	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor		60,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000		75,000,000		80,000,000		410,000,000		Binjai
			2	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		50,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000		350,000,000		Binjai
			2	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		30,000,000		30,000,000		35,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000		230,000,000		Binjai
			2	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		450,000,000		Binjai
			2	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		120,000,000		Binjai
			2	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		210,000,000		Binjai
			2	01	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		150,000,000		Binjai
			2	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman		18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000		108,000,000		Binjai
			2	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		900,000,000		Luar daerah
2	01	01	19	Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pertanian, Peternakan, Perikanan	Terlaksananya Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pertanian, Peternakan, Perikanan		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000		Binjai			



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			2	01	01	20	Penyediaan Expose dan Penyusunan Laporan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Terlaksananya Penyediaan Expose dan Penyusunan Laporan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	120,000,000		Binjai			
			2	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	355,908,000		560,908,000	375,908,000	1,357,908,000	672,908,000	620,908,000	3,944,448,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai						
			2	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor		-	-	-	500,000,000	-	-	500,000,000		Binjai				
			2	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		-	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	600,000,000		Binjai				
			2	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		40,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	55,000,000	60,000,000	290,000,000		Binjai				
			2	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		30,000,000	30,000,000	35,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	230,000,000		Binjai				
			2	01	02	10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		151,308,000	151,308,000	151,308,000	151,308,000	151,308,000	151,308,000	907,848,000		Binjai				
			2	01	02	11	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	150,000,000		Binjai				
			2	01	02	12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	42,000,000		Binjai				
			2	01	02	13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor		15,100,000	15,100,000	15,100,000	15,100,000	15,100,000	15,100,000	90,600,000		Binjai				
			2	01	02	14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur		7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	45,000,000		Binjai				



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						Tahun 2021	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			2	01	02	15	Pembuatan Teralis, Pintu Besi, Pavling Blok , Sekat, Serta Kanopi Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Terlaksananya Pembuatan Teralis, Pintu Besi, Pavling Blok , Sekat, Serta Kanopi Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		-		-		-		182,000,000		182,000,000		-		364,000,000		Binjai
			2	01	02	16	Pembangunan Pagar dan Taman Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Terlaksananya Pembangunan Pagar dan Taman Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		-		-		-		85,000,000		85,000,000		-		170,000,000		Binjai
			2	01	02	17	Pengadaan Meubeler	Terpenuhihnya Kebutuhan Meubeler		10,000,000		15,000,000		20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		135,000,000		Binjai
			2	01	02	18	Pengadaan Sarana Perlengkapan Kerja Pimpinan Pertanian Kecamatan (PPK)	Terpenuhihnya Kebutuhan Sarana Perlengkapan Kerja Pimpinan Pertanian Kecamatan (PPK)		70,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000		420,000,000		Binjai
			2	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya peningkatan kualitas ketata-laksanaan dan kepegawaian		75,000,000		210,000,000		75,000,000		210,000,000		75,000,000		210,000,000		855,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
			2	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		-		50,000,000		-		50,000,000		-		50,000,000		150,000,000		Binjai
			2	01	03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Bagi Tenaga Peternakan/ Perikanan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Bagi Tenaga Peternakan/ Perikanan		-		20,000,000		-		20,000,000		-		20,000,000		60,000,000		Binjai
			2	01	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI/ Kemeja Putih	Terlaksananya Pengadaan Pakaian KORPRI/ Kemeja Putih				40,000,000				40,000,000				40,000,000		120,000,000		Binjai
			2	01	03	05	Pengadaan Pakaian Batik Tematik di Hari-Hari Tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Batik Tematik di Hari-Hari Tertentu		-		40,000,000		-		40,000,000		-		40,000,000		120,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			2	01	03	06	Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Sepatu Olah Raga	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Sepatu Olah Raga		75,000,000		-		75,000,000		-		75,000,000		-		225,000,000		Binjai
			2	01	03	07	Pengadaan Pakaian Khusus di Hari-Hari Tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus di Hari-Hari Tertentu		-		60,000,000		-		60,000,000		-		60,000,000		180,000,000		Binjai
			2	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		310,000,000		310,000,000		310,000,000		310,000,000		310,000,000		310,000,000		1,860,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
			2	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan SDM Perencanaan/ Keuangan/ Kepegawaian	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan SDM Perencanaan/ Keuangan/ Kepegawaian		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		120,000,000		Binjai
			2	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		90,000,000		Binjai
			2	01	05	03	Bimbingan Teknis/ Pembinaan Hukum Formulasi/ Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Pembinaan Hukum Formulasi/ Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000		Binjai/ Luar daerah
			2	01	05	04	Pelatihan Penyegaran Aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai (Outbond)	Terlaksananya Pelatihan Penyegaran Aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai (Outbond)		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		900,000,000		Binjai
			2	01	05	05	Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Terlaksananya Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		60,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			2	01	05	06	Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Terlaksananya Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		60,000,000		Binjai
			2	01	05	07	Penyusunan Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Terlaksananya Penyusunan Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		90,000,000		Binjai
			2	01	05	08	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		120,000,000		Binjai
			2	01	05	09	Pembuatan Buku Kerja	Terlaksananya Pembuatan Buku Kerja		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		120,000,000		Binjai
			2	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		312,450,500		297,450,500		310,450,500		317,450,500		324,450,500		346,450,500		1,908,703,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
			2	01	06	01	Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		45,000,000		Binjai
			2	01	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		45,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			2	01	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		45,000,000		Binjai		
			2	01	06	05	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		15,000,000								15,000,000		30,000,000		Binjai		
			2	01	06	06	Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Tersusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		60,000,000		Binjai		
			2	01	06	07	Survei dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Petani Terhadap Pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Terlaksananya Survei dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Petani Terhadap Pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		40,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		290,000,000		Binjai
			2	01	06	08	Pelaksanaan Pos Simpul Koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Terlaksananya Pos Simpul Koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai		100,000,000		100,000,000		108,000,000		110,000,000		112,000,000		114,000,000		644,000,000		Binjai
			2	01	06	09	Monitoring, Evaluasi Tahun Berjalan dan Penyusunan Rencana Pertanaman, Pengembangan Peternakan dan Perikanan Tahun Selanjutnya	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Tahun Berjalan dan Penyusunan Rencana Pertanaman, Pengembangan Peternakan dan Perikanan Tahun Selanjutnya		25,550,000		25,550,000		25,550,000		25,550,000		25,550,000		153,300,000		Binjai		
			2	01	06	10	Statistik Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Terlaksananya Statistik Pertanian, Peternakan, dan Perikanan		74,400,500		74,400,500		74,400,500		74,400,500		74,400,500		446,403,000		Binjai		



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi									
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						Tahun 2021								
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)							
			2	01	06	11	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai			25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		150,000,000		Binjai							
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Binjai	5. Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	a. Pendapatan per kapita petani (rupiah/ kapita/ bulan) b. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	2	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Petani	a. Pendapatan per kapita petani Kota Binjai sebesar Rp. 819.946,-/ kapita/ bulan b. Jumlah keluarga rawan pangan Kota Binjai sebanyak 12.219 keluarga	820,000	741,000,000	825,000	751,000,000	830,000	761,000,000	835,000	771,000,000	840,000	786,000,000	845,000	810,000,000	845,000	4,620,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai								
			2	01	15	01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis			12,150		50,000,000		12,100		55,000,000		12,050		60,000,000		12,000		65,000,000	11,950	75,000,000	11,900	80,000,000	11,900	385,000,000	Binjai
			2	01	15	02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis	Terlaksananya Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis					40,000,000				40,000,000				40,000,000				40,000,000		40,000,000		240,000,000	Binjai		
			2	01	15	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Tercapainya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani					50,000,000				50,000,000				50,000,000				50,000,000		50,000,000		300,000,000	Binjai		
			2	01	15	04	Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif Bagi Petani/ Kelompok Tani	Tercapainya Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif Bagi Petani/ Kelompok Tani					100,000,000				100,000,000				100,000,000				100,000,000		100,000,000		600,000,000	Binjai		
			2	01	15	05	Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur					60,000,000				60,000,000				60,000,000				60,000,000		60,000,000		360,000,000	Binjai		
			2	01	15	06	Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Bagi Kelompok Tani	Terlaksananya Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Bagi Kelompok Tani					156,000,000				156,000,000				156,000,000				156,000,000		156,000,000		160,000,000		940,000,000	Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						Tahun 2021				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
			2	01	15	07	Pembuatan Saung di 4 Kecamatan	Terlaksananya Pembuatan Saung di 4 Kecamatan		195,000,000		195,000,000		195,000,000		195,000,000		195,000,000		200,000,000		1,175,000,000		Binjai			
			2	01	15	08	Pemberdayaan Bagi Kontak Bengkel Zahara di Kelurahan Jati Utomo	Terlaksananya Pemberdayaan Bagi Kontak Bengkel Zahara di Kelurahan Jati Utomo		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		35,000,000		185,000,000		Binjai			
			2	01	15	09	Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)		60,000,000		65,000,000		70,000,000		75,000,000		80,000,000		85,000,000		435,000,000		Binjai			
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai	2. Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	a. Skor Pola Pangan Harapan	2	01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Tercapainya Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	a. Skor Pola Pangan Harapan Kota Binjai sebesar 75,5	76.5	2,385,032,000	77.5	2,410,032,000	78.5	2,581,000,000	79.5	2,776,500,000	80.5	2,948,500,000	81.5	3,129,500,000	81.5	16,230,564,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai			
			b. Konsumsi kalori (kkal/ kapita/ hari)	2	01	16	01	Pembentukan dan Pembinaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Binjai		Tercapainya peningkatan cadangan pangan masyarakat	1,650	100,000,000	1,700	100,000,000	1,750	100,000,000	1,800	100,000,000	1,850	100,000,000	1,900	100,000,000	1,900	600,000,000		Binjai	
		c. Penurunan konsumsi beras (kg/ kapita/ tahun)		2	01	16	02	Pembinaan dan Pengembangan Aksi Desa Mandiri Pangan (Demapan) di Kota Binjai			c. Konsumsi beras rata-rata Kota Binjai sebesar 121 kg/ kapita/ tahun	120	47,000,000	119	47,000,000	118	50,000,000	117	60,000,000	116	70,000,000	115	80,000,000	115	354,000,000		Binjai
				2	01	16	03	Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Bantuan Sosial Rawan Pangan				90,000,000	95,000,000	100,000,000	150,000,000	200,000,000	250,000,000	885,000,000		Binjai							
				2	01	16	04	Pembuatan Peta Rawan Pangan Kota Binjai Melalui FSVA				100,000,000	105,000,000	110,000,000	115,000,000	120,000,000	125,000,000	675,000,000		Binjai							
				2	01	16	05	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Kota Binjai				50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000	75,000,000	375,000,000		Binjai							
				2	01	16	06	Pelatihan Kader Pangan				65,000,000	65,000,000	75,000,000	85,000,000	90,000,000	110,000,000	490,000,000		Binjai							
				2	01	16	07	Survei Variabel Teknis Ketahanan Pangan Kota Binjai				34,500,000	34,500,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000	319,000,000		Binjai							



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			2	01	16	08	Pendataan Variabel Ketahanan Pangan Kota Binjai		17,000,000		17,000,000		17,000,000		17,000,000		17,000,000		17,000,000		102,000,000		Binjai
			2	01	16	09	Posko Ketahanan Pangan Kota Binjai		100,000,000		100,000,000		105,000,000		110,000,000		115,000,000		120,000,000		650,000,000		Binjai
			2	01	16	10	Pembinaan Program Percepatan Peng-anekargaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kota Binjai		83,000,000		83,000,000		118,000,000		120,000,000		125,000,000		130,000,000		659,000,000		Binjai
			2	01	16	11	Bantuan pada Kelompok Percepatan Peng-anekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)		120,000,000		125,000,000		130,000,000		135,000,000		140,000,000		145,000,000		795,000,000		Binjai
			2	01	16	12	Percepatan Peng-anekaragaman Konsumsi Pangan Kota Binjai Pendampingan KRPL Tahap Pengembangan		115,500,000		120,500,000		125,500,000		130,500,000		135,500,000		140,500,000		768,000,000		Binjai
			2	01	16	13	Pembinaan dan Pemanfaatan Lahan Pekarangan		82,000,000		82,000,000		90,000,000		95,000,000		101,000,000		108,000,000		558,000,000		Binjai
			2	01	16	14	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sekolah		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000		Binjai
			2	01	16	15	Pemberdayaan dan Pelatihan Pangan Alternatif/ Pangan Lokal		84,500,000		84,500,000		87,000,000		98,000,000		110,000,000		115,000,000		579,000,000		Binjai
			2	01	16	16	Pembinaan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Tercapainya peningkatan peng-anekaragaman konsumsi pangan dan gizi	46,550,000		46,550,000		50,500,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000		338,600,000		Binjai
			2	01	16	17	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan		30,000,000		30,000,000		51,000,000		80,000,000		90,000,000		100,000,000		381,000,000		Binjai
			2	01	16	18	Sosialisasi dan Survei Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)		45,000,000		45,000,000		49,000,000		53,000,000		57,000,000		61,000,000		310,000,000		Binjai
			2	01	16	19	Pendataan Analisa Pola Pangan Harapan Pangan (PPH) Kota Binjai		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi																	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021																						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)																	
			2	01	16	20	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Tingkat Kota Binjai																																
			2	01	16	21	Mengikuti Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Tingkat Provinsi																																
			2	01	16	22	Parade Makanan Tradisional Berbagai Etnik di Kota Binjai																																
			2	01	16	23	Demonstasi Olah Pangan Lokal																																
			2	01	16	24	Kampanye dan Promosi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman																																
			2	01	16	25	Survei Pasokan Pangan dan Cadangan Pangan																																
			2	01	16	26	Penyediaan Cadangan Makanan																																
			2	01	16	27	Survei Harga Pangan																																
			2	01	16	28	Pendataan Harga Pasar																																
2	01	16	29	Penguatan Sistem Distribusi Pangan dan Stabilitas Harga Pangan																																			
2	01	16	30	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Bidang Ketahanan Pangan																																			
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian, peternakan, dan perikanan Kota Binjai	3. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	a. Produksi rambutan (ton)	2	01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Tercapainya Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	a. Produksi rambutan sebesar 473 ton	500	610,000,000	525	625,000,000	550	667,500,000	575	710,000,000	600	752,500,000	625	795,000,000	625	4,160,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai																
			2	01	17	01	Pekan Pasar Petani di Provinsi Sumatera Utara	Keikutsertaan dalam Pekan Pasar Petani di Provinsi Sumatera Utara	b. Produksi jambu air sebesar 122 ton	130	40,000,000	140	40,000,000	150	45,000,000	170	50,000,000	180	55,000,000	190	60,000,000	190	290,000,000		Luar daerah														



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		c. Produksi bengkuang (ton) d. Produksi cabe besar (ton) e. Produksi jamur (kuintal) f. Produksi anggrek (tangkai)	201702	Pameran Agro and Food Tingkat Nasional	Keikutsertaan dalam Pameran Agro and Food Tingkat Nasional	c. Produksi bengkuang sebesar 970 ton	1,070	80,000,000	1,170	80,000,000	1,270	90,000,000	1,370	100,000,000	1,470	110,000,000	1,570	120,000,000	1,570	580,000,000		Luar daerah
			201703	Festival Hortikultura Tingkat Nasional	Keikutsertaan dalam Festival Hortikultura Tingkat Nasional	d. Produksi cabe besar sebesar 185 ton	200	125,000,000	225	125,000,000	250	137,500,000	275	150,000,000	300	162,500,000	325	175,000,000	325	875,000,000		Luar daerah
			201704	Pameran Produk Unggulan Pertanian Tingkat Provinsi	Keikutsertaan dalam Pameran Produk Unggulan Pertanian Tingkat Provinsi	e. Produksi jamur sebesar 0,10 kuintal	0.20	45,000,000	0.30	50,000,000	0.40	55,000,000	0.50	60,000,000	0.60	65,000,000	0.70	70,000,000	0.70	345,000,000		Luar daerah
			201705	Mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara		f. Produksi anggrek sebesar 1.640 tangkai	1,700	35,000,000	1,750	40,000,000	1,800	45,000,000	1,850	50,000,000	1,900	55,000,000	1,950	60,000,000	1,950	285,000,000		Luar daerah
			201806	Pameran Produk Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan	Keikutsertaan dalam Pameran Produk Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan			150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		900,000,000		Luar daerah
			201707	Pameran Produk Unggulan Pertanian Tingkat Nasional	Keikutsertaan dalam Pameran Produk Unggulan Pertanian Tingkat Nasional			85,000,000		90,000,000		95,000,000		100,000,000		105,000,000		110,000,000		585,000,000		Luar daerah
			201708	Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian yang Akan Dipasarkan	Terlaksananya Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian yang akan dipasarkan			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000		Binjai
			2018	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Tercapainya Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Guna Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil yang Ramah Lingkungan			2,840,930,700		2,771,430,700		3,142,282,000		3,368,000,000		3,672,000,000		3,963,500,000		19,758,143,400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
			201801	Pengembangan Budidaya Tanaman Buah Buahan				70,000,000		70,000,000		75,000,000		80,000,000		85,000,000		90,000,000		470,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			2 01 18 02	Pengelolaan BPMT Rambutan	Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk frutikultura berkelanjutan			63,000,000		63,000,000		65,000,000		66,000,000		71,500,000		77,000,000		405,500,000		Binjai
			2 01 18 03	Pengelolaan Kebun Pohon Induk Hortikultura Buah Buahan				126,000,000		126,000,000		130,000,000		150,000,000		162,000,000		175,000,000		869,000,000		Binjai
			2 01 18 04	Pengembangan Penangkar Tanaman Buah-Buahan				45,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000		345,000,000		Binjai
			2 01 18 05	Pelatihan Teknologi Budidaya Jambu Deli Hijau				70,000,000		70,000,000		84,000,000		89,000,000		94,000,000		99,000,000		506,000,000		Binjai
			2 01 18 06	Pelatihan Teknologi Budidaya Rambutan Brahrang				51,930,700		51,930,700		60,930,700		65,000,000		70,000,000		75,000,000		374,792,100		Binjai
			2 01 18 07	Pelatihan dan Demplot Tanaman Buah Naga				75,000,000		75,000,000		80,000,000		85,000,000		90,000,000		100,000,000		505,000,000		Binjai
			2 01 18 08	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Bengkuang	Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk olerikultura berkelanjutan			75,000,000		75,000,000		82,500,000		90,000,000		97,500,000		105,000,000		525,000,000		Binjai
			2 01 18 09	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Cabai Merah				25,000,000		25,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		280,000,000		Binjai
			2 01 18 10	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Sayuran Organik				75,000,000		75,000,000		82,500,000		90,000,000		97,500,000		105,000,000		525,000,000		Binjai
			2 01 18 11	Demonstrasi Plot (Demplot) Holtikultura Komoditi Cabai dan Bawang Merah				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		600,000,000		Binjai
			2 01 18 12	Pengembangan Tanaman Bawang Merah Dataran Rendah				50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000		75,000,000		375,000,000		Binjai
			2 01 18 13	Pengembangan Tanaman Cabai Merah				50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000		75,000,000		375,000,000		Binjai
			2 01 18 14	Pengembangan Budidaya Tanaman Sayuran				70,000,000		70,000,000		75,000,000		80,000,000		85,000,000		90,000,000		470,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			2	01	18	15	Pelatihan Teknologi Budidaya Jamur Tiram			25,000,000		25,000,000		42,851,300		47,000,000		52,000,000		57,000,000		248,851,300		Binjai
			2	01	18	16	Pengembangan Budidaya Jamur			85,000,000		85,000,000		93,500,000		102,000,000		110,500,000		119,000,000		595,000,000		Binjai
			2	01	18	17	Pelatihan dan Demplot Tanaman Hidroponik			60,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000		75,000,000		80,000,000		410,000,000		Binjai
			2	01	18	18	Pengembangan Tanaman Hidroponik			150,000,000		150,000,000		165,000,000		180,000,000		195,000,000		200,000,000		1,040,000,000		Binjai
			2	01	18	19	Pengadaan Benih Sayuran			25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		30,000,000		155,000,000		Binjai
			2	01	18	20	Pengembangan Budidaya Tanaman Hias	tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan		125,000,000		125,000,000		138,000,000		138,000,000		138,000,000		149,500,000		813,500,000		Binjai
			2	01	18	21	Operasional Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman Hias			65,000,000		65,000,000		65,000,000		65,000,000		65,000,000		65,000,000		390,000,000		Binjai
			2	01	18	22	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tanaman Buah Buahan	Terlaksananya pengembangan perlindungan tanaman hortikultura		75,000,000		75,000,000		78,000,000		81,000,000		84,000,000		87,000,000		480,000,000		Binjai
			2	01	18	23	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tanaman Sayur-Sayuran			50,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000		350,000,000		Binjai
			2	01	18	24	Perlindungan Varietas Tanaman Hortikultura			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000		Binjai
			2	01	18	25	Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura			100,000,000		100,000,000		110,000,000		120,000,000		130,000,000		140,000,000		700,000,000		Binjai
			2	01	18	26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Pengembangan Hortikultura			150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		155,000,000		905,000,000		Binjai
			2	01	18	27	Pengembangan Budidaya Serai Wangi	Terlaksananya Pengembangan Budidaya Serai Wangi		95,000,000		100,000,000		150,000,000		200,000,000		250,000,000		300,000,000		1,095,000,000		Binjai
			2	01	18	28	Pengembangan Budidaya Organik	Terlaksananya Pengembangan Budidaya Organik		100,000,000		10,500,000		110,000,000		115,000,000		200,000,000		250,000,000		785,500,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						Tahun 2021		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			2	01	18	29	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada UPTD Perbenihan dan Mata Tempel	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada UPTD Perbenihan dan Mata Tempel		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		150,000,000		Binjai	
3. Meningkatkan upaya ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi di Kota Binjai	4. Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai	a. Produksi ubi kayu (ton) b. Produksi ubi jalar (ton) c. Produksi jahe (kuintal) d. Produksi kunyit (kuintal) e. Produksi temulawak (kuintal) f. Jumlah instalasi biogas (unit)	2	01	18	23	Pengembangan Budidaya Tanaman Ubi	Tercapainya peningkatan produksi tanaman palawija berupa ubi guna penyediaan bahan baku bioindustri	a. Produksi ubi kayu sebesar 2.600 ton b. Produksi ubi jalar sebesar 756 ton c. Produksi jahe sebesar 2,35 kuintal d. Produksi kunyit sebesar 0,76 kuintal e. Produksi temulawak sebesar 1,49 kuintal f. Jumlah instalasi biogas sebanyak 10 unit	2,650	100,000,000	2,700	100,000,000	2,750	110,000,000	2,800	120,000,000	2,850	130,000,000	2,900	140,000,000	2,900	700,000,000		Binjai
			2	01	18	24	Pengadaan Bibit Tanaman Ubi Unggul			800	50,000,000	850	50,000,000	900	55,000,000	950	60,000,000	1000	65,000,000	1050	70,000,000	1050	350,000,000		Binjai
			2	01	18	25	Pengembangan Budidaya Tanaman Biofarmaka	Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk biofarmaka berkelanjutan guna penyediaan bahan baku bioindustri		2.50	100,000,000	2.75	100,000,000	3.00	110,000,000	3.25	120,000,000	3.50	130,000,000	3.75	140,000,000	3.75	700,000,000		Binjai
			2	01	18	26	Pengadaan Bibit Tanaman Biofarmaka			1.00	50,000,000	1.25	50,000,000	1.5	55,000,000	1.75	60,000,000	2	65,000,000	2.25	70,000,000	2.25	350,000,000		Binjai
			2	01	18	27	Pelatihan Teknologi Budidaya Tanaman Biofarmaka			1.75	75,000,000	2.00	75,000,000	2.25	80,000,000	2.50	85,000,000	2.75	90,000,000	3.00	100,000,000	3.00	505,000,000		Binjai
			2	01	18	28	Pelatihan Teknologi Pembuatan Biogas	Terlaksananya pemanfaatan produk samping hasil ternak sebagai bahan baku bioenergi		12	90,000,000	14	90,000,000	16	100,000,000	17	105,000,000	18	110,000,000	20	115,000,000	20	610,000,000		Binjai
			2	01	18	29	Pembuatan Instalasi Biogas Bersumber Dari Kotoran Sapi				250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		1,500,000,000		Binjai
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai	1. Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai di Kota Binjai	a. Produksi padi (ton) b. Produksi jagung (ton) c. Produksi kedelai (ton)	2	01		19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Tercapainya Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	a. Produksi padi sebesar 18.500 ton b. Produksi jagung sebesar 7.042 ton c. Produksi kedelai sebesar 8,8 ton	19,000	5,279,000,000	19,500	5,269,000,000	20,000	5,590,000,000	20,500	5,362,000,000	21,000	5,384,000,000	21,500	5,666,000,000	21,500	32,550,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
			2	01		01	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi			7,100	26,000,000	7,150	26,000,000	7,200	30,000,000	7,250	35,000,000	7,300	40,000,000	7,350	45,000,000	7,350	202,000,000		Binjai
			2	01		02	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Jagung	Tercapainya peningkatan kapasitas teknis pertanian		10	25,000,000	15	25,000,000	20	30,000,000	25	35,000,000	30	40,000,000	35	45,000,000	35	200,000,000		Binjai
			2	01		03	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Kedelai				25,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		40,000,000		45,000,000		200,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			2	01	19	04	Demonstrasi Plot (Demplot) Komoditi Padi/ Jagung/ Kedelai	Terlaksananya penerapan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		360,000,000		Binjai
			2	01	19	05	Pencegahan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan			75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		78,000,000		453,000,000		Binjai
			2	01	19	06	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tanaman Pajale (Padi, Jagung, Kedelai)			35,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		285,000,000		Binjai
			2	01	19	07	Pengadaan Pestisida			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		55,000,000		305,000,000		Binjai
			2	01	19	08	Pelatihan Penggunaan Pestisida Dari Tingkat Kelompok Tani			35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		40,000,000		215,000,000		Binjai
			2	01	19	09	Pelatihan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)			70,000,000		70,000,000		75,000,000		80,000,000		85,000,000		90,000,000		470,000,000		Binjai
			2	01	19	10	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		600,000,000		Binjai
			2	01	19	11	Sosialisasi dan Pemanfaatan Kalender Tanam Bagi Kelompok Tani			15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		20,000,000		95,000,000		Binjai
			2	01	19	12	Revitalisasi Penggilingan Padi	Terlaksananya penanganan pasca panen tanaman pangan		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		600,000,000		Binjai
			2	01	19	13	Pengadaan Alat Penggiling Padi			-		-		100,000,000		-		-		-		100,000,000		Binjai
			2	01	19	14	Pembangunan Kilang Padi			-		-		200,000,000		-		-		-		200,000,000		Binjai
			2	01	19	15	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Bidang Pertanian	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Bidang Pertanian		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		150,000,000		Binjai
			2	01	19	16	Pendataan Perkembangan Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering Kota Binjai			15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		20,000,000		95,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			2	01	19	17	Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		50,000,000									50,000,000		100,000,000		Binjai	
			2	01	19	18	Pemanfaatan dan Pencetakan Lahan Baku Sawah Baru 10 Hektar Per Tahun		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		1,500,000,000		Binjai
			2	01	19	19	Optimasi Lahan 100 Hektar Per Tahun		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		1,200,000,000		Binjai
			2	01	19	20	Penambahan Lahan Kering 10 Hektar Per Tahun Untuk Kedelai dan Jagung Serta Untuk Produk Pertanian Lainnya		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		900,000,000		Binjai
			2	01	19	21	Pemanfaatan Lahan Terlantar		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		600,000,000		Binjai
			2	01	19	22	Penerapan Pola Tumpangsari		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000		Binjai
			2	01	19	23	Pemuliaan Kesuburan Lahan Sawah di Kota Binjai		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		30,000,000		155,000,000		Binjai
			2	01	19	24	Analisa Unsur Hara Pada Lahan Sawah		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000		132,000,000		Binjai
			2	01	19	25	Analisa Unsur Hara Pada Lahan Kering		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000		132,000,000		Binjai
			2	01	19	26	Pelatihan Uji Unsur Hara Tanah Bagi Kelompok Tani		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		40,000,000		215,000,000		Binjai
			2	01	19	27	Penyusunan Perda Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Binjai		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		720,000,000		Binjai
			2	01	19	28	Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan		180,000,000		180,000,000		180,000,000		180,000,000		180,000,000		180,000,000		1,080,000,000		Binjai
			2	01	19	29	Penyusunan Perencanaan dan Konservasi Lahan Pertanian		-		25,000,000		-		25,000,000		-		25,000,000		75,000,000		Binjai
			2	01	19	30	Pemberian Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Binjai		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		1,800,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						Tahun 2021		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			2	01	19	31	Pembuatan Jaringan Irigasi Bagi Kelompok Tani	Terlaksananya pengelolaan air irigasi untuk pertanian			500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		3,000,000,000		Binjai
			2	01	19	32	Pengadaan Benih Padi	Terlaksananya pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan			170,000,000		170,000,000		170,000,000		170,000,000		170,000,000		200,000,000		1,050,000,000		Binjai
			2	01	19	33	Pengembangan Benih Padi				60,000,000		70,000,000		80,000,000		90,000,000		100,000,000		110,000,000		510,000,000		Binjai
			2	01	19	34	Pengadaan Benih Jagung				150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		200,000,000		950,000,000		Binjai
			2	01	19	35	Pengadaan Benih Kedelai				50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000		Binjai
			2	01	19	36	Pembangunan Desa Mandiri Benih				200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		1,200,000,000		Binjai
			2	01	19	37	Pelatihan Penangkar Padi Bagi Kelompok Tani				45,000,000		45,000,000		45,000,000		45,000,000		45,000,000		50,000,000		275,000,000		Binjai
			2	01	19	38	Bantuan Langsung Pupuk Bagi Petani	Terlaksananya pengelolaan pupuk			15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		20,000,000		95,000,000		Binjai
			2	01	19	39	Pengembangan Pupuk Organik				23,000,000		23,000,000		25,000,000		27,000,000		29,000,000		31,000,000		158,000,000		Binjai
			2	01	19	40	Pengadaan Bantuan Pupuk Organik Cair Bagi Petani				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		600,000,000		Binjai
			2	01	19	41	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos				40,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		290,000,000		Binjai
			2	01	19	42	Pembinaan Kepada Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi				25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		30,000,000		155,000,000		Binjai
			2	01	19	43	Monitoring Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi dan Non Subsidi serta Obat-Obatan Pesticida				23,000,000		23,000,000		23,000,000		23,000,000		23,000,000		30,000,000		145,000,000		Binjai
			2	01	19	44	Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida (KP3)				193,000,000		193,000,000		198,000,000		203,000,000		208,000,000		213,000,000		1,208,000,000		Binjai
			2	01	19	45	Penyusunan RDKK				22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000		25,000,000		135,000,000		Binjai
			2	01	19	46	Pengadaan Sumur Bor				45,000,000		45,000,000		45,000,000		45,000,000		45,000,000		45,000,000		270,000,000		Binjai
2	01	19	47	Pengadaan Pompa Air		65,000,000			65,000,000		65,000,000		65,000,000		65,000,000		65,000,000		390,000,000		Binjai				
2	01	19	48	Pengadaan Mesin Choper			120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		720,000,000		Binjai				



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			2 01 19 49	Pengadaan Handtractor	Terlaksananya pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian			150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		900,000,000		Binjai		
			2 01 19 50	Pengadaan Power Thereser				100,000,000				100,000,000				100,000,000				100,000,000		600,000,000		Binjai
			2 01 19 51	Pengadaan Alat Hammer Mild				120,000,000				120,000,000				120,000,000				120,000,000		720,000,000		Binjai
			2 01 19 52	Pelatihan Penggunaan Alsintan (TR2) Bagi Kelompok Tani di Kota Binjai				40,000,000				40,000,000				40,000,000				40,000,000		240,000,000		Binjai
			2 01 19 53	Pelatihan Penggunaan Alat Destilasi Bagi Kelompok Usaha Wanita Tani				55,000,000				55,000,000				55,000,000				60,000,000		335,000,000		Binjai
			2 01 19 54	Pengadaan Sarana dan Prasarana Padi Bagi Kelompok Penangkar	Terlaksananya dukungan peralatan pasca panen			198,000,000		198,000,000		198,000,000		198,000,000		200,000,000		1,190,000,000		Binjai				
			2 01 19 55	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan				100,000,000		100,000,000		100,000,000		105,000,000		605,000,000		Binjai						
			2 01 19 56	Pengadaan Mobil Pick Up				165,000,000		165,000,000		165,000,000		170,000,000		995,000,000		Binjai						
			2 01 19 57	Pengadaaan Kendaraan Roda 3			120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		125,000,000		725,000,000		Binjai					
			2 01 19 58	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan	Terlaksananya Pelayanan Pembiayaan Pertanian			200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		1,200,000,000		Binjai				
			2 01 19 59	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Bidang Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Bidang Sarana dan Prasarana			25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		150,000,000		Binjai				
			2 01 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Terlaksananya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan			1,259,132,400		1,329,132,400		1,179,132,400		1,354,000,000		1,499,000,000		1,369,000,000		7,989,397,200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai			
			2 01 20 01	Pertemuan BPP	Terlaksananya pemantapan sistem penyuluhan pertanian			90,000,000		90,000,000		95,000,000		100,000,000		105,000,000		110,000,000		590,000,000		Binjai		
			2 01 20 02	Rembug Organisasi Pertanian				45,000,000		45,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		320,000,000		Binjai		
			2 01 20 03	Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kota Binjai				50,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000		350,000,000		Binjai		



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			2	01	20	04	Rembug Madya KTNA Nasional				70,000,000					75,000,000				145,000,000		Luar daerah
			2	01	20	05	Expo KTNA Nasional		60,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000	75,000,000		80,000,000		410,000,000	Luar daerah	
			2	01	20	06	Pertemuan Evaluasi Lakususi	40,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	55,000,000	60,000,000	290,000,000	Binjai							
			2	01	20	07	Pertemuan Tim Angka Kredit Point	45,000,000	45,000,000	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	320,000,000	Binjai							
			2	01	20	08	Pelatihan Pengisian DUPAK dan PAK Bagi Penyuluh	50,000,000	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000	350,000,000	Binjai							
			2	01	20	09	Jambore Penyuluh Tingkat Provinsi	75,000,000	75,000,000	80,000,000	85,000,000	90,000,000	95,000,000	500,000,000	Luar daerah							
			2	01	20	10	Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi	80,000,000	80,000,000		95,000,000			255,000,000	Luar daerah							
			2	01	20	11	Pekan Nasional (PENAS) Tingkat Nasional	90,000,000	90,000,000			110,000,000		290,000,000	Luar daerah							
			2	01	20	12	Demplot Komoditi Pertanian	85,000,000	85,000,000	89,000,000	94,000,000	99,000,000	104,000,000	556,000,000	Binjai							
			2	01	20	13	Pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Tanaman Hias	57,066,200	57,066,200	80,066,200	85,000,000	90,000,000	95,000,000	464,198,600	Binjai							
			2	01	20	14	Pembinaan Kelompok Pertanian, Perikanan, Peternakan	57,066,200	57,066,200	80,066,200	110,000,000	115,000,000	120,000,000	539,198,600	Binjai							
			2	01	20	15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	900,000,000	Binjai							
			2	01	20	16	Pengadaaan Peralatan Kantor Bagi Penyuluh	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	360,000,000	Binjai							
			2	01	20	17	Pengadaan Sepeda Motor Bagi Penunjang Kerja Penyuluh Pertanian	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1,200,000,000	Binjai							
			2	01	20	18	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Bidang Penyuluhan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	150,000,000	Binjai							



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai	1. Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai	d. Produksi ternak, berupa : ► Produksi daging (ton) ► Produksi telur (ton) ► Produksi susu (liter) ► Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di RPH (%)	2	01	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulan-an Penyakit Ternak		545,000,000		545,000,000		555,000,000		570,000,000		580,000,000		595,000,000		3,390,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai			
			2	01	21 01	Gerakan Binjai Bebas Penyakit Rabies	Terlaksananya penanganan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	700	100,000,000	725	100,000,000	750	100,000,000	775	100,000,000	800	100,000,000	825	100,000,000	825	600,000,000		Binjai		
			2	01	21 02	Gerakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Flu Burung dan ND		9,100	100,000,000	9,200	100,000,000	9,300	100,000,000	9,400	100,000,000	9,500	100,000,000	9,600	100,000,000	9,600	600,000,000		Binjai		
			2	01	21 03	Pengobatan Massal Pada Ternak Domba/Kambing		20,500	35,000,000	21,000	35,000,000	21,500	35,000,000	22,000	35,000,000	22,500	35,000,000	23,000	35,000,000	23,000	210,000,000		Binjai		
			2	01	21 04	Penyuluhan Penyakit Domba/ Kambing		57.00	35,000,000	58.00	35,000,000	59.00	40,000,000	60.00	45,000,000	61.00	50,000,000	62.00	55,000,000	62.00	260,000,000		Binjai		
			2	01	21 05	Penyuluhan Penyakit Sapi			50,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000		350,000,000		Binjai		
			2	01	21 06	Pengadaan Obat-Obatan dan Vitamin Ternak			150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		900,000,000		Binjai		
			2	01	21 07	Pengawasan Peredaran Obat-Obatan dan Pakan Ternak			75,000,000		75,000,000		75,000,000		80,000,000		80,000,000		85,000,000		470,000,000		Binjai		
			2	01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Tercapainya Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		1,295,000,000		1,325,000,000		1,355,000,000		1,385,000,000		1,445,000,000		1,500,000,000		8,305,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai			
			2	01	22 01	Peningkatan Mutu Ternak Melalui Inseminasi Buatan	Tercapainya peningkatan produktivitas ternak		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		900,000,000		Binjai
			2	01	22 02	Pengadaan Ternak Pejantan Unggul			150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		900,000,000		Binjai		
			2	01	22 03	Kampanye dan Sosialisasi Pengendalian Betina Produktif			15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		90,000,000		Binjai		
			2	01	22 04	Pengembangan Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		150,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						Tahun 2021		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			2	01	22	05	Pengembangan Pakan Ternak Olahan/ Bahan Pakan Ternak	pengembangan pakan ternak			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000		Binjai
			2	01	22	06	Bantuan Ternak Sapi Pada Kelompok Ternak			450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		2,700,000,000		Binjai	
			2	01	22	07	Bantuan Ternak Domba/Kambing Pada Kelompok Ternak			80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		100,000,000		100,000,000		520,000,000		Binjai	
			2	01	22	08	Bantuan Ternak Kelinci Pada Kelompok Ternak			75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		85,000,000		85,000,000		470,000,000		Binjai	
			2	01	22	09	Bantuan Bibit Ternak Bebek	Terlaksananya penyediaan bibit ternak		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	450,000,000	Binjai				
			2	01	22	12	Bantuan Percontohan Itik Pertelur			100,000,000	125,000,000	150,000,000	175,000,000	200,000,000	250,000,000	1,000,000,000	Binjai								
			2	01	22	10	Bantuan dan Kampanye Sistem Ternak Unggas di Perkotaan			50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000	75,000,000	375,000,000	Binjai								
			2	01	22	10	Bantuan Bibit Ternak Unggas dan Aneka Ternak			75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	450,000,000	Binjai								
			2	01	23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tercapainya Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		1,310,000,000	1,310,000,000	1,360,000,000	1,410,000,000	1,510,000,000	1,610,000,000	8,510,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai								
			2	01	23	01	Operasional RPH Kota Binjai			200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1,200,000,000	Binjai								
			2	01	23	02	Peningkatan Kualitas Jalan dan Tempat Parkir di RPH Sapi	Tercapainya penguatan dan perbaikan manajemen Rumah Potong Hewan (RPH)		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1,200,000,000	Binjai								
			2	01	23	03	Rehab RPH Babi Kota Binjai	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	360,000,000	Binjai									
			2	01	23	04	Pengadaan Sarana RPH Kota Binjai	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000	150,000,000	200,000,000	750,000,000	Binjai									
			2	01	23	05	Pengembangan RPH Kota Binjai	150,000,000		150,000,000	200,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	1,400,000,000	Binjai									
			2	01	23	06	Sosialisasi Daging yang ASUH dan RPH Sapi Kota Binjai	Terlaksananya penerapan penjaminan		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	600,000,000	Binjai									



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			2	01	23	07	Monitoring dan Pengawasan Pemotongan Ternak Pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Qurban		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		600,000,000		Binjai
			2	01	23	08	Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		600,000,000		Binjai
			2	01	23	09	Operasional Pasar Hewan Kota Binjai		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		600,000,000		Binjai
			2	01	23	10	Gerakan Penilaian Kelompok Ternak Terbaik Kota Binjai		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		600,000,000		Binjai
			2	01	23	11	Gerakan Kontes Ternak Kota Binjai		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		600,000,000		Binjai
			2	01	24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		783,000,000		783,000,000		819,000,000		844,000,000		869,000,000		894,000,000		4,992,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
			2	01	24	01	Kampanye Sistem Beternak Perkotaan		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		1,500,000,000		Binjai
			2	01	24	02	Pelatihan Teknologi Budidaya Sapi		90,000,000		90,000,000		93,000,000		98,000,000		103,000,000		108,000,000		582,000,000		Binjai
			2	01	24	03	Pelatihan Teknologi Budidaya Domba/Kambing		80,000,000		80,000,000		93,000,000		98,000,000		103,000,000		108,000,000		562,000,000		Binjai
			2	01	24	04	Pelatihan Teknologi Budidaya Kelinci		58,000,000		58,000,000		68,000,000		73,000,000		78,000,000		83,000,000		418,000,000		Binjai
			2	01	24	05	Pengembangan Budidaya Ternak Perah		80,000,000		80,000,000		85,000,000		90,000,000		95,000,000		100,000,000		530,000,000		Binjai
			2	01	24	06	Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak		50,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000		350,000,000		Binjai
			2	01	24	07	Peningkatan Kualitas SDM Peternakan Dengan Pelatihan Pengolahan Pasca Panen Peternakan		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		900,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						Tahun 2021		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			2	01	24	08	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan			25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		150,000,000		Binjai
			2	05			Perikanan																		
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai	1. Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	e. Produksi ikan,berupa : ► Produksi ikan air tawar (ton) ► Produksi benih ikan (ekor)	2	05	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Terlaksananya Pengembangan Budidaya Perikanan	e. Produksi ikan,berupa : ► Produksi ikan air tawar sebesar 2859,41 ton ► Produksi benih ikan sebanyak 34,92 juta ekor		2,184,918,800		2,189,918,800		2,299,130,000		2,327,130,000		2,423,130,000		2,824,130,000		14,248,357,600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
			2	05	20	01	Pengadaan Calon Induk/ Bibit Ikan Nila Unggul	Terlaksananya penyediaan calon induk/ bibit ikan		3,025	100,000,000	3,050	100,000,000	3,075	100,000,000	3,100	100,000,000	3,125	100,000,000	3,150	150,000,000	3,150	650,000,000		Binjai
			2	05	20	02	Pengadaan Calon Induk/ Bibit Ikan Gurame Unggul			40	100,000,000	45	100,000,000	50	100,000,000	55	100,000,000	60	100,000,000	65	150,000,000	65	650,000,000		Binjai
			2	05	20	03	Pengadaan Calon Induk/ Bibit Ikan Lele Unggul				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		150,000,000		650,000,000		Binjai
			2	05	20	04	Pengadaan Calon Induk/ Bibit Ikan Mas Unggul				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		150,000,000		650,000,000		Binjai
			2	05	20	05	Fasilitas Peningkatan Produksi Kelompok Budidaya Perikanan Penerima Sertifikat CBIB	Tercapainya peningkatan produktivitas ikan			60,000,000		60,000,000		65,000,000		65,000,000		65,000,000		65,000,000		380,000,000		Binjai
			2	05	20	06	Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CBIB)				30,000,000		30,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		200,000,000		Binjai
			2	05	20	07	Pelatihan CBIB dan CPIB bagi Pokdakan				25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		150,000,000		Binjai
			2	05	20	08	Pengembangan Kapasitas BBI Bersertifikat CPIB				15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		90,000,000		Binjai
			2	05	20	09	Operasional Balai Benih Ikan (BBI) Dalam Rangka Produksi Benih				139,094,800		139,094,800		150,000,000		150,000,000		155,000,000		155,000,000		888,189,600		Binjai
			2	05	20	10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Pakan Alami				40,000,000		40,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		70,000,000		315,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			2052011	Pelatihan Pakan Alami Bagi Pokdakan	Terlaksananya pengembangan pakan ikan			35,000,000		35,000,000		40,000,000		48,000,000		55,000,000		62,000,000		275,000,000		Binjai
			2052012	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Melalui Pelatihan Pengolahan Pakan Ikan				25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		150,000,000		Binjai
			2052013	Pengembangan Pakan Ikan Olahan/ Bahan Pakan Ikan				50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000		Binjai
			2052014	Magang Petugas Perbenihan di BBAT Sukabumi	Tercapainya peningkatan manajemen pemeliharaan ikan			40,630,000		40,630,000		40,630,000		40,630,000		40,630,000		40,630,000		243,780,000		Binjai
			2052015	Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok Budidaya Perikanan				80,000,000		80,000,000		88,000,000		93,000,000		97,000,000		99,000,000		537,000,000		Binjai
			2052016	Peningkatan SDM Petugas Balai Benih Ikan				40,630,000		40,630,000		50,000,000		55,000,000		65,000,000		70,000,000		321,260,000		Binjai
			2052017	Peningkatan SDM Petugas Perikanan				80,000,000		80,000,000		85,000,000		85,000,000		90,000,000		90,000,000		510,000,000		Binjai
			2052018	Peningkatan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar				60,000,000		60,000,000		70,000,000		80,000,000		90,000,000		100,000,000		460,000,000		Binjai
			2052019	Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar				70,000,000		70,000,000		70,000,000		80,000,000		85,000,000		90,000,000		465,000,000		Binjai
			2052020	Pelatihan Teknologi Budidaya Ikan Gurame				63,000,000		63,000,000		86,000,000		90,000,000		95,000,000		100,000,000		497,000,000		Binjai
			2052021	Pelatihan Teknologi Budidaya Ikan Lele Sangkuriang				80,000,000		80,000,000		90,000,000		94,000,000		99,000,000		104,000,000		547,000,000		Binjai
			2052022	Pelatihan Teknologi Budidaya Ikan Baung				80,000,000		80,000,000		85,000,000		90,000,000		95,000,000		100,000,000		530,000,000		Binjai
			2052023	Pelatihan Teknologi Budidaya Ikan Hias				90,000,000		90,000,000		100,000,000		105,000,000		110,000,000		115,000,000		610,000,000		Binjai
			2052024	Pengadaan Mesin Pompa Bagi Pokdakan			40,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		290,000,000		Binjai	



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			2 05 20 25	Pengadaan Bak Fiber Bagi Pokdakan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana perikanan			60,000,000		60,000,000		66,000,000		72,000,000		78,000,000		85,000,000		421,000,000		Binjai
			2 05 20 26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar				67,500,000		70,000,000		72,500,000		75,000,000		77,500,000		80,000,000		442,500,000		Binjai
			2 05 20 27	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha Budidaya Ikan Hias				40,000,000		42,500,000		45,000,000		47,500,000		50,000,000		52,500,000		277,500,000		Binjai
			2 05 20 28	Penyediaan Saprokan di BBI				117,434,000		117,434,000		120,000,000		135,000,000		137,000,000		150,000,000		776,868,000		Binjai
			2 05 20 29	Rehab Kantor dan Gudang Pakan (Penyekatan)				45,000,000		45,000,000		45,000,000		-		-		-		135,000,000		Binjai
			2 05 20 30	Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasrana Produksi di BBI				10,630,000		10,630,000		13,000,000		15,000,000		17,000,000		19,000,000		85,260,000		Binjai
			2 05 20 31	Pengadaan Kendaraan Roda Dua Bagi Petugas Perbenihan di BBI				64,000,000		64,000,000		-		-		-		65,000,000		193,000,000		Binjai
			2 05 20 32	Pembelian Laptop dan Printer Bagi BBI				-		-		30,000,000		-		-		35,000,000		65,000,000		Binjai
			2 05 20 33	Pengembangan dan Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Terlaksananya penanganan pengendalian penyakit ikan			62,000,000		62,000,000		63,000,000		65,000,000		65,000,000		67,000,000		384,000,000		Binjai
			2 05 20 34	Operasional Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan				40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		240,000,000		Binjai		
			2 05 20 35	Peningkatan SDM Petugas Laboratorium				20,000,000		20,000,000		20,000,000		22,000,000		22,000,000		129,000,000		Binjai		
			2 05 20 36	Monitoring Residu Antibiotik pada Ikan dan Pokdakan dalam Rangka Sertifikasi CBIB				25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		150,000,000		Binjai		



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			2	05	20	37	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Melalui Pelatihan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan			30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		180,000,000		Binjai
			2	05	20	38	Pemantauan Penyakit Ikan dan OIKB (Obat Ikan, Kimia, dan Biologi)			35,000,000		35,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000		55,000,000		260,000,000		Binjai
			2	05	20	39	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada UPTD Balai Benih Ikan		Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada UPTD Balai Benih Ikan		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		150,000,000	
			2	05	23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		436,000,000		436,000,000		510,000,000		577,000,000		643,000,000		715,000,000		3,317,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
			2	05	23	01	Mengikuti Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan di Tingkat Provinsi	Terlaksananya fasilitasi statistik perikanan, pasca panen, pemasaran dan ajang kompetisi perikanan		25,000,000		25,000,000		28,000,000		32,000,000		35,000,000		40,000,000		185,000,000		Luar daerah
			2	05	23	02	Apresiasi Pembudidaya Ikan Hias Melalui Kontes Ikan Hias			50,000,000		50,000,000		60,000,000		70,000,000		80,000,000		90,000,000		400,000,000		Binjai
			2	05	23	03	Mengikuti Forum dan Seminar Indonesia Aquacultur			40,000,000		40,000,000		50,000,000		60,000,000		70,000,000		80,000,000		340,000,000		Luar daerah
			2	05	23	04	Mengikuti Kegiatan PENAS			30,000,000		30,000,000		40,000,000		50,000,000		60,000,000		70,000,000		280,000,000		Luar daerah
			2	05	23	05	Peningkatan dan Pengembangan Data Statistik Perikanan			65,000,000		65,000,000		75,000,000		80,000,000		85,000,000		90,000,000		460,000,000		Binjai
			2	05	23	06	Pemantapan Metode Perhitungan Nilai Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun Kota Binjai			50,000,000		50,000,000		60,000,000		70,000,000		80,000,000		90,000,000		400,000,000		Binjai
			2	05	23	07	Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan			36,000,000		36,000,000		42,000,000		45,000,000		48,000,000		55,000,000		262,000,000		Binjai



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			2	05	23	08	Pemeriksaan dan Sosialisasi Bahan Pengawet Pada Produk Pasca Panen Perikanan				25,000,000	25,000,000		30,000,000	35,000,000		40,000,000	45,000,000		200,000,000		Binjai
			2	05	23	09	Sosialisasi Gerakan Gemar Makan Ikan				22,000,000	22,000,000		25,000,000	30,000,000		40,000,000	174,000,000			Binjai	
			2	05	23	10	Biaya Penunjang DAK Perikanan				68,000,000	68,000,000		75,000,000	80,000,000		85,000,000	466,000,000			Binjai	
			2	05	23	11	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Bidang Perikanan				25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		25,000,000	150,000,000			Binjai	
Total Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai (dalam juta)								21,965.37		22,365.87		23,163.40		24,952.99		25,227.49		26,721.49		144,396.61		

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BINJAI

Ir. DEWI ANGGERIANI
PEMBINA TK. I
NIP. 19630809 199203 2 002

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

6.1. Pengantar : Target Makro

Target makro pembangunan pertanian Kota Binjai selama tahun 2016-2021 mencakup pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kota Binjai, neraca perdagangan sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian Kota Binjai, investasi sektor pertanian Kota Binjai, nilai tukar petani, dan pendapatan per kapita petani Kota Binjai.

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Kota Binjai

Selama periode 2016-2021, PDRB sektor pertanian Kota Binjai diharapkan tumbuh diatas 0,25 % dan diharapkan dapat memberikan kontribusi diatas 3,75 % terhadap PDRB Kota Binjai.

b) Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kota Binjai

Tenaga kerja sektor pertanian diperkirakan masih cukup besar. Namun demikian, diproyeksikan dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi Kota Binjai di berbagai sektor khususnya sektor perdagangan dan industri di periode 2016-2021, maka diprediksikan laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian Kota Binjai menjadi menurun.

c) Investasi Sektor Pertanian Kota Binjai

Investasi sektor pertanian yang dimaksud dalam hal ini seharusnya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian Kota Binjai. Namun karena selama periode 5 tahun sebelumnya belum didapat data terperinci nilai investasi yang mengalir ke sektor pertanian dalam bentuk PMDN/ PMA, maka investasi sektor pertanian Kota Binjai sepanjang tahun 2016-2021 akan digambarkan dari data jumlah perusahaan baru yang menanamkan PMDN di sektor pertanian Kota Binjai tiap tahunnya. Proyeksi sasaran investasi PMDN untuk sektor pertanian Kota Binjai adalah lebih dari 5 perusahaan baru tiap tahunnya.

d) Neraca Perdagangan Sektor Pertanian

Neraca perdagangan sektor pertanian yang dimaksud dalam hal ini seharusnya adalah nilai ekspor dan impor di sektor pertanian Kota Binjai. Namun karena selama periode 5 tahun sebelumnya belum didapat data terperinci nilai ekspor dan impor di sektor pertanian Kota Binjai, maka neraca perdagangan sektor pertanian sepanjang tahun 2016-2021 akan didekati dengan data nilai ekspor dan impor di sektor pertanian Sumatera Utara tiap tahunnya. Neraca perdagangan sektor pertanian diupayakan terus mengalami surplus, dimana nilai ekspor sektor pertanian masih defisit, namun diharapkan adanya penurunan laju nilai impor. Diharapkan impor bahan pangan dapat dikendalikan dengan kebijakan yang tepat. Neraca perdagangan pertanian selama tahun 2016-2021 diharapkan menunjukkan tren surplus yang terus meningkat.

e) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menggambarkan perbandingan antara indeks yang diterima petani dan indeks pengeluaran petani. Namun karena selama periode 5 tahun sebelumnya belum didapat data terperinci angka NTP Kota Binjai, maka angka NTP sepanjang tahun 2016-2021 akan didekati dengan data angka NTP Sumatera Utara tiap tahunnya. Untuk periode 2016-2021, sasaran angka NTP diharapkan diatas 100 yang berarti bahwa penerimaan petani diharapkan semakin lebih besar dari pengeluarannya.

f) Pendapatan Per Kapita Petani Kota Binjai

Kesejahteraan petani Kota Binjai yang salah satunya diukur dengan pendapatan per kapita petani diperoleh dengan menghitung nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian Kota Binjai dibagi dengan jumlah penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian Kota Binjai. Untuk periode 2016-2021, sasaran pendapatan per kapita petani Kota Binjai diharapkan diatas Rp. 500.000,- per bulan yang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita petani Kota Binjai diharapkan tetap diatas angka garis kemiskinan Kota Binjai.

6.2. Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

Indikator kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam periode 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 27. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator Kinerja Utama SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai								
	a. Produksi padi (ton)	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
	b. Produksi jagung (ton)	7.042	7.100	7.150	7.200	7.250	7.300	7.350	7.350
	c. Produksi kedelai (ton)	8,80	10	15	20	25	30	35	35
	d. Produksi ternak, berupa :								
	▶ Produksi daging (ton)	674	700	725	750	775	800	825	825
	▶ Produksi telur (ton)	8.983	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	9.600
	▶ Produksi susu (liter)	19.583	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000	23.000
	▶ Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di RPH (%))	55,98	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00	62,00	62,00
	e. Produksi ikan, berupa :								
	▶ Produksi ikan air tawar (ton)	2.859,41	3.025	3.050	3.075	3.100	3.125	3.150	3.150
	▶ Produksi benih ikan (juta ekor)	34,92	40	45	50	55	60	65	65
2	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai								
	a. Skor Pola Pangan Harapan	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	81,5
	b. Konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	1622,5	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
	c. Penurunan konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	121	120	119	118	117	116	115	115
3	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar								
	a. Produksi rambutan (ton)	473	500	525	550	575	600	625	625
	b. Produksi jambu air (ton)	122	130	140	150	170	180	190	190
	c. Produksi bengkuang (ton)	970	1.070	1.170	1.270	1.370	1.470	1.570	1.570
	d. Produksi cabe besar (ton)	185	200	225	250	275	300	325	325
	e. Produksi jamur (kuintal)	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,70
	f. Produksi anggrek (tangkai)	1.640	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
4	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai								
	a. Produksi ubi kayu (ton)	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900	2.900
	b. Produksi ubi jalar (ton)	756	800	850	900	950	1.000	1.050	1.050
	c. Produksi jahe (kuintal)	2,35	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	3,75
	d. Produksi kunyit (kuintal)	0,76	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,25
	e. Produksi temulawak (kuintal)	1,49	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,00
	f. Jumlah instalasi biogas (unit)	10	12	14	16	17	18	20	20
5	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai								
	a. Pendapatan per kapita petani (rupiah/kapita/bulan)	819.946	820.000	825.000	830.000	835.000	840.000	845.000	845.000
	b. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	12.219	12.150	12.100	12.050	12.000	11.950	11.900	11.900
6	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik								
	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	58,39	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50	72,50

BAB VII

PENUTUP DAN KAIDAH PELAKSANAAN

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai setiap tahun mulai tahun 2016-2021;
2. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai melaksanakan sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) kepada petani, peternak, dan pembudidaya ikan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi - Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra);
4. Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi/ Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, serta kelompok tani/ kelompok ternak/ kelompok pembudidaya ikan, termasuk dunia usaha pertanian, peternakan, dan perikanan, agar melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 ini dengan sebaik-baiknya;
5. Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi/ Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, berkewajiban menyusun usulan kegiatan SKPD yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi/ Unit Pelaksana Teknis Daerah masing-masing, yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan bahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi/ Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi/ Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 dengan bahan Rencana Kerja (Renja) dari Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi/ Unit Pelaksana Teknis Daerah;

7. Konsepsi prioritas dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 ini, baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas;
8. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan;
9. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi - Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

7.2. Penutup

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana pembangunan ketahanan pangan dan pertanian Kota Binjai akan diarahkan perkembangannya; apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodesasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 ini disesuaikan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2016-2021, yaitu pasangan Walikota Binjai, H.M. Idaham, SH., M.Si. dengan Wakil Walikota Binjai, H. Timbas Tarigan, SE., yang dilantik pada oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara, Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si. pada tanggal 17 Februari 2016.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021, dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/ Permentan/ HK.140/ 4/ 2015 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/ Permen-KP/ 2015. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2010-2015, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2021 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2021.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tahunan SKPD, yakni Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk periode satu tahun.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

**Ir. DEWI ANGGERIANI
PEMBINA TK. I
NIP. 19630809 199203 2 002**